



UNIVERSITAS INDONESIA

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH
DALAM UPAYA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
DI KOTA CIREBON
(STUDI KASUS KECAMATAN HARJAMUKTI)**

SKRIPSI

SITI HARDIYANTI

1006665435

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
DEPOK
JUNI 2014**



UNIVERSITAS INDONESIA

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH
DALAM UPAYA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
DI KOTA CIREBON
(STUDI KASUS KECAMATAN HARJAMUKTI)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu
Administrasi dalam bidang Ilmu Administrasi Negara**

SITI HARDIYANTI

1006665435

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
DEPOK
JUNI 2014**



Universitas Indonesia
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Departemen Ilmu Administrasi
Program Sarjana Reguler

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah Saya nyatakan dengan benar

Nama : Siti Hardiyanti

NPM : 1006665435

Tanda Tangan: 

Tanggal : 27 Juni 2014



Universitas Indonesia
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Departemen Ilmu Administrasi
Program Sarjana Reguler

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Siti Hardiyanti
NPM : 1006665435
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Dalam Upaya Pembangunan Berkelanjutan di Kota Cirebon (Studi Kasus Kecamatan Harjamukti)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Zuliansyah Putra Zulkarnain, S.Sos, M.Si

Sekretaris Sidang : Nidaan Khafian, S.Sos, MA

Penguji Ahli : Drs. Mohammad Riduansyah, M.Si

Pembimbing : Teguh Kurniawan, S.Sos, M.Sc

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 27 Juni 2014

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah akhirnya dapat diselesaikan penelitian skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Dalam Upaya Pembangunan Berkelanjutan di Kota Cirebon (Studi Kasus Kecamatan Harjamukti). Puji serta syukur Penulis panjatkan atas limpahan karunia yang telah diberikan oleh Allah SWT sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penelitian skripsi ini dilatarbelakangi dengan adanya masalah pengelolaan sampah pada kebijakan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Kebersihan di Kota Cirebon dan masalah yang ditemui di lapangan.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dari berbagai pihak yang telah membantu dalam hal bimbingan, saran, fasilitas, doa dan motivasi. Hal tersebut memberikan suntikan semangat untuk selalu berusaha sebaik mungkin dalam penulisan skripsi ini. Pada kesempatan ini disampaikan ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Arie Setiabudi, M.Sc., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia
2. Dr.Roy Valiant Salomo, M.Soc.Sc., selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI
3. Dr.Lina Miftahul Jannah M.Si., selaku Ketua Program Sarjana Reguler dan Kelas Paralel Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI
4. Teguh Kurniawan, S.Sos, M.Sc selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UI sekaligus Pembimbing Skripsi, atas kesediaan waktu, pengarahan dan nasehatnya selama penyelesaian skripsi ini
5. Drs. Mohammad Riduansyah M.Si selaku Pembimbing Akademik sekaligus Penguji Sidang yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk selama masa perkuliahan di FISIP UI
6. Zuliansyah Putra Zulkarnain, S.Sos, M.Si selaku Ketua Sidang yang telah memberikan saran dan kritikan untuk perbaikan skripsi penulis
7. Nidaan Khafian, S.Sos, MA selaku Sekretaris Sidang penulis yang telah memberikan saran dan kritikan untuk perbaikan skripsi penulis

8. Segenap dosen Program Sarjana Reguler Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI, terutama Program Studi Ilmu Administrasi Negara
9. Seluruh staf Sekretariat Program Sarjana Reguler terutama Mba Nur dan Mba Ina serta seluruh staf perpustakaan MBRC yang sangat membantu penulis dalam pengumpulan literatur buku dan penelitian ilmiah
10. Segenap Pimpinan dan Staf Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cirebon, UPTD TPA Kopiluhur, Kantor Lingkungan Hidup Kota Cirebon serta pihak-pihak yang terkait penelitian penulis
11. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah memberikan beasiswa bidikmisi selama 4 tahun
12. Almarhum Bapak tercinta yang telah memberikan nasehat yang berguna bagi anak-anaknya semasa hidup dan tak lupa kepada Ibunda tersayang yang memberikan limpahan kasih sayang dan segalanya untuk anak-anaknya
13. Kakak-kakakku tercinta yang telah memberikan dukungan materil maupun non materil terutama kepada Mba Ayu, Mba Zulfa, Mba Ziah. Tak lupa kepada kakakku M.Ubaidillah dan M.Rahmat Darojat yang dapat diandalkan dalam keluarga. Selain itu, terimakasih kepada keponakanku yang tersayang Rizki Rahmaditia yang sudah seperti adik sendiri.
14. Teman-teman angkatan 2010 Administrasi FISIP UI terutama Administrasi Negara Reguler A & B yang banyak membantu selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Terimakasih juga untuk acara jalan-jalan negara yang seru dan berkesan, tetep solid ya Kesulor!!
15. Teman-teman terbaik Administrasi Negara 2010 Reguler A khususnya Dita Astrifianti, Siska Febriana, Aprilia Bela H, Nazirah Yakub, Novita Sari dan Felicia Sitanggung yang selama ini *sharing* atas kegundahan penulisan skripsi dan juga memberikan motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini
16. Teman-teman satu pembimbing yaitu Sofia Amalia, Andhika Dwi Prasetya, Noor Kusumawati sebagai pengingat untuk segera bimbingan dan menyelesaikan skripsi ini
17. Teman-teman semasa Maba hingga sekarang yang tetep gokil dan gaul yaitu Habibah, Nurina Maskayanti, Ruli Arifah, Arummalinda dan Dian E.P.L. Terimakasih juga atas diskusi ngebolang, diskusi politik dan diskusi hidup

yang menyenangkan dan seru. Tak lupa ucapan terimakasih kepada Lestari Kurniati atas nasehat tentang perkuliahan maupun lainnya serta Rizki Aulia yang selalu *sharing* dan memberikan saran tentang skripsi dan lain-lain

18. Teman-teman Makara Keluarga Cirebon (Makabon) yang menjadi keluarga kedua sejak Maba hingga sekarang
19. *Partner* kerja Cirebon In Charity (CIC) selama 3 periode baik senior, junior maupun seangkatan terutama untuk Hani, Indra, Peni. Semoga dikemudian hari kita masih dapat berkontribusi untuk pendidikan Cirebon yang lebih baik
20. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, sangat diharapkan saran dan kritikan yang membangun demi kesempurnaan penelitian di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Depok, 27 Juni 2014

Siti Hardiyanti

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademika Universitas Indonesia, Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Siti Hardiyanti
NPM : 1006665435
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah Saya yang berjudul:

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Dalam Upaya Pembangunan Berkelanjutan di Kota Cirebon (Studi Kasus Kecamatan Harjamukti) beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal: 27 Juni 2014

Yang menyatakan



(Siti Hardiyanti)

ABSTRAK

Nama : Siti Hardiyanti
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul : Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Dalam
Upaya Pembangunan Berkelanjutan di Kota Cirebon
(Studi Kasus Kecamatan Harjamukti)

Penelitian ini didasari kebijakan pengelolaan sampah di Kota Cirebon yang belum membahas tentang pengurangan sampah di tingkat sumber sampah. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan *post positivist* serta analisis data yang bersifat kualitatif. Penelitian ini mendeskripsikan implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Kebersihan di Kota Cirebon dalam upaya pembangunan berkelanjutan di Kota Cirebon dilihat dari karakteristik masalah, karakteristik kebijakan dan lingkungan kebijakan. Pembahasan selanjutnya yaitu pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan sampah di Kota Cirebon (Studi Kasus Kecamatan Harjamukti) yang dilihat dari perspektif ekonomi, sosial dan lingkungan. Ketiga perspektif tersebut masih terdapat kekurangan karena hanya sebagian kecil masyarakat yang telah mengelola sampah dengan konsep 3R. Kelompok masyarakat yang dianggap berhasil yang mengelola sampah dengan konsep 3R adalah masyarakat Rw 08 Merbabu Asih Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti. Hal ini dikarenakan adanya hambatan seperti kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya SDM pelaksana kebijakan, kurangnya lahan, kurangnya peran swasta, terbatasnya anggaran dan kebijakan pengelolaan sampah yang masih terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan sampah.

Kata kunci : Implementasi kebijakan, pengelolaan sampah, pembangunan berkelanjutan

ABSTRACT

Name : Siti Hardiyanti
Study Program : Public Administration
Title : The Implementation Of Waste Management Policy For Sustainable Development In Cirebon City (Case Study: The District Of Harjamukti)

This research is based on waste management in Cirebon City which have not contain about waste reduction in the waste source stage. This research used post positivist approach and analyzing qualitative data. The result of this research describes the implementation of the policy from Regional Regulation of Cirebon Number 2 of 2002 about the Realization of City's Cleanliness Program in Cirebon for sustainable development in Cirebon, which is assessed by tractability of the problem, ability of statute to structure implementation, and nonstatutory variables affecting implementation. The next part deals with sustainable development of waste management in Cirebon (Case study: The district of Harjamukti) which used economic, social, and environment perspective. All those three perspectives could still be improved since there is only small number of people who could apply the concept of 3R in dealing with waste. Groups of people that are considered successful in using the concept of 3R in dealing with waste are Rw 08 Merbabu Asih, Larangan Subdistrict, The district of Harjamukti. This is caused by some limitations like the lack of people's awareness, the lack of human resources for implementing the policy, the lack of space, the lack of private sector's role, the lack of financial support, and the policy regarding to waste management that is not in accordance with Act Number 18 of 2008 about waste management and The Regulation Number 33 of 2010 from Ministry of Internal Affairs about the instruction of waste management.

Key words : Implementation, waste management policy, sustainable development

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Signifikansi Penelitian.....	13
1.5 Sistematika Penelitian.....	14
BAB 2 KERANGKA PEMIKIRAN.....	16
2.1 Tinjauan Pustaka.....	16
2.2 Kebijakan Publik.....	27
2.2.1 Implementasi Kebijakan Publik.....	30
2.2.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Publik.....	31
2.3 Manajemen Sampah.....	34
2.3.1 Definisi Sampah.....	34
2.3.2 Tipe Sampah.....	34
2.3.3 Pengelolaan Sampah dan Pembuangan Akhir.....	35
2.3.3.1 <i>Landfill</i>	36
2.3.3.2 <i>Incineration</i>	39
2.3.3.3 Pengomposan.....	40
2.3.4 Konsep 3R.....	41
2.4 Pembangunan Berkelanjutan.....	42
2.5 Pengelolaan Sampah Berkelanjutan.....	46
2.6 Kerangka Pikir Penelitian.....	48
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	51
3.1 Pendekatan Penelitian.....	51
3.2 Jenis Penelitian.....	52
3.2.1 Berdasarkan Tujuan Penelitian.....	52
3.2.2 Berdasarkan Manfaat Penelitian.....	53
3.2.3 Berdasarkan Dimensi Waktu.....	53
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	54
3.4 Teknik Analisis Data.....	55
3.5 Narasumber/Informan Penelitian.....	56

3.6 Lokasi Penelitian.....	57
3.7 Proses Penelitian.....	57
3.8 Batasan Penelitian.....	58
3.9 Keterbatasan Penelitian.....	58
BAB 4 GAMBARAN UMUM.....	59
4.1 Gambaran Umum Kota Cirebon.....	59
4.1.1 Kondisi Geografis.....	59
4.1.2 Pemerintahan.....	60
4.1.3 Kondisi Demografis.....	62
4.1.4 Kondisi Ekonomi.....	63
4.2 Gambaran Umum Pengelolaan Sampah di Kota Cirebon.....	64
4.2.1 Kondisi Existing.....	65
4.2.2 Sarana dan Prasarana.....	65
4.3 Regulasi Pengelolaan Sampah di Kota Cirebon.....	68
4.3.1 Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Kebersihan di Kota Cirebon.....	68
4.3.2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.....	70
4.3.3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah.....	71
BAB 5 ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN DI KOTA CIREBON DALAM UPAYA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI KOTA CIREBON.....	72
5.1 Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Kebersihan di Kota Cirebon...	72
5.1.1 Karakteristik Masalah Dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Kebersihan di Kota Cirebon.....	72
5.1.1.1 Tingkat Kesulitan Teknis dari Masalah yang Bersangkutan.....	73
5.1.1.2 Tingkat Kemajemukan dari Kelompok Sasaran.....	78
5.1.1.3 Proporsi Kelompok Sasaran Terhadap Total Populasi.....	79
5.1.1.4 Cakupan Perubahan Perilaku yang Diharapkan.....	80
5.1.2 Karakteristik Kebijakan Dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Kebersihan di Kota Cirebon.....	81
5.1.2.1 Kejelasan Isi Kebijakan dan Dukungan Teoritis Kebijakan.....	81
5.1.2.2 Alokasi Sumberdaya Finansial dan Dukungan Berbagai Institusi Pelaksana.....	82
5.1.2.3 Konsistensi Aturan dan Komitmen Aparat Terhadap Tujuan Kebijakan.....	88
5.1.2.4 Akses Partisipasi Kelompok-Kelompok Luar Dalam Implementasi Kebijakan.....	90

5.1.3 Lingkungan Kebijakan Dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Kebersihan di Kota Cirebon.....	91
5.1.3.1 Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat dan Tingkat Kemajuan Teknologi.....	91
5.1.3.2 Dukungan Publik Terhadap Suatu Kebijakan.....	92
5.1.3.3 Sikap dari Kelompok Pemilih.....	93
5.1.3.4 Tingkat Komitmen dan Ketrampilan dari <i>Implementor</i> ...	94
5.2 Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pengelolaan Sampah di Kota Cirebon.....	97
5.2.1 Ekonomi.....	97
5.2.2 Sosial.....	99
5.2.3 Lingkungan.....	102
5.3 Hambatan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Cirebon Dalam Upaya Pembangunan Berkelanjutan.....	104
5.3.1 Kurangnya Kesadaran Masyarakat.....	104
5.3.2 Kurangnya SDM Pelaksana Kebijakan.....	105
5.3.3 Kurangnya Lahan.....	107
5.3.4 Kurangnya Peran Swasta.....	110
5.3.5 Terbatasnya Anggaran.....	112
5.3.6 Kebijakan.....	116
 BAB 6 SIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	 120
6.1 Simpulan.....	120
6.2 Rekomendasi.....	121
DAFTAR PUSTAKA.....	122
 LAMPIRAN RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Sampah dan Tempat Pembuangan Akhir Sampah di 9 Kota Jawa Barat.....	5
Tabel 1.2 Tingkat Kepadatan Penduduk dan Produksi Sampah per km ² di 9 Kota Jawa Barat.....	6
Tabel 1.3 Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Kota Cirebon Tahun 2009-2011.....	7
Tabel 1.4 Volume Sampah Perhari per Kecamatan (m ³) di Kota Cirebon.....	9
Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Mengenai Pengelolaan Sampah dan Pembangunan Berkelanjutan.....	22
Tabel 4.1 Banyaknya Kelurahan, RW, RT dan Rumahtangga Menurut Kecamatan di Kota Cirebon.....	62
Tabel 4.2 Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Per Kilometer Persegi Menurut Kecamatan Tahun 2012.....	63
Tabel 4.3 Jumlah Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) di Kota Cirebon Tahun 2009-2012.....	66
Tabel 4.4 Jumlah Peralatan Berat Operasional Kebersihan di Kota Cirebon Tahun 2009-2012.....	68
Tabel 5.1 Perbandingan Sistem <i>Open Dumping</i> , <i>Controlled Landfill</i> dan <i>Sanitary Landfill</i>	113

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Tahapan Dalam Proses Kebijakan.....	28
Gambar 2.2 Jenis Sampah.....	35
Gambar 2.3 <i>Sanitary Landfill</i>	37
Gambar 2.4 Sistem <i>Single Liner</i>	38
Gambar 2.5 Sistem <i>Composite Liner</i>	38
Gambar 2.6 Sistem <i>Double Liner</i>	38
Gambar 2.7 Sistem <i>cradle-to-cradle</i>	48
Gambar 2.8 Alur Pikir Penelitian.....	50
Gambar 4.1 Peta Administratif Kota Cirebon.....	61
Gambar 4.2 Tingkat Penghunian Hotel di Kota Cirebon Tahun 2005-2009.....	64
Gambar 4.3 TPS di Kecamatan Harjamukti dan Kecamatan Kesambi...	67
Gambar 4.4 Pengelolaan Sampah Kota Cirebon.....	70
Gambar 5.1 Mesin Pencacah di Pabrik Kompos.....	96
Gambar 5.2 Kegiatan Bank Sampah di RW 08 Merbabu Asih.....	101
Gambar 5.3 TPS Liar di Jalan By Pass Kota Cirebon.....	108
Gambar 5.4 TPS Tertutup di Sukalila.....	110
Gambar 5.5 Gerobak Sampah Bantuan Bank Indonesia.....	110
Gambar 5.6 Kondisi <i>Controlled Landfill</i> di TPA Kopiluhur.....	114

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

Lampiran 2 : Pedoman Observasi



BAB 1

PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan secara rinci mengenai latar belakang masalah dan pokok permasalahan yang menjadi alasan peneliti mengangkat tema tentang Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Dalam Upaya Pembangunan Berkelanjutan di Kota Cirebon (Studi Kasus Kecamatan Harjamukti). Selain itu, bab ini juga menjelaskan mengenai tujuan penelitian, signifikansi penelitian, dan sistematika penulisan.

1.1 Latar Belakang Masalah

Istilah pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) sudah sejak lama populer secara global. Hal ini dikarenakan lingkungan global yang harus memperhatikan adanya keseimbangan antara masa kini dan masa mendatang. PBB kemudian menerbitkan buku “*Our Common Future oleh World Commission on Environment and Development* (Roth dalam Budihardjo, 2005:1) sebagai tindak lanjut pembahasan isu lingkungan. *Our Common Future* atau *Brundtland Report* (WCED dalam El-Haggar, 2007:104) menyebutkan definisi pembangunan berkelanjutan bahwa *Development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*. Hal ini dapat berarti pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengabaikan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka. Sementara itu, menurut *Sustainable Seattle* bahwa pembangunan berkelanjutan adalah perubahan sosial dan ekonomi yang mendorong kesejahteraan manusia dan kualitas hidup tanpa menyebabkan kerusakan ekologi atau sosial (*Redefining Progress* dalam El-Haggar, 2007:104).

Definisi tersebut mengarahkan pada perlunya penekanan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Drexhage dan Murphy, 2010 menyebutkan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yaitu: *pertama*, komitmen keseimbangan dan keadilan dalam prioritas yang harus diberikan kepada perbaikan kondisi kemiskinan dunia dan menjelaskan hak-hak generasi

mendatang. *Kedua*, pandangan jangka panjang yang menekankan prinsip kehati-hatian, yaitu “dimana ada ancaman serius atau kerusakan yang tidak dapat dipulihkan, kekurangan ilmu pengetahuan seharusnya tidak dipakai sebagai alasan penundaan pengukuran biaya untuk mencegah degradasi lingkungan” (Deklarasi Rio tentang Lingkungan dan Pembangunan, Prinsip 15). *Ketiga*, pembangunan berkelanjutan mewujudkan integrasi, pemahaman dan bertindak atas interkoneksi yang kompleks yang ada antara lingkungan, ekonomi dan sosial (Drexhage dan Murphy, 2010:7).

Pentingnya pembangunan berkelanjutan memberikan konsekuensi pada kesehatan manusia sebagai dampak adanya kualitas lingkungan yang mengganggu kehidupan manusia. Kualitas lingkungan yang mengganggu kehidupan manusia dikarenakan aktivitas manusia sendiri. Hal ini berdampak langsung pada kesehatan manusia. Kesehatan manusia menjadi kebutuhan dasar yang harus dipenuhi selain kebutuhan pendidikan. Kesehatan juga merupakan dimensi pengukuran dalam *Human Development Index. United Nation Development Programme* (UNDP, 2013:166) membagi negara-negara di dunia berdasarkan klasifikasi yaitu: *very high human development, high human development, medium human development* dan *low human development*. Klasifikasi tersebut dihitung berdasarkan kualitas kesehatan yang dilaksanakan pada masing-masing negara. UNDP pun memberikan data mengenai kematian tertinggi dikarenakan menderita penyakit malaria, kolera, sakit jantung dan diabetes. Dampak kesehatan tersebut terhadap manusia salah satunya adalah berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan manusia.

Aktivitas manusia yang tidak terlepas dari kegiatan perekonomian sehingga menimbulkan kekhawatiran berbagai dampak lingkungan hidup. Hal ini juga diperkuat oleh Djamin (2007:4) bahwa masalah-masalah lingkungan hidup dapat menjadi bencana yang dapat mempengaruhi kualitas kehidupan manusia. Tanda-tanda masalah lingkungan hidup seperti adanya polusi, pemanasan global, fotokimia kabut, hujan asam, erosi, banjir, intrusi dan sebagainya (Djamin, 2007: 4). Selain itu, Djamin (2007:5) juga menyatakan bahwa beberapa contoh penyebab kerusakan daya dukung alam yang disebabkan oleh faktor luar, seperti pencemaran udara yang berasal dari limbah pabrik dan kendaraan bermotor,

pencemaran air yang berasal dari limbah industri, pencemaran tanah yang disebabkan oleh limbah padat dan zat kimia dan pertambangan untuk mendapatkan mineral dari perut bumi (Djamin, 2007: 5).

Berdasarkan pernyataan Djamin (2007) tersebut maka peneliti berfokus mengenai limbah padat atau disebut juga sampah. *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD dalam *World Bank*, 2012:4) menyatakan bahwa sampah kota merupakan sampah yang dikumpulkan dan diolah oleh pemerintah kota. Pengelolaan sampah di negara dengan tingkat penghasilan rendah dan negara yang berpenghasilan menengah merupakan pelayanan kota yang paling penting saat ini (*World Bank*, 2012: ix).

Menurut *World Bank* (2012:ix) dalam Laporan *What a Waste: A Global Review Of Solid Waste Management* menyatakan bahwa peningkatan produksi sampah semakin bertambah dari tahun ke tahun. Sepuluh tahun yang lalu 2,9 miliar penduduk perkotaan menghasilkan 0,64 kg sampah per orang per hari (0,68 miliar ton per tahun). Laporan *World Bank* juga memperkirakan bahwa saat ini jumlah tersebut telah meningkat menjadi sekitar 3 miliar penduduk menghasilkan 1,2 kg per orang per hari (1,3 miliar ton per tahun). Pada tahun 2025 kemungkinan akan meningkat menjadi 4,3 miliar penduduk perkotaan menghasilkan sekitar 1,42 kg/orang/hari limbah padat perkotaan (2,2 miliar ton per tahun) (*World Bank*, 2012: ix).

Masalah sampah perkotaan yang terus-menerus mengalami peningkatan menyebabkan perlunya pengelolaan yang berkelanjutan. Selain itu, masalah sampah juga berdampak langsung pada kesehatan manusia. William, 2005 (dalam Malik dan Grohmann, 2012:510) menyatakan bahwa pada masa setelah revolusi industri diterbitkan Undang-Undang Kesehatan Publik 1875 yang diberlakukan pada otoritas lokal di Inggris untuk mengatur pemusnahan dan pembuangan sampah di Inggris. Amerika Serikat juga menerbitkan Undang-Undang 1975 yang diperkenalkan di Washington DC, yang melarang pembuangan sampah di jalanan. Undang-Undang tersebut diberlakukan karena sampah yang akan menimbulkan hama seperti lalat, tikus dan hama lainnya serta menimbulkan ancaman penyakit di daerah padat di sekitar kegiatan industri.

Indonesia merupakan negara yang terletak di Asia Tenggara, terdiri dari lebih dari 13.000 pulau besar dan kecil dengan total populasi mencapai 224.904.900 pada tahun 2007. Indonesia secara administratif terbagi atas 465 kota dimana terdiri dari 14 kota metropolitan, 15 kota besar, 56 kota medium, dan 380 kota kecil (Damanhuri, Handoko dan Padmi dalam Pariatamby, A dan M. Tanaka, 2014:140). Indonesia termasuk negara Asia dengan tantangan terbesar dalam pengelolaan sampah berdasarkan tingkat proyeksi untuk menangani masalah sampah (*World Bank*, 1999:1). Hal ini juga dibuktikan dengan adanya kegagalan dalam mengelola sampah di Indonesia. Damanhuri, Handoko dan Padmi (dalam Pariatamby dan Tanaka, 2014:151) menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia sejak tahun 2000 telah menunjukkan kegagalan dalam mengelola Tempat Pembuangan Akhir (TPA) seperti TPA Bantar Gebang di Jakarta, TPA Keputih di Surabaya dan terakhir adalah TPA Leuwigajah di Bandung. Adapun kegagalan pengelolaan sampah dapat dilihat pada peristiwa di TPA Leuwigajah Bandung yang kemudian menjadi Hari Peduli Sampah 2014 dengan *tagline* Indonesia Bersih Sampah 2020 pada tanggal 21 Februari 2014.

TPA Leuwigajah mengalami tanah longsor pada 21 Februari 2005 yang mengakibatkan 147 tewas akibat longsor sampah. Longsornya sampah TPA Leuwigajah dikarenakan cuaca yang saat itu hujan selama 3 hari yang menyebabkan 2,04 juta m³ sampah longsor. Maksimum ketinggian tempat pembuangan naik hingga 60-70 m sebelum terjadinya longsor (Pariatamby dan Tanaka, 2014:152). Hal ini terjadi dikarenakan sistem pengelolaan sampah yaitu *open dumping* yang menjadi sistem pembuangan sampah di sebagian besar TPA di Indonesia. Sistem *open dumping* ini hanya dibiarkan menggunung tanpa adanya upaya pengolahan lebih lanjut. Metode yang digunakan dalam pengelolaan sampah di seluruh Indonesia yaitu menggunakan metode pengumpulan-pengangkutan-pembuangan. Kendala pengangkutan juga menjadi masalah di Indonesia karena seluruh sampah pada tahun 2006 yang dapat diangkut hanya 60-70 % ke TPA oleh dinas yang bertanggungjawab dalam mengelola sampah dan kebersihan (Pariatamby dan Tanaka, 2014:140). Dinas yang bertanggungjawab dalam hal ini adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

Jumlah sampah di Kota Bandung merupakan jumlah yang paling banyak dibanding 8 kota lainnya di Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat terdiri atas 17 Kabupaten dan 9 Kota. Adapun jumlah sampah di 9 kota di Jawa Barat dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1 Jumlah Sampah dan Tempat Pengelolaan Akhir Sampah (TPAS) di 9 Kota Jawa Barat

No.	Kota	Area (km ²)	Populasi	Jumlah Sampah (m ³ /hari)	TPAS (m ³ /hari)
1.	Bandung	1.179	2.290.464	5.000	2.000
2.	Cimahi	2.680	482.763	1.226	-
3.	Bogor	2.001	833.523	1.950	1.501
4.	Bekasi	210	1.931.976	4.307	5.000
5.	Depok	3.441	1.353.249	2.996	612
6.	Cirebon	22	276.912	623	485
7.	Tasikmalaya	472	579.128	1.293	386
8.	Banjar	1.204	166.868	321	75
9.	Sukabumi	38	278.418	614	469

Sumber: BPLHD, 2008 dalam Engineering Consulting Firms Association Japan, 2009 *telah diolah kembali

Pada tabel 1.1 di atas terlihat Kota Bandung memproduksi sampah paling banyak. Namun, dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada permasalahan sampah di Kota Cirebon. Tabel 1.1 menunjukkan bahwa Kota Cirebon merupakan peringkat ketiga terendah dalam memproduksi sampah di Jawa Barat. Meskipun demikian, apabila dilihat produksi sampah berdasarkan kepadatan penduduk di sembilan kota tersebut, maka Kota Cirebon merupakan kota dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi dan produksi sampah tertinggi di Jawa Barat.

Kepadatan penduduk kasar dapat didefinisikan sebagai banyaknya jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilayah (BPS Kabupaten Tolikara, 2013). Sementara itu, produksi sampah per kilometer persegi dapat dihitung dari jumlah sampah (m^3 /hari) berbanding lurus dengan luas wilayah per kilometer persegi. Adapun Tabel 1.2 menjelaskan tentang tingkat kepadatan penduduk dan produksi sampah per km^2 .

Tabel 1.2 Tingkat Kepadatan Penduduk dan Produksi Sampah per km^2 di 9 Kota Jawa Barat

No.	Kota	Kepadatan Penduduk (km^2)	Produksi Sampah per km^2
1.	Cirebon	12.586,9	28,31
2.	Bekasi	9.199,8	20,5
3.	Sukabumi	7.326,8	16,15
4.	Bandung	1.942,7	4,24
5.	Tasikmalaya	1.226,9	2,74
6.	Bogor	416,5	0,97
7.	Depok	393,3	0,87
8.	Cimahi	180	0,46
9.	Banjar	138,6	0,26

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2014

Tabel 1.2 tersebut merupakan peringkat tertinggi hingga terendah dalam menghasilkan sampah di Jawa Barat. Kota Cirebon berada di peringkat pertama dalam hal kepadatan penduduk dan produksi sampah setiap harinya. Kota Cirebon masih menggunakan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Kebersihan di Kota Cirebon. Sementara itu, kota lainnya sudah selaras dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Selain itu, pengelolaan sampah juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah. Hal

ini menyebabkan Kota Cirebon dalam pengelolaan sampah dari sisi kebijakan pengelolaan sampah lebih tertinggal dibanding dengan kota lainnya.

Kota Cirebon menurut data BPS menyebutkan bahwa pada tahun 2009 luas wilayahnya adalah 37,36 km² dengan jumlah penduduk yaitu 304.152. Sementara itu, pada tahun 2010 luas wilayah Kota Cirebon adalah 37,36 km² dengan 296.389 penduduk (BPS Kota Cirebon, 2012). Jumlah penduduk di Kota Cirebon pada tahun 2011 mengalami peningkatan, begitu pula dengan luas wilayah yang semakin bertambah (Simreg-Bappenas, 2012). Jumlah penduduk Kota Cirebon pada tahun 2009-2011 dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut ini:

Tabel 1.3 Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Kota Cirebon Tahun 2009-2011

Tahun	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)
2009	37,36	304.152
2010	37,36	296.389
2011	40,16	301.711

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2014

Pertumbuhan jumlah penduduk turut berperan dalam peningkatan jumlah produksi sampah di Kota Cirebon. Selain itu, Kota Cirebon dalam penataan ruang nasional yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (RTRWN) adalah sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang merupakan salah satu pengembangan kawasan metropolitan, serta merupakan bagian dari kawasan andalan yaitu Ciayumajakuning (Cirebon – Indramayu – Majalengka – Kuningan) yang berupa kawasan pertanian, industri, perikanan, dan pertambangan. Oleh karena itu, Kota Cirebon mengembangkan kota dalam sektor perdagangan dan jasa. Rumusan tersebut tertuang dalam visi Kota Cirebon yang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2004 tentang Rencana Strategis Kota Cirebon 2004-2008 yaitu Kota Cirebon menjadi Kota Perdagangan dan Jasa Yang Maju Tahun 2008. Hal ini dikarenakan Kota Cirebon merupakan wilayah yang terletak pada posisi yang sangat strategis, karena

menjadi simpul pergerakan antar wilayah, seperti: DKI Jakarta, Bandung, Indramayu, Kuningan, Sumber-Majalengka, dan Tegal atau merupakan penghubung Jawa Barat dan Jawa Tengah. Cita-cita untuk memajukan Kota Cirebon juga diwujudkan secara tersurat dalam visi Kota Cirebon Tahun 2013-2018 yaitu Terwujudnya Kota Cirebon Sebagai Kota yang Religius, Aman, Maju, Aspiratif dan Hijau (RAMAH) pada Tahun 2018.

Selain sebagai pusat perdagangan dan jasa, Kota Cirebon juga berfungsi sebagai kota transit. Kota Cirebon yang menjadi penghubung antara Jawa Barat dan Jawa Tengah karena terletak pada jalur pantura (pantai utara) sebagai jalur utama perhubungan darat di Pulau Jawa. Hal ini menyebabkan banyak pendatang yang berkunjung maupun hanya sekedar transit yang membutuhkan suatu tempat untuk melakukan aktivitas ekonomi, seperti tempat perbelanjaan atau tempat istirahat. Namun demikian, aktivitas perdagangan dan jasa di Kota Cirebon berdampak langsung pada meningkatnya limbah atau sampah yang dihasilkan.

Pengelolaan Sampah di Kota Cirebon diatur dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Kebersihan di Kota Cirebon. Namun, permasalahan sampah belum tertangani dengan baik oleh Pemerintah Kota Cirebon. Produksi sampah warga Kota Cirebon dapat mencapai hingga 700 m³ per harinya merupakan kendala yang dihadapi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cirebon. Volume sampah terus mengalami peningkatan hingga saat ini mencapai lebih dari 700 m³/hari, padahal 2-3 tahun lalu masih 500 m³/hari (Redaksi Koran Sindo, 2014). Hal ini didukung berdasarkan tabel 1.4 dari BPS Kota Cirebon mengenai data volume sampah perhari per Kecamatan di Kota Cirebon tahun 2008-2011.

Tabel 1.4 Volume Sampah Perhari per Kecamatan (m³) di Kota Cirebon Tahun 2008-2011

No	Kecamatan	Volume Sampah			
		2008	2009	2010	2011
1	Harjamukti	210	229	234	240
2	Lemahwungkuk	138	150	153	157
3	Pekalipan	100	109	111	110
4	Kesambi	135	147	150	154
5	Kejaksan	165	180	184	189

Sumber: Data Olahan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (BPS Kota Cirebon, 2013 dalam Cirebon Dalam Angka 2013)

Apabila dilihat per Kecamatan di Kota Cirebon, maka Kecamatan Harjamukti merupakan kecamatan dengan produksi sampah terbanyak. Pada tabel 1.4 menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan produksi sampah dari tahun ke tahun di Kecamatan Harjamukti. Hal ini dikarenakan Kecamatan Harjamukti merupakan kecamatan terluas yaitu 17.615 km² (47%).

Sistem pengelolaan sampah saat ini di Kota Cirebon berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cirebon Tahun 2011-2031 mengembangkan sistem penimbunan berlapis (*sanitary landfill*). Sistem *sanitary landfill* ini merupakan sistem yang lebih baik dibandingkan dengan sistem *open dumping*. Menurut Stone, 1977 (dalam Tammemagi, 1999: 41) *sanitary landfill* biasa didefinisikan sebagai metode rekayasa untuk membuang limbah padat di tanah dengan menyebarkan limbah padat dalam lapisan tipis, pemadatan hingga volume terkecil dan menutupinya dengan tanah di akhir lapisan. Namun demikian, sistem *sanitary landfill* pun masih menemui sejumlah kendala, misalnya tidak konsistennya untuk melakukan penutupan tanah setiap tiga minggu sekali pada sistem ini. Operasional Bantar Gebang yang menggunakan sistem *sanitary landfill* menemui sejumlah

kendala seperti kekurangan sumberdaya keuangan, sumberdaya yang terlatih dan staf ahli (JICA dalam Chaerul et al, 2006).

Kota Cirebon yang mengembangkan sistem *sanitary landfill* seperti yang sudah disebutkan dalam RTRW Kota Cirebon tahun 2011-2031, maka lahan TPA di Kota Cirebon seharusnya menggunakan sistem ini. Namun demikian, pada faktanya adalah menggunakan sistem *controlled landfill*. Lahan TPA Kopiluhur di Kota Cirebon yaitu terdapat di Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon. TPA Kopiluhur diperkirakan dalam 2 tahun hingga 2015 tidak memungkinkan lagi untuk menampung sampah (Redaksi Pikiran Rakyat, 2014). Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Agus Hasyim bahwa masalah luas lahan TPA Kopiluhur yang masih terbatas. *“Kendalanya lahan terbatas, lahan yang tersedia baru 9,5 Hektare, Semuanya ada 20 Hektare malah, tapi masih belum berfungsi karena masih dikelola oleh masyarakat, jadi kalo dipake gak bisa”* (wawancara mendalam dengan Kepala Bidang Kebersihan Kota Cirebon H. Agus Hasyim, 4 Februari 2014). Selain itu, menurut Peraturan daerah Nomor 8 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cirebon Tahun 2011-2031 bahwa rencana pengelolaan di Tempat Pengelolaan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Kopiluhur di Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti dengan kapasitas kurang lebih 645 m³. Hal ini tentunya menjadi masalah ketika produksi sampah per hari di Kota Cirebon mencapai 700 m³ (Redaksi Pikiran Rakyat, 2014).

Oleh karena itu, sampah dan pengelolaannya kini menjadi masalah yang kian mendesak di Kota Cirebon. Namun pengelolaan sampah di Kota Cirebon tidak hanya melibatkan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cirebon, tetapi juga Kantor Lingkungan Hidup Kota Cirebon dengan program sarana kebersihan berupa penyediaan tempat sampah meskipun masih minim (Redaksi Bisnis Indonesia, 2013). Selain itu, pihak swasta juga terlibat dalam hal pengelolaan sampah di TPA Kopiluhur seperti PT Khatulistiwa Putera Mandiri (KPM). Perusahaan tersebut merupakan pengelola pabrik kompos di TPA Kopiluhur (Redaksi Kompas, 2010). Namun perusahaan tersebut hanya beroperasi hingga tahun 2010 saja. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Kepala UPTD TPA Kopiluhur Otang Somantri bahwa:

Universitas Indonesia

dulu waktu tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 ada pengelolaan kompostingnya. Namun, sejak tahun 2010 tidak ada pihak pengelola kompos, hingga saat ini tidak ada pihak ketiga yang minat lagi untuk mengelola kompos. Bisa dikatakan kegiatan ini vakum setelah tahun 2010 (Wawancara mendalam dengan Kepala UPTD TPA Kopiluhur Otang Somantri, 8 Mei 2014, Pukul 10.25)

Meskipun demikian, masalah pengelolaan sampah tersebut juga harus memperhatikan pembangunan berkelanjutan. Pihak pemerintah dalam hal ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cirebon serta Kantor Lingkungan Hidup Kota Cirebon harus mewujudkan pengelolaan sampah dalam upaya pembangunan berkelanjutan. Hal ini didasarkan atas masalah pencemaran sampah terhadap lingkungan disekitarnya. Jenis maupun komposisi dari sampah mengakibatkan terjadinya perubahan keseimbangan lingkungan baik terhadap tanah, air dan udara. Namun demikian, tidak hanya berdampak negatif terhadap lingkungan, sampah juga mengakibatkan dampak secara ekonomi dan sosial. Aspek sosial, ekonomi dan lingkungan menjadi aspek penting dalam pembangunan berkelanjutan. Hal ini juga didukung oleh Salim (2010: 23) “...*perlunya model pembangunan berkelanjutan yang dapat menghasilkan keberlanjutan dari sisi ekonomi, sosial, dan lingkungan secara bersamaan...*”.

1.2 Pokok Permasalahan

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Kebersihan di Kota Cirebon belum menunjukkan upaya pengurangan sampah dan penanganan sampah secara spesifik. Adapun beberapa hal yang belum diatur pada Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Kebersihan di Kota Cirebon diantaranya :

- Keharusan Pemda dalam menyusun rencana pengurangan sampah pada sumber sampah dan dalam menangani sampah harus ada proses pemilahan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA,
- Pemberian insentif dan disinsentif kepada lembaga yang telah melakukan inovasi terbaik dalam pengolahan sampah,
- Keharusan Pemda memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh penanganan sampah di TPA

berupa: relokasi, pemulihan lingkungan, biaya kesehatan dan pengobatan, ganti rugi.

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Kebersihan di Kota Cirebon masih memiliki kekurangan jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengamanatkan perlunya perubahan paradigma yang mendasar dalam pengelolaan sampah yaitu dari paradigma pengumpulan-pengangkutan-pembuangan menjadi pengolahan yang bertumpu pada pengurangan sampah dan penanganan sampah (Kementerian Lingkungan Hidup, 2014). Sistem *open dumping* dan ataupun *controlled landfill* menjadi kurang efektif dalam pengelolaan dan pemrosesan akhir sampah. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Cirebon telah merencanakan sistem integrasi 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) seperti yang tertulis dalam RTRW Kota Cirebon Tahun 2011-2031. Namun pada faktanya sistem integrasi 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) ini belum dapat berjalan sesuai dengan RTRW Kota Cirebon Tahun 2011-2031.

Upaya pembangunan berkelanjutan berdasarkan pelaksanaan yang dilakukan di beberapa daerah adalah munculnya tren pengelolaan sampah berbasis masyarakat seperti bank sampah. Hal ini didasarkan pada sistem integrasi 3R. Sampah yang sudah dimanfaatkan menjadi barang bernilai ekonomi hanya sekitar lima hingga sepuluh persen (Redaksi National Geographic, 2014). Adapun permasalahan yang terjadi di Kecamatan Harjamukti sebagai kecamatan yang terluas dan menghasilkan produksi sampah tertinggi di Kota Cirebon belum dapat mengurangi sampah secara signifikan bahkan cenderung meningkat setiap tahun. Hal ini juga dikarenakan Kecamatan Harjamukti merupakan kawasan perumahan. Pernyataan Sumanto sebagai Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cirebon bahwa “...*Wong pengembang perumahan disana, masyarakat pasti bertambah, volume sampah juga bertambah. 1 keluarga pindah kesana, sampahnya kan bisa 3*” (wawancara mendalam dengan Sumanto, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cirebon, 21 Mei 2014, Pukul 15.00).

Berdasarkan pengamatan peneliti Kota Cirebon hingga saat ini mulai ada peningkatan pertumbuhan ekonomi karena dibangunnya pusat perbelanjaan di

beberapa titik di Kota Cirebon. Selain itu, Kota Cirebon juga terdapat peningkatan hunian hotel berbintang dari tahun 2006-2009 (BPS Kota Cirebon, 2013). Hal ini juga berdampak pada peningkatan volume sampah per hari di Kota Cirebon. TPA Kopiluhur yang terletak di Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti sebagai Tempat Pengelolaan dan Pemrosesan Akhir Sampah juga turut menjadi masalah karena keterbatasan lahan dan pengelolaan yang melebihi kapasitas yang telah ditentukan yaitu 645 m³. Selain itu pihak ketiga yang mengelola sampah organik menjadi kompos sudah tidak ada lagi selama 4 tahun terakhir. Oleh karena itu, peneliti ingin berfokus pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Kebersihan di Kota Cirebon sebagai peraturan daerah mengenai pengelolaan sampah. Berdasarkan hal tersebut, maka pokok permasalahan skripsi ini adalah **Bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan sampah dalam upaya pembangunan berkelanjutan di Kota Cirebon (Studi Kasus Kecamatan Harjamukti)?**

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pengelolaan sampah dalam upaya pembangunan berkelanjutan di Kota Cirebon (Studi Kasus Kecamatan Harjamukti).

1.4 Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademis maupun secara praktis.

1) Signifikansi Akademis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan untuk melengkapi dan menambahkan studi-studi ilmu administrasi seperti administrasi perkotaan, administrasi lingkungan dan pembangunan regional. Hasil Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran pengelolaan sampah di Kota Cirebon yang memperhatikan pembangunan berkelanjutan.

2) Signifikansi Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan saran dan kritikan mengenai pengelolaan sampah di Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon dengan

memperhatikan aspek pembangunan berkelanjutan. Dari aspek sosial, penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan kepedulian warga untuk turut serta dalam pengelolaan sampah di Kota Cirebon. Dalam hal ini warga Kota Cirebon secara umum maupun secara khusus warga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan memberikan masukan kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cirebon serta SKPD terkait.

1.5 Sistematika Penelitian

Dalam penelitian ini, sistematika penelitian yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian serta Sistematika Penelitian.

BAB 2 KERANGKA PEMIKIRAN

Bab ini membahas berbagai Tinjauan Pustaka yang diperoleh dari berbagai karya ilmiah atau jurnal sebelumnya sehingga dapat dijadikan gambaran untuk melakukan penelitian. Berbagai teori mengenai implementasi kebijakan, manajemen sampah, dan pembangunan berkelanjutan diambil sebagai acuan dalam penelitian. Pada bagian ini terdapat juga alur pikir penelitian sebagai kerangka pikir peneliti dalam menganalisis masalah dan temuan di lapangan.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai Metode Penelitian yaitu pendekatan penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, strategi analisis data, narasumber/informan, lokasi penelitian, proses penelitian dan batasan penelitian.

BAB 4 GAMBARAN UMUM

Bab ini membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian di Kota Cirebon, Kecamatan Harjamukti, gambaran umum pengelolaan sampah, serta regulasi yang digunakan dalam pengelolaan sampah di Kota Cirebon.

BAB 5 ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG

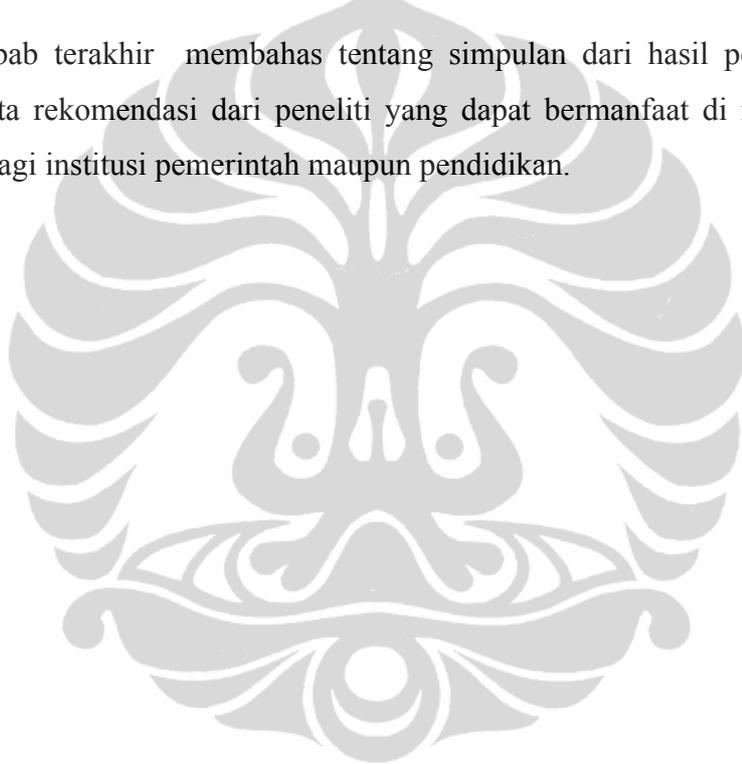
Universitas Indonesia

**PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN DI KOTA CIREBON
DALAM UPAYA PEMBANGUNANBERKELANJUTAN DI KOTA
CIREBON (STUDI KASUS KECAMATAN HARJAMUKTI)**

Bab ini mendeskripsikan implementasi kebijakan pengelolaan sampah dalam upaya pembangunan berkelanjutan di Kota Cirebon (Studi Kasus Kecamatan Harjamukti) yang dilihat dari perspektif ekonomi, sosial dan lingkungan.

BAB 6 SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pada bab terakhir membahas tentang simpulan dari hasil pembahasan penelitian serta rekomendasi dari peneliti yang dapat bermanfaat di masa yang akan datang bagi institusi pemerintah maupun pendidikan.



BAB 2

KERANGKA PEMIKIRAN

Bab ini menjelaskan mengenai literatur ilmiah yang dijadikan tinjauan pustaka oleh peneliti. Selain itu, dalam bab ini juga diuraikan mengenai kerangka teori yang terkait dengan “*Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Dalam Upaya Pembangunan Berkelanjutan di Kota Cirebon (Studi Kasus Kecamatan Harjamukti)*”.

2.1 Tinjauan Pustaka

Peneliti melakukan peninjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang terkait tema peneliti agar mendapatkan referensi yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan yaitu mengenai “*Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Dalam Upaya Pembangunan Berkelanjutan di Kota Cirebon (Studi Kasus Kecamatan Harjamukti)*”. Peneliti mengambil empat penelitian lain terkait mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah dan pembangunan berkelanjutan sebagai rujukan untuk ditinjau. Tinjauan pustaka ini bertujuan untuk memberikan suatu perspektif yang berguna dalam penelitian yang dilakukan.

Tinjauan pustaka yang pertama adalah penelitian yang berjudul *Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1988 Mengenai Pengelolaan Sampah Padat di DKI Jakarta*. Penelitian ini dilakukan oleh Randy Rachmawati pada tahun 2006. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian berdasarkan tujuan adalah deskriptif, berdasarkan manfaat penelitian adalah penelitian murni, berdasarkan dimensi waktu adalah *cross sectional*. Persamaan penelitian Randy Rachmawati dengan penelitian peneliti adalah membahas mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Namun demikian, perbedaannya adalah pada penelitian yang dilakukan Randy Rachmawati berfokus mengenai pelaksanaan di provinsi yang ruang lingkungannya lebih luas dibanding dengan penelitian yang dilakukan peneliti dan pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah *post positivist*. Selain itu, penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada pembangunan berkelanjutan.

Penelitian Randy Rachmawati membahas pelaksanaan pengelolaan sampah di DKI Jakarta dilihat dari aspek organisasi dan manajemen, aspek teknik operasional, aspek keuangan/pendanaan, aspek hukum/peraturan, aspek peran serta masyarakat dan sektor swasta. Hasil penelitian Randy Racmawati menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di DKI Jakarta belum dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang berlaku dan belum memberikan hasil optimal karena jumlah volume sampah mengalami kenaikan setiap tahunnya, masih lemahnya aparatur yang menangani pengelolaan persampahan menimbulkan minimnya kinerja pengelolaan sampah di DKI Jakarta. Hal ini dikarenakan berkurangnya tenaga operasional yang usia lanjut dan banyak yang pensiun, sedangkan penambahan untuk tenaga operasional tersebut belum dapat dilaksanakan.

Penelitian kedua adalah penelitian yang berjudul Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini dilakukan oleh Erna Budiarti pada tahun 2012. Metode penelitian Erna Budiarti adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian berdasarkan tujuan adalah deskriptif, berdasarkan manfaat penelitian adalah penelitian murni, berdasarkan dimensi waktu adalah penelitian *cross sectional* karena dilakukan pada waktu tertentu serta tidak bersifat membandingkan. Persamaan penelitian yang dilakukan Erna Budiarti dengan peneliti adalah mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Sementara itu, perbedaannya adalah pada pendekatan penelitian dimana penelitian Erna Budiarti pendekatan kualitatif, sedangkan pendekatan peneliti adalah *post positivist*. Perbedaan selanjutnya adalah pada fokus penelitian dimana penelitian Erna Budiarti fokus di Kota Tangerang Selatan yang dikaitkan dengan pemekaran daerah dari Kabupaten Tangerang. Penelitian yang dilakukan peneliti yaitu berkaitan dengan upaya pembangunan berkelanjutan pengelolaan sampah di Kota Cirebon (Kecamatan Harjamukti).

Penelitian Erna Budiarti membahas implementasi kebijakan pengelolaan sampah Kota Tangerang Selatan dari faktor internal dan eksternal, hambatan implementasi kebijakan pengelolaan sampah serta solusi dari masalah pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan. Awal persoalan sampah yang timbul di Kota

Tangerang Selatan dimulai dari adanya sikap Pemerintah Kabupaten Tangerang yang secara mendadak dan sepihak memutuskan kerjasama pengolahan sampah pada Desember 2009 di saat pemerintahan definitif Tangerang Selatan belum terbentuk. Hal ini menyebabkan permasalahan sampah yang menumpuk di 25 Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang sebagian besar TPS liar. Volume sampah yang dihasilkan wilayah ini sekitar 3200-1500 m³ yang dihasilkan dari 1,3 juta jiwa di 7 kecamatan. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Tangerang Selatan melakukan beberapa langkah penanganan diantaranya dengan kegiatan pengelolaan sampah, penambahan armada truk pengangkut sampah, pembangunan TPA di Cipeucang, dan buatnya peraturan daerah sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah.

Penelitian ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Susi Susanti yang berjudul Implementasi “Kebijakan Pariwisata Internasional” di Provinsi Bengkulu Ditinjau dari Pembangunan Berkelanjutan. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2009. Metode penelitian Susi Susanti adalah dengan pendekatan *positivist*, jenis penelitian berdasarkan tujuan adalah deskriptif, berdasarkan manfaat penelitian adalah penelitian murni karena memiliki orientasi akademis, berdasarkan dimensi waktu adalah penelitian *cross sectional* karena dilakukan dalam waktu tertentu dan tidak bersifat membandingkan pada waktu yang berbeda. Persamaan penelitian yang dilakukan Susi Susanti dengan peneliti adalah mengenai implementasi kebijakan dan pembangunan berkelanjutan. Sedangkan perbedaannya adalah pada pendekatan penelitian Susi Susanti menggunakan pendekatan *positivist*, pendekatan penelitian peneliti adalah *post potivist*. Penelitian Susi Susanti membahas pembangunan berkelanjutan yang dilihat dari aspek lingkungan alam, aspek ekonomi secara makro, aspek sosial budaya masyarakat dari pelaksanaan “Kebijakan Pariwisata Internasional” serta dukungan dan hambatan secara internal maupun eksternal.

Hasil penelitian Susi Susanti yaitu Implementasi “Kebijakan Pariwisata Internasional” belum berjalan sesuai dengan pembangunan berkelanjutan dikarenakan belum mampu menjamin dan mewujudkan terciptanya keberlanjutan aspek ekonomi, aspek sosial budaya masyarakat lokal dan aspek lingkungan

sebagai 3 substansi utama yang membentuk konsep pembangunan berkelanjutan. Sementara itu, hambatan dan dukungan secara internal berasal dari pihak pelaksana “Kebijakan Pariwisata Internasional”. Hambatan dan dukungan secara eksternal berasal dari pihak swasta, masyarakat dan keadaan Provinsi Bengkulu.

Penelitian keempat yaitu Disertasi dengan judul Pengelolaan Taman Nasional Dalam Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus: Kawasan Taman Nasional Way Kambas, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung). Penelitian ini dilakukan oleh Aca Sugandhy pada tahun 2006. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, jenis penelitian berdasarkan tujuan adalah eksplanatif, berdasarkan manfaat penelitian adalah penelitian murni, berdasarkan dimensi waktu adalah *cross sectional*. Persamaan penelitian Aca Sugandhy dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah mengenai pembangunan berkelanjutan. Perbedaannya adalah pada fokus penelitian dengan pendekatan yang dilakukan, Peneliti membahas tentang pengelolaan sampah dan menggunakan pendekatan *post positivist*, sementara penelitian Aca Sugandhy membahas tentang pengelolaan taman nasional dan menggunakan pendekatan kuantitatif.

Penelitian Aca Sugandhy membahas tentang kondisi pengelolaan taman nasional way kambas dan faktor yang mempengaruhi; kondisi faktor internal taman nasional way kambas yang dilihat dari kondisi fisik dan ekosistem, kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitar kawasan; hasil pembuktian hipotesis; hasil simulasi model dengan peningkatan peran serta masyarakat dan kebijakan pembangunan; model holistik pengelolaan taman nasional dalam pembangunan berkelanjutan; pembahasan pengelolaan taman nasional dalam pembangunan berkelanjutan. Hasil penelitian Aca Sugandhy yaitu peran masyarakat dan kebijakan para pemangku kepentingan telah memperlihatkan bahwa hipotesis yang diajukan telah terbukti dengan benar dengan standar deviasi H_0 seperti berikut bagi peran masyarakat: $90\% \leq sd \leq 95\%$ dan pemangku kebijakan $86\% \leq sd \leq 95\%$. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi fisik dan ekologi serta nilai sosial dan ekonomi dari Taman Nasional belum banyak diketahui oleh masyarakat dan para pemangku kepentingan. Kondisi tidak diketahuinya fungsi fisik dan

ekologis bagi maksud pelestarian dan pemanfaatan sosial dan ekonomi dari taman nasional memberikan dampak (tingkat pengaruh) faktor eksternal terhadap faktor internal bagi keberlanjutan pengelolaan taman nasional. Hasil analisis telah memberikan nilai konstanta pengaruh dari enam faktor kebijakan terhadap lima faktor internal kawasan yang dapat digunakan untuk simulasi model keberlanjutan pengelolaan taman nasional.

Sementara itu, hasil simulasi *business as usual* memperlihatkan kecenderungan bila tidak ada perubahan dalam bentuk pengelolaan taman nasional maka keberadaannya hanya bisa bertahan sampai dengan tahun 2010. Hasil simulasi model holistik dengan intervensi peningkatan manajemen, peran serta masyarakat yang memadai, serta kebijakan yang berkelanjutan terhadap faktor-faktor internal dan eksternal telah memperlihatkan bahwa keberlanjutan taman nasional bisa terus terjaga melewati tahun 2100. Hal tersebut akan dapat disimpulkan bahwa penelitian Aca Sugandhy memberikan keterpaduan pembangunan bagi tercapainya pembangunan berkelanjutan dapat diselenggarakan dengan pendekatan keterpaduan kawasan secara holistik yang meliputi fungsi-fungsi *eco-region*, *bio-region*, *socio-economic region*, dan *development region*.

Penelitian kelima adalah penelitian yang dilakukan peneliti dengan judul Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Dalam Upaya Pembangunan Berkelanjutan di Kota Cirebon (Studi Kasus Kecamatan Harjamukti). Metode penelitian peneliti adalah dengan menggunakan pendekatan *post positiv*, jenis penelitian berdasarkan tujuan adalah deskriptif, berdasarkan manfaat penelitian adalah penelitian murni, berdasarkan dimensi waktu adalah penelitian *cross sectional* karena dilakukan pada waktu tertentu serta tidak bersifat membandingkan. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang berfokus pada pengelolaan sampah dengan dua penelitian sebelumnya adalah melihat pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan sampah. Hal ini menjadi keunggulan peneliti karena melihat pengelolaan sampah secara perspektif ekonomi, sosial dan lingkungan.



Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Mengenai Pengelolaan Sampah dan Pembangunan Berkelanjutan

	Peneliti Pertama	Peneliti Kedua	Peneliti Ketiga	Peneliti Keempat	Peneliti Kelima
1. Nama	Randy Rachmawati	Erna Budiarti	Susi Susanti	Aca Sugandhy	Siti Hardiyanti
2. Judul	Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1988 Mengenai Pengelolaan Sampah Padat di DKI Jakarta	Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Tangerang Selatan	Implementasi “Kebijakan Pariwisata Internasional” di Provinsi Bengkulu Ditinjau dari Pembangunan Berkelanjutan	Pengelolaan Taman Nasional Dalam Pembangunan Berkelanjutan	Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Dalam Upaya Pembangunan Berkelanjutan di Kota Cirebon (Studi Kasus Kecamatan Harjamukti)
3. Tujuan	1. Mengetahui implementasi kebijakan peraturan daerah no.5 tahun 1988 mengenai pengelolaan sampah padat di DKI Jakarta	1. Menjelaskan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan pasca pemekaran daerah dari Kabupaten Tangerang	1. Mengetahui bagaimana pementasan “Kebijakan Pariwisata Internasional” di Provinsi Bengkulu bila ditinjau dari pembangunan berkelanjutan 2. Mengetahui berbagai bentuk dukungan dan hambatan yang dihadapi pihak pemerintah Provinsi Bengkulu untuk dapat mengimplementasi	1. Mengenali permasalahan pengelolaan kawasan lingkungan kawasan konservasi taman nasional atas dasar falsafah teori pengelolaan lingkungan secara interaksi dengan teori peran serta masyarakat dan teori kebijakan pembangunan berkelanjutan 2. Memperoleh	1. Mendeskripsikan implementasi kebijakan pengelolaan sampah dalam upaya pembangunan berkelanjutan

	Peneliti Pertama	Peneliti Kedua	Peneliti Ketiga	Peneliti Keempat	Peneliti Kelima
			<p>kan “Kebijakan Pariwisata Internasional” agar bisa berjalan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan</p>	<p>faktor internal dan eksternal dan nilai peubah (konstanta) yang mempengaruhi kondisi pengelolaan dan daya dukung taman nasional</p> <p>3. Menemukan suatu model holistik pengelolaan taman nasional dalam pembangunan berkelanjutan sebagai teori baru atas dasar analisis sistem dinamis</p> <p>4. Menghasilkan rekomendasi untuk mengoreksi pengelolaan taman nasional dalam pembangunan daerah dan nasional</p>	

	Peneliti Pertama	Peneliti Kedua	Peneliti Ketiga	Peneliti Keempat	Peneliti Kelima
2. Pendekatan Penelitian	Kualitatif	Kualitatif	Positivist	Kuantitatif	Post Positivist
3. Jenis Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan Tujuan: Penelitian Deskriptif Berdasarkan Manfaat Penelitian: Penelitian Murni Berdasarkan Dimensi Waktu: <i>Cross Sectional</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan Tujuan: Penelitian Deskriptif Berdasarkan Manfaat Penelitian: Penelitian Murni Berdasarkan Dimensi Waktu: Penelitian <i>Cross Sectional</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan Tujuan Penelitian: Penelitian Deskriptif Berdasarkan Manfaat Penelitian: Penelitian Murni Berdasarkan Dimensi Waktu: <i>Cross Sectional</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan Tujuan: Penelitian Eksplanatif Berdasarkan Manfaat Penelitian: Penelitian Murni Berdasarkan Dimensi Waktu: Penelitian <i>Cross Sectional</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan Tujuan Penelitian: Penelitian Deskriptif Berdasarkan Manfaat Penelitian: Penelitian Murni Berdasarkan Dimensi Waktu: <i>Cross Sectional</i>
4. Teknik Pengumpulan Data	<ol style="list-style-type: none"> Studi kepustakaan Studi lapangan 	<ol style="list-style-type: none"> Studi lapangan Studi literatur 	<ol style="list-style-type: none"> <i>Field research</i> Studi kepustakaan 	<ol style="list-style-type: none"> Studi literatur Survei 	<ol style="list-style-type: none"> <i>Field research</i> Studi literatur
5. Persamaan	Pembahasan implementasi kebijakan pengelolaan sampah	Pembahasan implementasi kebijakan pengelolaan sampah	Pembahasan tentang implementasi kebijakan dan pembangunan berkelanjutan	Pembahasan mengenai pembangunan berkelanjutan	Pembahasan mengenai pengelolaan sampah dengan penelitian kesatu dan kedua
6. Perbedaan	<ul style="list-style-type: none"> Fokus pelaksanaan di Provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> Pada pendekatan yang digunakan Fokus penelitian dikaitkan dengan pemekaran daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Pada pendekatan yang digunakan Pembangunan berkelanjutan dilihat dari aspek 	<ul style="list-style-type: none"> Pada pendekatan yang digunakan Fokus penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan sampah yang dikaitkan dengan pembangunan berkelanjutan

	Peneliti Pertama	Peneliti Kedua	Peneliti Ketiga	Peneliti Keempat	Peneliti Kelima
			lingkungan alam, ekonomi secara makro dan sosial budaya masyarakat		<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan berkelanjutan dilihat dari aspek ekonomi, sosial dan lingkungan
7. Hasil Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di DKI Jakarta belum dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang berlaku dan belum memberikan hasil optimal karena jumlah volume sampah mengalami kenaikan setiap tahunnya, masih lemahnya aparatur yang menangani pengelolaan persampahan menimbulkan minimnya kinerja pengelolaan sampah di DKI Jakarta. Hal ini 	<ul style="list-style-type: none"> • Implementasi kebijakan pengelolaan sampah Kota Tangerang Selatan dari faktor internal dan eksternal, hambatan implementasi kebijakan pengelolaan sampah serta solusi dari masalah pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan. • Masalah Pengelolaan Sampah: Pemerintah Kabupaten Tangerang yang secara mendadak dan sepihak memutuskan 	<ul style="list-style-type: none"> • Implementasi “Kebijakan Pariwisata Internasional” belum berjalan sesuai dengan pembangunan berkelanjutan dikarenakan belum mampu menjamin dan mewujudkan terciptanya keberlanjutan aspek ekonomi, aspek sosial budaya masyarakat lokal dan aspek lingkungan sebagai 3 substansi utama yang membentuk konsep pembangunan berkelanjutan. • Hambatan dan dukungan secara internal berasal dari 	<ul style="list-style-type: none"> • Fungsi fisik dan ekologi serta nilai sosial dan ekonomi dari Taman Nasional belum banyak diketahui oleh masyarakat dan para pemangku kepentingan • Kondisi tidak diketahuinya fungsi fisik dan ekologis bagi maksud pelestarian dan pemanfaatan sosial dan ekonomi dari taman nasional memberikan dampak (tingkat pengaruh) faktor eksternal terhadap faktor 	<ul style="list-style-type: none"> • Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Kebersihan di Kota Cirebon Dalam Upaya Pembangunan Berkelanjutan di Kota Cirebon dilihat dari karakteristik masalah, karakteristik kebijakan dan lingkungan kebijakan. • Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pengelolaan Sampah di Kota Cirebon (Studi

	Peneliti Pertama	Peneliti Kedua	Peneliti Ketiga	Peneliti Keempat	Peneliti Kelima
	<p>dikarenakan berkurangnya tenaga operasional yang usia lanjut dan banyak yang pensiun, sedangkan penambahan untuk tenaga operasional tersebut belum dapat dilaksanakan.</p>	<p>kerjasama pengolahan sampah pada Desember 2009 di saat pemerintahan definitif Tangerang Selatan belum terbentuk; Sampah menumpuk di 25 TPS.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Solusi: diadakan kegiatan pengelolaan sampah, penambahan armada truk pengangkut sampah, pembangunan TPA di Cipeucang, dan dibuatnya peraturan daerah sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah. 	<p>pihak pelaksana “Kebijakan Pariwisata Internasional”.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hambatan dan dukungan secara eksternal berasal dari pihak swasta, masyarakat dan keadaan Provinsi Bengkulu. 	<p>internal bagi keberlanjutan pengelolaan taman nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hasil simulasi model holistik dengan intervensi peningkatan manajemen, peran serta masyarakat yang memadai, serta kebijakan yang berkelanjutan terhadap faktor-faktor internal dan eksternal telah memperlihatkan bahwa keberlanjutan taman nasional bisa terus terjaga melewati tahun 2100. 	<p>Kasus Kecamatan Harjamukti) dilihat dari perspektif ekonomi, sosial dan lingkungan. Ketiga perspektif tersebut masih terdapat kekurangan karena hanya sebagian kecil masyarakat yang telah mengelola sampah dengan konsep 3R (<i>reduce, reuse, recycle</i>).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hambatan yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya SDM pelaksana kebijakan, kurangnya lahan, kurangnya peran swasta, terbatasnya anggaran, kebijakan.

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2014

2.2 Kebijakan Publik

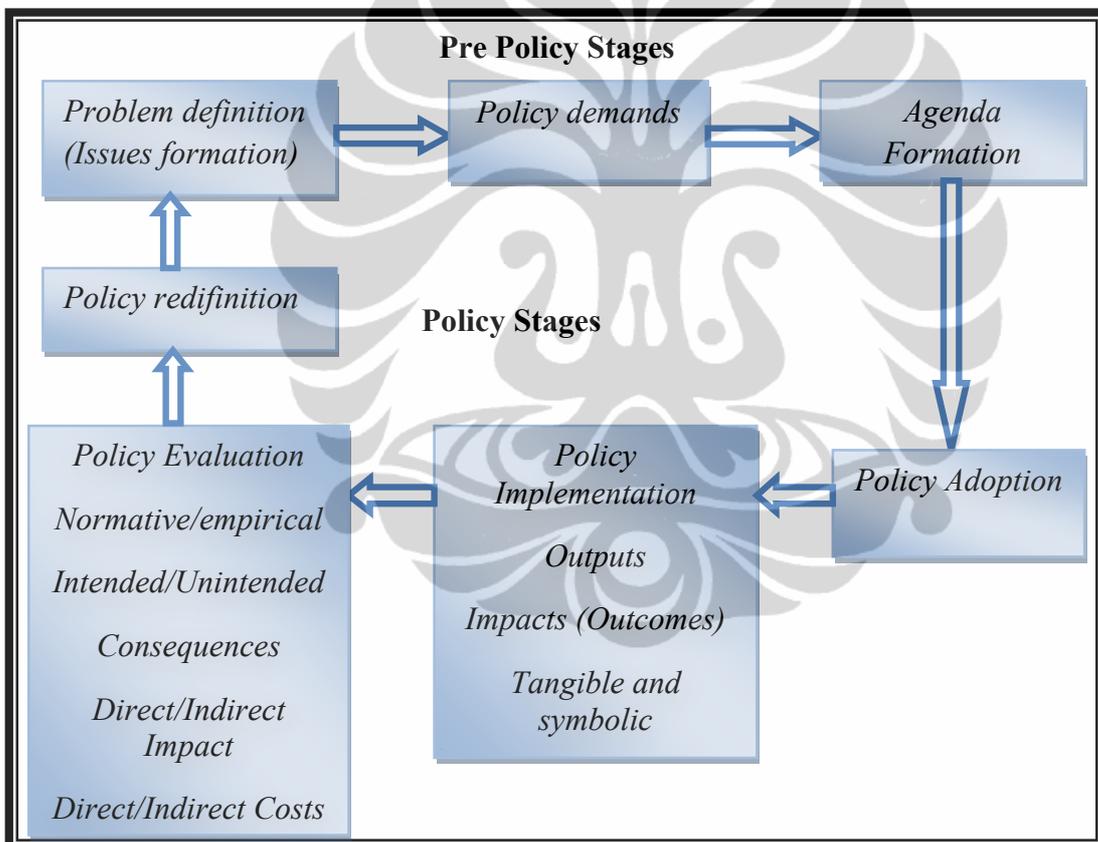
Dye mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah *what governments do, why they do it, and what difference it makes* (Dye dalam Maddison dan Dennis, 2009: 3). Kemudian definisi tersebut berkembang seperti apa yang dikemukakan oleh Anderson. Anderson (2006: 6) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah sekumpulan aktor dalam menangani suatu masalah tertentu, lebih lanjut definisi kebijakan publik menurut Anderson adalah “*a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*”. Aktor yang dimaksud dalam dua definisi ini adalah merujuk pada pemerintah. Hal ini juga didukung pendapat dari Eyestone, 1971 (dalam Winarno, 2012: 20) yang mengemukakan bahwa secara luas kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai “hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya”.

Sementara itu, Muller (1990) mengemukakan bahwa *public policies emerge as a response to a public problem that reflects a social state (in transformation), which has been articulated by mediators (for example, the media, new social movements, political parties and/or interest group) and then debated within the democratic decision making process* (dalam Knoepfel et al, 2007: 22). Definisi tersebut memiliki maksud bahwa kebijakan publik muncul sebagai respon terhadap masalah publik yang mencerminkan keadaan sosial yang telah diartikulasikan oleh mediator (media, politik dan/atau kelompok-kelompok kepentingan), yang kemudian diperdebatkan dalam suatu proses pengambilan keputusan yang demokratis.

Kebijakan publik dapat dipandang dari bagaimana kebijakan tersebut dibuat, yaitu (1) sebagai hasil dari *authoritative choice*: pemerintah membuat kebijakan melalui proses hierarkis vertikal dimana kementerian menentukan *outcome* akhir; dan (2) sebagai hasil dari *structured interaction*: dihasilkan dari hubungan horisontal yang kompleks dan hasil akhirnya merupakan produk kompromi serta akomodasi dari kepentingan yang bersaing. Cochran, et al., (2010: 2) mengemukakan bahwa kebijakan itu sendiri bukan merupakan suatu

tindakan tunggal, melainkan satu set tindakan yang dikoordinasikan untuk mencapai tujuan dari kebijakan tersebut.

Cochran, et al (2010: 9) mengemukakan bahwa terdapat beberapa tahapan dalam proses pembuatan kebijakan, yang dikategorikan ke dalam dua jenis tingkatan yaitu *pre-policy stages* dan *policy stages*. *Pre policy stages* ini mencakup (1) *problem definition* atau *issues formation*; (2) *policy demands*; dan (3) *agenda formation*. Sementara itu, *policy stages* mencakup (1) *policy adoption*; (2) *policy implementation*; (3) *policy evaluation*; (4) *policy redefinition* (Cochran, et al, 2010: 9). Gambar 2.1 menjelaskan tahapan dalam proses kebijakan.



Gambar 2.1 Tahapan dalam Proses Kebijakan

Sumber: Cochran, et al., 2010: 9

Kebijakan publik dimulai dengan adanya keyakinan publik akan adanya permasalahan yang muncul. Perspektif etis dan ideologi memainkan peranan penting selama tahapan definisi masalah karena perspektif yang berbeda akan

melihat dan mendefinisikan masalah secara berbeda pula. Selanjutnya, tahapan tuntutan masalah dimana adanya pertentangan tuntutan dalam masyarakat yang membutuhkan tindak lanjut pemerintah. Secara berangsur-angsur kondisi sosial *give-and-take* ini menjadi sebuah persepsi yang memunculkan persaingan antara satu permasalahan dengan permasalahan lainnya guna mendapatkan perhatian dari pembuat kebijakan. Beberapa dari permasalahan tersebut gagal mendapat perhatian, dan beberapa lainnya berhasil dimasukkan ke dalam agenda kebijakan.

Agenda-setting merupakan proses politik dimana kelompok-kelompok memperebutkan kekuasaan untuk mengendalikan agenda. Kelompok-kelompok tersebut berupaya untuk memperluas agenda untuk memasukan isu yang menjadi perhatiannya atau berupaya mempersempit agenda dengan tidak memasukan isu yang tidak menjadi perhatiannya. Kelompok-kelompok tersebut bisa saja merupakan pejabat terpilih, birokrat yang bertanggung jawab akan administrasi kebijakan, kelompok kepentingan, atau kelompok yang dipengaruhi secara langsung oleh kebijakan tertentu. Sektor bisnis juga mempengaruhi proses *agenda-setting* tersebut.

Tahapan selanjutnya adalah adopsi kebijakan. Pembuat kebijakan dengan masukan dari kelompok kepentingan, ahli kebijakan, dan konstituen, melakukan perdebatan dan penawaran atas alternatif formulasi kebijakan, menetapkan alternatif, atau mengombinasikan berbagai alternatif untuk merespon permasalahan yang ada. Selanjutnya, keputusan ditetapkan, kebijakan diformulasikan, dan pernyataan kebijakan dikeluarkan melalui perintah, regulasi, atau hukum. Kebijakan pada tahapan selanjutnya harus diimplementasikan. Implementasi kebijakan berarti penggunaan uang, pemaksaan hukum, perekrutan pegawai, dan rencana tindakan diformulasikan. Pada implementasi, tujuan dari pembuat kebijakan seringkali dikesampingkan bahkan ditiadakan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Hill dan Hupe (2002: 7) "*the content of that policy, and its impact on those affected, may be substantially modified, elaborated or even negated during the implementation stage*"

Implementasi kebijakan menghasilkan dampak. Evaluasi kebijakan pada prinsipnya fokus pada dampak dari suatu kebijakan karena penilaian sukses atau

gagalnya suatu kebijakan dapat dilihat dari kinerja dan konsekuensi dari kebijakan tersebut. Evaluasi mencoba menilai *outcome* tersebut dengan tujuan dari kebijakan. Suatu kebijakan baru dapat dievaluasi setelah manfaat dan biaya diketahui. Evaluasi ini membawa kembali pada formasi isu dan pertimbangan kebijakan dalam *endless loop*. Evaluasi kebijakan tidak bisa diabaikan guna menghasilkan advokasi untuk menegakan kebijakan.

2.2.1 Implementasi Kebijakan Publik

Tahapan proses kebijakan publik menurut Cochran et al., maka suatu implementasi kebijakan publik terdapat di tingkatan *policy stages* setelah proses *policy adoption*. Mazmanian dan Paul Sabatier (dalam Nawawi, 2009: 131) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan Badan Penelitian.

Keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (*implementors*), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

Keterlibatan berbagai aktor dalam implementasi, Randall B. Ripley dan Grace A. Franklin, 1986 (dalam Winarno, 2012) menyatakan bahwa:

Implementation process involve many important actors holding diffuse and competing goals and expectations who work within a contexts of an increasingly large and complex mix of government programs that require participation from numerous layers and units of government and who are affected by powerful factors beyond their control.

Maksud definisi di atas yaitu kompleksitas implementasi bukan saja ditunjukkan oleh banyaknya aktor atau unit organisasi yang terlibat, tetapi juga dikarenakan proses implementasi dipengaruhi oleh berbagai variabel yang kompleks, baik variabel yang individual maupun variabel organisasional, dan masing-masing variabel pengaruh tersebut juga saling berinteraksi satu sama lain. Hal ini menyebabkan bahwa proses implementasi kebijakan dipengaruhi oleh berbagai faktor.

2.2.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.

Menurut Mazmanian dan Sabatier, 1983 (dalam Subarsono, 2010), ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni: (1) karakteristik dari masalah (*tractability of the problem*); (2) karakteristik kebijakan/undang-undang (*ability of statute to structure implementation*); (3) variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*).

Adapun (1) karakteristik masalah (*tractability of the problem*) dapat dilihat sebagai berikut:

1. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan. Di satu pihak ada beberapa masalah sosial secara teknis mudah dipecahkan, namun di lain pihak terdapat masalah-masalah sosial yang relatif sulit dipecahkan.
2. Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran. Ini berarti bahwa suatu program akan relatif mudah diimplementasikan apabila kelompok sasarannya adalah homogen. Sebaliknya, apabila kelompok sasarannya heterogen, maka implementasi program akan relatif lebih sulit, karena tingkat pemahaman setiap anggota kelompok sasaran terhadap program relatif berbeda.
3. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi. Sebuah program akan relatif lebih sulit diimplementasikan apabila sasarannya mencakup semua populasi. Sebaliknya sebuah program relatif lebih mudah diimplementasikan apabila jumlah kelompok sasarannya tidak terlalu besar.

4. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan. Sebuah program yang bertujuan memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif akan relatif mudah diimplementasikan daripada program yang bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat.

Sementara faktor kedua yang berhubungan menurut Mazmanian dan Sabatier adalah (2) Karakteristik kebijakan (*ability of statute to structure implementation*) mencakup hal-hal berikut:

1. Kejelasan isi kebijakan. Ini berarti semakin jelas dan rinci isi sebuah kebijakan akan mudah diimplementasikan karena implementor mudah memahami dan menterjemahkan dalam tindakan nyata. Sebaliknya, ketidakjelasan isi kebijakan merupakan potensi lahirnya distorsi dalam implementasi kebijakan.
2. Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis. Kebijakan yang memiliki dasar teoritis memiliki sifat lebih mantap karena sudah teruji, walaupun untuk beberapa lingkungan sosial tertentu perlu ada modifikasi.
3. Besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan tersebut. Sumberdaya keuangan adalah faktor krusial untuk setiap program sosial. Setiap program juga memerlukan dukungan staf untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan administrasi dan teknis, serta memonitor program yang semuanya perlu biaya.
4. Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana. Kegagalan program sering disebabkan kurangnya koordinasi vertikal dan horisontal antarinstansi yang terlibat dalam implementasi program.
5. Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana.
6. Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan.
7. Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan. Suatu program yang memberikan peluang luas bagi masyarakat untuk terlibat akan relatif mendapat dukungan daripada program yang tidak melibatkan masyarakat. masyarakat akan merasa terasing atau

teralienasi apabila hanya menjadi penonton terhadap program yang ada di wilayahnya.

Faktor ketiga dari Mazmanian dan Sabatier adalah (3) Lingkungan kebijakan (*nonstatutory variables affecting implementation*) terdiri atas hal-hal berikut ini:

1. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi. Masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik akan relatif mudah menerima program-program pembaruan dibanding dengan masyarakat yang masih tertutup dan tradisional. Demikian juga, kemajuan teknologi akan membantu dalam proses keberhasilan implementasi program, karena program-program tersebut dapat disosialisasikan dan diimplementasikan dengan bantuan teknologi modern.
2. Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan. Kebijakan yang memberikan insentif biasanya mudah mendapatkan dukungan publik.
3. Sikap dari kelompok pemilih (*constituency groups*). Kelompok pemilih yang ada dalam masyarakat dapat mempengaruhi implementasi kebijakan melalui berbagai cara antara lain: (1) kelompok pemilih dapat melakukan intervensi terhadap keputusan yang dibuat badan-badan pelaksana melalui berbagai komentar dengan maksud untuk mengubah keputusan; (2) kelompok pemilih dapat memiliki kemampuan untuk mempengaruhi badan-badan pelaksana, dan membuat pernyataan yang ditujukan kepada badan legislatif.
4. Tingkat komitmen dan ketrampilan dari aparat dan implementor. Pada akhirnya komitmen aparat pelaksana untuk merealisasikan tujuan yang telah tertuang dalam kebijakan adalah variabel yang paling krusial. Aparat badan pelaksana harus memiliki ketrampilan dalam membuat prioritas tujuan dan selanjutnya merealisasikan prioritas tujuan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, ketiga faktor teori Mazmanian dan Sabatier tersebut berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Peneliti menggunakan teori Mazmanian dan Sabatier untuk melihat fakta-fakta yang terjadi dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Cirebon (Studi Kasus Kecamatan Harjamukti).

2.3 Manajemen Sampah

2.3.1 Definisi Sampah

LaGrega et al, 2001 (dalam Malik dan Grohmann, 2012) mendefinisikan sampah sebagai objek bergerak yang tidak memiliki penggunaan langsung dan dibuang secara permanen. Meskipun penggunaan istilah sampah menunjukkan definisi yang mencakup limbah padat, namun limbah cair dan gas juga dianggap limbah berbahaya sehingga termasuk dalam pengelolaan sampah. Menurut United Nations Environment Programme, 2004 (dalam Chandrappa dan Bhusan, 2012) mengemukakan bahwa sampah secara konvensional didefinisikan sebagai bahan yang tidak diinginkan pada satu generasi tertentu dan tidak digunakan secara langsung. Masalah sampah muncul karena adanya penduduk di suatu tempat tertentu. Definisi sampah dari ahli tersebut menunjukkan bahwa sampah merupakan suatu objek atau barang yang tidak dapat digunakan. Meskipun demikian, dalam perkembangannya sampah dapat dilihat berdasarkan sumber sampah dan jenis sampah.

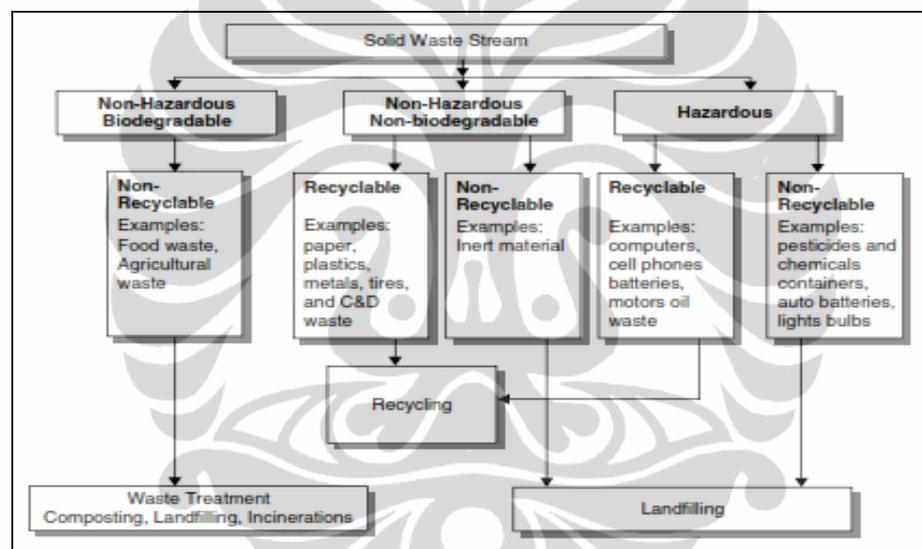
2.3.2 Tipe Sampah

Tipe sampah dapat dilihat dari sumber sampah dan jenis sampah. Sumber sampah dapat berasal dari daerah perkotaan maupun pedesaan. Sampah pedesaan sering berupa sampah organik atau *biodegradable* (kompos secara natural). Sementara itu, sampah perkotaan dikarenakan budaya dan aktivitas yang dilakukan masyarakat. Adapun sampah dapat berasal dari rumah tangga, komersial, taman, industri, pertanian dan pedesaan, air dan pengolahan limbah tanaman, konstruksi dan pembangunan, transportasi, pantai dan tempat rekreasi, tempat kumuh, pasar buah dan sayuran, rumah potong hewan. Perbedaan sampah di perkotaan dan pedesaan tersebut dilihat dari karakter wilayah dan penduduk di daerah kota atau desa.

Sektor manufaktur menghasilkan dari kegiatan manufaktur kantor dan kantin serta limbah industri dari kegiatan manufaktur beberapa diantaranya berbahaya. Toko-toko kecil yang tersebar di perkotaan atau pedesaan di sepanjang jalan raya menghasilkan sampah yang memerlukan pengelolaan yang berbeda.

Perusahaan seperti rumahsakit, klinik umum, klinik hewan, bank darah, laboratorium patologis, pusat diagnostik, pusat inseminasi buatan, pusat penelitian klinis menghasilkan sampah kimia yang menular atau terdapat bahan radioaktif. Kegiatan konstruksi dan pembongkaran juga menghasilkan sampah sisa makanan dan sampah kantor serta sampah akibat adanya konstruksi tersebut.

Adapun Malik dan Grohmann, 2012 membedakan sampah menjadi sampah berbahaya dan tidak berbahaya. Limbah yang tidak berbahaya yaitu yang berasal dari rumah tangga, komersial, pertanian, industri, konstruksi dan pembangunan. Namun demikian, ada beberapa yang bernilai ekonomi setelah didaur ulang. Adapun gambar jenis sampah dapat dilihat pada gambar 2.2.



Gambar 2.2 Jenis sampah

Sumber: Malik dan Grohmann, 2012

Gambar 2.2 di atas menunjukkan bahwa ada beberapa sampah yang dapat didaur ulang seperti jenis sampah yang tidak berbahaya dan tidak dapat menjadi kompos secara natural (*non biodegradable*); jenis sampah yang dapat didaur ulang yaitu sampah berbahaya seperti sampah elektronik.

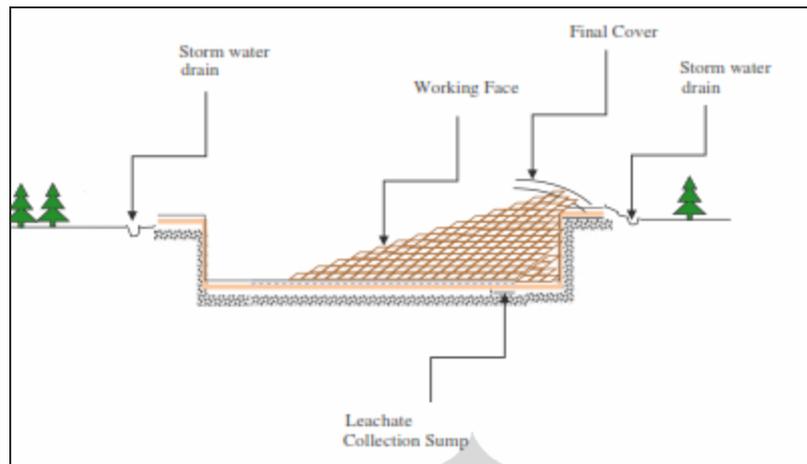
2.3.3 Pengolahan Sampah dan Pembuangan Akhir

Metode pembuangan utama sampah perkotaan adalah *open dumping* dan *sanitary landfill*. Tempat pembuangan yang tidak terkontrol itu biasanya

menimbulkan bau busuk dan menghasilkan banyak cairan lindi (*leachate*). Hal ini tentunya menyebabkan pencemaran lingkungan yang parah. Pengolahan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) bertujuan untuk meminimalkan atau menghilangkan sifat berbahaya, menstabilkan sampah, dan atau mengurangi volume sampah (Chandrappa dan Busan, 2012: 117).

2.3.3.1 Landfill

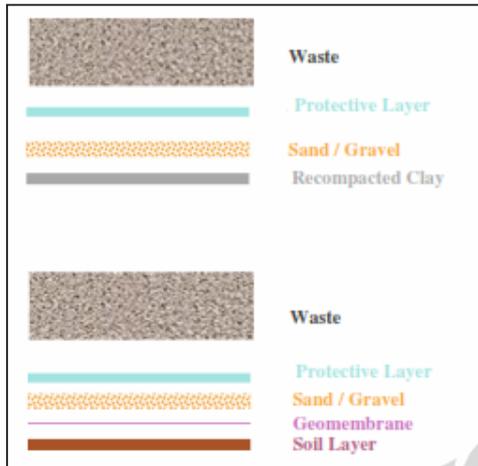
Chandrappa dan Busan, 2012: 117 mengemukakan bahwa *landfill* merupakan penyimpanan akhir sampah setelah semua pilihan pengelolaan sampah lainnya telah dilakukan. Penyimpanan akhir sampah disini adalah merujuk pada suatu penimbunan sampah di dalam tanah. *Landfill* dapat dikategorikan ke dalam pembuangan terbuka, pembuangan terkontrol atau *sanitary landfill* (rekayasa TPA). *Sanitary landfill* adalah sistem pembuangan pengelolaan sampah terpadu yang direkayasa sedemikian rupa dan ditutup dari material sampah dalam jangka waktu panjang. Namun demikian, Malik dan Rohmann (2012: 511) mengemukakan bahwa proses *landfill* dimulai dari sampah yang dikirim ke tempat pembuangan akhir, kemudian sampah tersebut menyebar, dipadatkan, dan ditutupi dengan lapisan tanah setiap hari. Penutupan di lapisan akhir dilakukan untuk mengisolasi sampah dari udara dan hama, serta sebagai metode untuk mengontrol bau. Penutupan lapisan akhir ini juga akan mendukung pertumbuhan vegetasi dan untuk mengendalikan produksi cairan lindi. Gambar 2.3 menunjukkan diagram skematik pemrosesan di TPA berdasarkan sistem *sanitary landfill*.



Gambar 2.3 Sanitary landfill

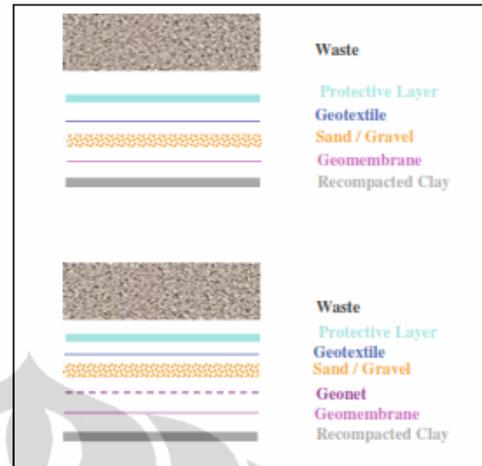
Sumber: Chandrappa dan Busan, 2012

Sanitary landfill memiliki sistem lapisan yang bervariasi, yaitu: (1) sistem *single liner*, merupakan lapisan yang mengandung tanah liat, *geosynthetic clay liner* (penahan aliran cairan atau gas serta secara umum digunakan pada aplikasi lapisan dasar dan *cover* pada *landfill* dan sering juga digunakan bersama-sama dengan *geomembrane*) atau *geomembrane* (digunakan sebagai pelapis tampung cairan atau gas dan juga dapat digunakan untuk penahan penguapan); (2) sistem *composite-liner*, terdiri dari *geomembrane* dan lapisan tanah liat, sistem ini lebih efisien untuk membatasi aliran cairan lindi dan sering digunakan; (3) sistem *double liner*, digunakan secara luas di *landfill* dengan komposisi sampah berbahaya. Sistem ini berisi baik dua *composite liner* atau dua *single liner* atau kombinasi *single liner* dan *composite liner*. Fungsi lapisan atas untuk mengumpulkan cairan lindi, sedangkan lapisan lebih rendah berfungsi sebagai lapisan primer yang mendeteksi kebocoran. Adapun ketiga sistem ini dapat dilihat pada gambar 2.4; 2.5; dan 2.6.



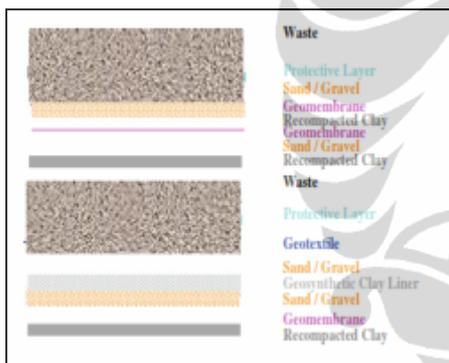
Gambar 2.4 Sistem *single liner*

Sumber: Chandrappa dan Busan, 2012



Gambar 2.5 Sistem *composite liner*

Sumber: Chandrappa dan Busan, 2012



Gambar 2.6 Sistem *double liner*

Sumber: Chandrappa dan Busan, 2012

Rekayasa *bioreactor landfills* seperti pada gambar 2.3 dirancang untuk meminimalkan infiltrasi air hujan dan pencairan salju ke dalam sampah atau limbah padat. Hal ini menyebabkan kondisi lokasi dan lingkungan juga perlu diperhatikan dalam *sanitary landfill* ini. Fasilitas *sanitary landfill* umumnya terletak di daerah dimana potensi penurunan kualitas udara, tanah dan air adalah minimal. *Sanitary landfill* juga harus terletak jauh dari bandara untuk menghindari kecelakaan udara antara burung dan pesawat terbang. Lokasi sebaiknya berada di

tempat luar dari dataran banjir dan tidak boleh berada di dekat monumen serta tempat-tempat penting lainnya secara ekologis. Lokasi tanah juga harus mempertimbangkan sensitivitas seismik daerah untuk menghindari kerusakan lingkungan selama gempa. McDouglas (2001:27) juga menyebutkan bahwa lokasi *landfill* harus berada jauh dari aliran air dan daerah padat penduduk dan dibangun di atas tanah dengan permeabilitas relatif rendah yaitu tanah liat. Gambar 2.3 menunjukkan faktor penting untuk menjadi pertimbangan saat mengevaluasi lokasi penimbunan sampah.

Menurut Chandrappa dan Busan (2012:117), *landfill* harus menjadi pilihan terakhir untuk mengelola sampah. *Landfill* adalah fasilitas fisik khusus dirancang, dibangun dan dioperasikan untuk pembuangan limbah. Pengurangan sampah bahkan setelah terencana dengan baik, daur ulang dan program transformasi, sisa sampah dari operasi tersebut masih berakhir di tempat pembuangan sampah. Oleh karena itu, suatu *landfill* akan menjalani kegiatan-kegiatan berikut: (1) *planning*, (2) *site selection*, (3) *site preparation*, (4) *landfill bed construction*, (5) *leachate and gas collection system incorporation*, (6) *landfilling*, (7) *monitoring*, (8) *closure of landfill* dan (9) *post closure monitoring*.

2.3.3.2 Incineration

Incineration merupakan metode paling banyak digunakan untuk membuang semua sampah yang mudah terbakar. Menurut Chandrappa dan Busan (2012:135) *incineration* merupakan pengelolaan sampah atau pembuangan dimana sampah dibakar dalam pengaturan rekayasa khusus. *Incineration* ini juga disebut *thermal treatment* karena melibatkan panas untuk menghasilkan yang diinginkan. Sementara itu, Thompson dan Anthoni, 2008 (dalam Malik dan Grohmann, 2012: 513) menyebutkan bahwa *incineration* tidak mengurangi sampah, hanya perubahan sampah dalam bentuk lain seperti gas, partikulat dan abu yang lebih berbahaya dibandingkan dalam bentuk asli sampah. Berdasarkan dua definisi tersebut maka proses *incineration* ini memerlukan biaya yang tinggi untuk memproses sampah dalam bentuk lain. Chandrappa dan Busan (2012: 135) mengemukakan bahwa negara berkembang jarang menggunakan sistem ini karena

biaya operasional yang tinggi. Lebih lanjut dapat dilihat pada definisi berikut ini: *Incineration is less practised in the developing countries due to high capital/operating costs.*

Selain jarang dilakukan di negara berkembang, proses *incineration* menghasilkan dampak yang berbahaya bagi lingkungan. Proses pembakaran tersebut menghasilkan polutan udara dan perlu dikontrol. Perubahan sampah menjadi bentuk lain abu, gas buang dan panas harus dilengkapi peralatan pengendalian pencemaran udara untuk menghindari dampak polusi udara pada lingkungan. Oleh karena itu, Chandrappa dan Busan (2012:135) mengusulkan adanya pemanfaatan energi panas tersebut untuk tujuan industri. Namun demikian, perubahan sampah menjadi energi ini ternyata tren nya melambat karena terdapat masalah kontrol aliran, berdampak pada *recycling*, efektivitas biaya dan penerimaan politik. Permasalahan tersebut menimbulkan suatu cara yang lebih efektif dalam pengelolaan sampah dan dapat dilakukan secara general oleh siapapun yaitu pengkomposan.

2.3.3.3 Pengomposan (*Composting*)

Proses pengomposan didefinisikan Swan et al., 2002 (dalam Malik dan Grohmann, 2012) sebagai pengaturan dekomposisi biologis dan stabilisasi bahan organik dalam kondisi *aerobic* dan memungkinkan pengembangan suhu panas akibat panas biologis yang dihasilkan. Hasilnya adalah produk yang telah stabil dan sudah dapat dijadikan kompos. Praktek kompos dalam bentuk pengembalian residu organik ke tanah untuk mempertahankan kesuburan tanah dan bahan organik sudah lama diterapkan oleh petani. Kompos dari sampah ini memiliki beberapa keunggulan, diantaranya (Malik dan Grohmann, 2012):

- Proses pengomposan dapat digunakan sebagai proses pengolahan bagi tipe sampah yang berbeda, yaitu: limbah padat, lumpur dan sampah pertanian
- Proses pengomposan mengurangi emisi metana yang dihasilkan dari degradasi sampah di lokasi *landfill* dan *open dumping*
- Kompos meningkatkan kesuburan tanah dan bahan organik tanah. Oleh karena itu, kompos dapat menggantikan pupuk tanah

- Bahan kompos yang stabil telah terbukti menurunkan berbagai polutan organik (Albanna et al., 2010). Oleh karena itu, kompos digunakan untuk bioremediasi lokasi yang tercemar dan tanah.

Pengomposan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Pengkomposan yang pertama adalah pengkomposan skala kecil di kebun rumah, kompos skala medium dilakukan oleh para petani atau masyarakat kecil, dan pengkomposan skala besar di fasilitas khusus. Proses pengkomposan ini lebih efektif jika dilakukan dengan baik oleh implementor dalam pengelolaan sampah. Hal ini dikarenakan biayanya pun relatif lebih kecil dibanding proses *incineration*.

2.3.4 Konsep 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*)

Tchobanouglas et al., (1993) mengemukakan bahwa pemilihan kombinasi teknik, teknologi dan program manajemen untuk mencapai tujuan pengelolaan sampah disebut pengelolaan sampah terpadu (*integrated waste management*). Hirarki tindakan untuk melaksanakan pengelolaan sampah terpadu yaitu *reduction, reuse, recycle, treatment and final disposal* (Tchobanouglas et al., 1993 dalam El Haggag, 2007: 2). Hal ini kemudian menyebabkan konsep *reduce, reuse, recycle* dikenal oleh masyarakat sebagai konsep pengelolaan sampah.

Reduce merupakan suatu bentuk pengurangan volume material pada sumbernya, dapat ditegakkan melalui kebijakan produsen dan konsumen (kemasan misalnya kurang perlu untuk suatu produk). Perubahan praktek konsumen merupakan bagian dari konsep pengurangan sumber sampah. Mengurangi bahan baku pada sumbernya akan melestarikan sumberdaya alam untuk keperluan lainnya.

Reuse merupakan menggunakan produk sampah dalam bentuk asli atau dalam bentuk yang sudah dimodifikasi (El-Haggag, 2007:2). *Reuse* bahan melibatkan penggunaan yang berkepanjangan dari suatu produk atau penggunaan produk untuk tujuan lain (botol kaca untuk mengisi air yang kemudian dimasukkan ke dalam lemari es). Menggunakan kembali produk tidak berarti material satu dibentuk kedalam bentuk yang berbeda atau disebut daur ulang. *Reuse* dapat dinggap pengurangan sumber yang dapat dilakukan tidak hanya oleh konsumen tetapi juga oleh produsen.

Pengurangan sumber dan menggunakan kembali dapat didorong melalui berbagai peraturan dan program-program. Kegiatan pengurangan sumber sampah ini tidak hanya mencakup pengurangan penggunaan bahan, namun juga meliputi kegiatan yang meningkatkan daya tahan produk dan kegunaannya. Pengurangan sumber yang meliputi pencegahan sumber dan penggunaan kembali merupakan pilihan terbaik dalam pengelolaan sampah karena mempertahankan sumberdaya alam dan mengurangi polusi dan *landfill* atau *incineration*. Adapun pilihan yang kurang disukai dalam pengelolaan sampah adalah *recycle*.

Recycle merupakan proses untuk mengubah sampah menjadi bahan baku yang dapat digunakan kembali untuk memproduksi produk baru (El-Haggag, 2007:3). *Reuse* memiliki banyak kaitannya dengan budaya kebiasaan, termasuk juga dalam hal ini *recycle*. Daur ulang melibatkan pengetahuan teknis dan dapat melibatkan beberapa investasi modal. Peraturan pemerintah dalam hal ini memiliki peran besar dalam mempromosikan daur ulang.

2.4 Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

Konsep *sustainable development* bukan merupakan konsep yang baru. Perhatian formal dan pelabelan konsep ini dimulai pada tahun 1970-an. Isu-isu lingkungan dan pembangunan internasional untuk pertama kalinya dibahas dalam "Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia" di Stockholm pada tahun 1972. Konferensi ini menghasilkan Program Lingkungan PBB (UNEP) untuk mengadopsi rencana aksi global, untuk melindungi lingkungan. Kemudian pada tahun 1986, "*World Commission on Environment and Development (WCED)*" didirikan. Laporan komisi ini merupakan lembaga internasional yang pertama kali menyebarkan luaskan istilah "*sustainable development*" dan itu menjadi patokan untuk berpikir tentang isu-isu lingkungan dan pembangunan global.

Puncak perhatian global terhadap keberlanjutan adalah selama Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan pada tahun 1992 yang diselenggarakan di Rio de Janeiro. Konferensi ini menghasilkan Agenda 21. Agenda 21 adalah aksi rencana global yang komprehensif untuk pembangunan berkelanjutan lokal, nasional, dan global. KTT yang sama komprehensif adalah

KTT Johannesburg pada tahun 2002 yang lebih fokus pada pemberantasan kemiskinan yang juga menghidupkan kembali komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan global. KTT ini, telah membantu dalam meningkatkan kesadaran serta perjanjian multilateral mengenai berbagai isu keberlanjutan dan lingkungan yang kritis.

Our Common Future atau *Brundtland Report* (WCED, 1987:43 dalam El-Haggar, 2007:85) menyebutkan definisi pembangunan berkelanjutan bahwa *Development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*. Hal ini dapat berarti pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengabaikan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka. Sementara itu, menurut *Sustainable Seattle* bahwa pembangunan berkelanjutan adalah perubahan sosial dan ekonomi yang mendorong kesejahteraan manusia dan kualitas hidup tanpa menyebabkan kerusakan ekologi atau sosial (*Redefining Progress* 2002 dalam El-Haggar, 2007:85).

Konsep pembangunan berkelanjutan merupakan metodologi yang mencoba untuk mencakup aspek sosial, teknologi, ekonomi, dan lingkungan. Dengan demikian, fokus pada interaksi dan dampak dari empat faktor satu sama lain. Unsur-unsur pertumbuhan lingkungan, teknologi, sosial, dan ekonomi yang terlihat saling memperkuat satu sama lain sehingga mencapai "*win-win*" solution yang tidak kompromi pada aspek apapun (El-Haggar, 2007: 86).

Menurut Soemarwoto (2004: 174-175), lingkungan sosial-budaya dan ekonomi sangatlah penting bagi kesinambungan pembangunan berkelanjutan. Hal ini dikarenakan pembangunan dilakukan oleh dan untuk manusia yang hidup di dalam kondisi sosial-budaya dan ekonomi tertentu. Faktor sosial-budaya tidak kalah penting dari faktor ekonomi dalam menentukan keberlanjutannya pembangunan. Harris, 2003: 1 (dalam Harris, 2008) juga menyebutkan 3 aspek penting dalam pembangunan berkelanjutan yaitu: (1) ekonomi (*economic*), (2) lingkungan (*environmental*), (3) sosial (*social*). Aspek ekonomi melihat bahwa sebuah sistem yang berkelanjutan secara ekonomi harus mampu menghasilkan

barang dan jasa secara berkelanjutan, untuk mempertahankan pengelolaan di tingkat pemerintah dan pengelolaan utang luar negeri, serta untuk menghindari ketidakseimbangan sektoral ekstrim yang merusak produksi pertanian atau industri. Aspek lingkungan melihat bahwa suatu sistem lingkungan yang berkelanjutan harus mempertahankan basis sumberdaya yang stabil, menghindari eksploitasi yang berlebihan terhadap sumberdaya yang dapat diperbaharui atau berfungsi sebagai *environmental sink function* (penyerap polusi dan timbulan sampah dengan adanya kegiatan ekonomi) (Harris, et al., 2008) dan menipisnya sumberdaya tidak dapat diperbaharui yang dibuat investasi untuk pengganti yang memadai. Aspek lingkungan ini termasuk dalam pemeliharaan keanekaragaman hayati, stabilitas atmosfer dan fungsi ekosistem lainnya yang tidak digolongkan dalam aspek ekonomi. Sementara itu, aspek sosial melihat bahwa sebuah sistem berkelanjutan secara sosial harus mencapai keadilan dalam distribusi dan kesempatan, ketersediaan produk layanan sosial termasuk kesehatan dan pendidikan, kesetaraan gender serta akuntabilitas politik dan partisipasi.

Penjelasan mengenai 3 aspek penting dalam pembangunan berkelanjutan dapat dijelaskan sebagai berikut (Harris, 2003 dalam Harris, 2008):

1. Perspektif Ekonomi

Teori neo-klasik menyebutkan bahwa keberlanjutan dapat didefinisikan dalam hal maksimalisasi kesejahteraan dari waktu ke waktu. Maksimalisasi kesejahteraan yang dimaksud adalah maksimalisasi utilitas konsumsi. Adapun unsur-unsur penting dari kesejahteraan manusia adalah makanan, pakaian, perumahan, transportasi, pelayanan kesehatan dan pendidikan, dan lain-lain. Howarth dan Norgaard, 1993 (dalam Harris, 2003) telah menunjukkan bahwa pilihan tingkat diskonto setara dengan pilihan alokasi antar generasi. Tingkat diskonto ini untuk menggambarkan keberlanjutan antar generasi yang berkaitan dengan kegiatan konsumsi. Isu-isu seperti erosi tanah atau penumpukan gas rumah kaca di atmosfer yang dampaknya dirasakan selama puluhan tahun atau generasi, hal ini menciptakan bias yang kuat terhadap keberlanjutan. Oleh karena itu, untuk mencapai keadilan antargenerasi perlu memaksakan tingkat diskonto rendah atau aturan keberlanjutan mengenai sumberdaya dan dampak lingkungan.

Cline (1992) menyarankan penggunaan tingkat diskonto 1,5% untuk menyeimbangkan biaya dan manfaat global perubahan iklim dalam jangka panjang.

Selain penggunaan tingkat diskonto dalam rangka keberlanjutan ekonomi, dijelaskan pula mengenai konsep modal alam. Hartwick (1977) dan Solow (1986) dalam Harris, 2008 menyatakan bahwa konsumsi dapat tetap konstan atau meningkat, dengan penurunan sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui dengan ketentuan bahwa sumberdaya tersebut diinvestasikan kembali dalam modal yang direproduksi. Definisi tersebut merujuk pada substitusi dari berbagai jenis modal. Hal ini dapat diilustrasikan ketika menebang hutan tetapi membangun pabrik-pabrik, lebih baik memberikan nilai ekonomi pabrik industri baru kemudian melebihi nilai ekonomi dari hutan yang hilang. Hal tersebut tetap memprioritaskan aspek keberlanjutan dari aspek ekonomi.

2. Perspektif Lingkungan

Holling (1973, 1986) mengemukakan mengenai teori ekosistem stabilitas dan pertahanan bahwa sistem alam harus tunduk pada hukum termodinamika yang persisten. Hal ini dikarenakan perspektif ekonomi tidak memberikan batas atas pertumbuhan ekonomi. Holling (1994) menyebutkan dua aksioma mendasar dari ekologi dan evolusi biologis adalah organisme yang terlalu produktif dan batas yang ditetapkan oleh waktu, ruang dan energi pasti ditemui.

Perspektif keberlanjutan ekologi harus melibatkan batas populasi dan tingkat konsumsi. Batasan ini berlaku untuk semua sistem biologis. Holling kemudian menyebutkan aksioma ketiga menyangkut proses yang menghasilkan variabilitas dan hal yang baru dari generasi keragaman genetik dan proses yang dihasilkan dari evolusi dan perubahan spesies dan ekosistem. Keanekaragaman genetik menimbulkan ketahanan ekosistem. Kunci ketahanan disini adalah adanya berbagai macam spesies, berinteraksi satu sama lain yang memberikan potensi untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi. Keberlanjutan ekologi berbeda dengan keberlanjutan ekonomi. Hal ini dapat berarti tidak ada hubungan yang erat antara efisiensi ekonomi dan keberlanjutan ekologi (Holling, 1992:7). Keberlanjutan ekologi diperlukan dengan cara memodifikasi preferensi konsumsi

saat ini dan teknik produksi yang efisien dalam hal ekonomi, namun mengancam ketahanan ekologi.

3. Perspektif Sosial

Anand dan Sen, 1996 (dalam Harris, 2003) menyebutkan bahwa kekhawatiran untuk dimensi-dimensi pembangunan ekonomi mulai dengan teori ekonomi yang paling awal kontradiktif dengan pendekatan pembangunan sosial. Kebutuhan dasar dan kesetaraan dalam pembangunan yang dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia merupakan aspek yang dilihat dalam perspektif sosial. Kaitan sosial dan isu kelestarian lingkungan adalah tentang kemiskinan dan keadilan. Hubungan ini berjalan dua arah, seperti meningkatnya kemiskinan dan hilangnya mata pencaharian pedesaan mempercepat degradasi lingkungan karena memberikan tekanan lebih besar pada hutan, perikanan dan lahan. Reed, 1997 (dalam Harris, 2003) mengemukakan bahwa komponen sosial keberlanjutan meliputi isu pemerataan, penyediaan layanan sosial, kesetaraan gender, stabilisasi populasi, dan akuntabilitas politik dan partisipasi. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa terdapat kaitan antara ekonomi, sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan diperlukan dalam rangka perlindungan terhadap lingkungan.

2.5 Pengelolaan Sampah Berkelanjutan

Mitchell et al. (2000:62) menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan di Indonesia telah diupayakan di dalam program dan strategi pengelolaan lingkungan sebagaimana tertuang dalam dokumen agenda 21 yang dihasilkan dalam Konferensi Tingkat Tinggi Bumi (*Earth Summit*) di Rio de Janeiro tahun 1992, Agenda 21 Indonesia merumuskan strategi nasional untuk pembangunan berkelanjutan yang dikelompokkan menjadi empat area yakni: 1) pelayanan masyarakat, 2) pengelolaan limbah, 3) pengelolaan sumberdaya tanah, 4) pengelolaan sumberdaya alam.

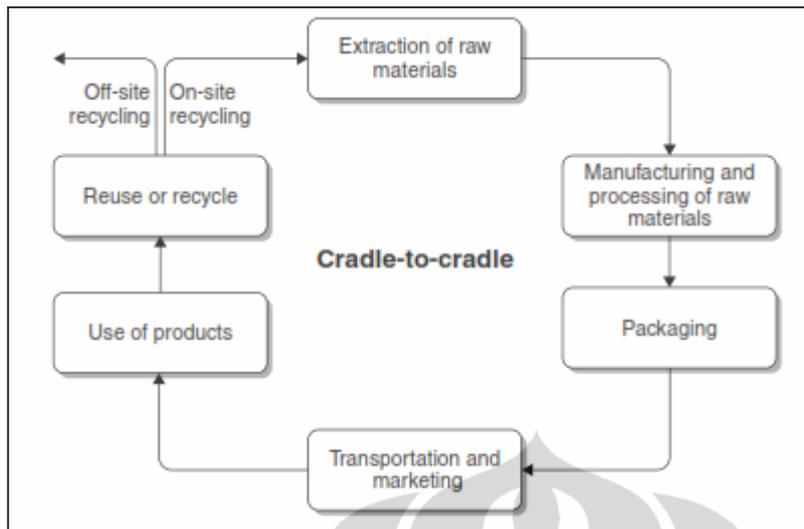
Pengelolaan sampah dalam hal ini perlu memperhatikan aspek keberlanjutan. Oleh karena itu, diperlukan analisis siklus hidup (*life cycle assessment/analysis/LCA*). LCA digunakan untuk mengidentifikasi dampak

produk terhadap lingkungan sepanjang siklus hidup, termasuk ekstraksi bahan baku, pengolahan bahan baku untuk membuat produk, transportasi dan distribusi produk ke konsumen, penggunaan produk oleh konsumen dan akhirnya pembuangan bahan produk setelah penggunaannya (TecEcoPty.Ltd, 2006 dalam El-Haggar, 2007:14)

United States Environmental Protection Agency (USEPA) mendefinisikan analisis siklus hidup sebagai metode untuk mengevaluasi efek lingkungan yang terkait dengan kegiatan industri yang diberikan dari pertemuan awal bahan baku yang berasal dari bumi ke titik yang mana semua residu dikembalikan lagi ke bumi. Proses ini dikenal sebagai *cradle-to-grave*. *Cradle-to-grave* merupakan aliran satu arah yang diawali dari mengekstraksi bahan baku, kemudian pengolahan, memproduksi barang, penjualan, pemanfaatan oleh konsumen dan akhirnya pembuangan.

Kemajuan teknologi dalam proses manufaktur dan berbagai bahan dan produk terus meningkat telah menyebabkan kenaikan terus-menerus dalam jumlah sampah yang dihasilkan. *Cradle-to-grave* merupakan suatu proses aliran yang telah terbukti cukup untuk melindungi lingkungan tetapi tidak efisien karena menipisnya sumberdaya alam. Hal ini dikarenakan perkembangan peraturan pemerintah yang ketat lebih banyak diarahkan kepada eko-efisiensi, yang berarti meminimalkan pembuangan sampah, polusi dan penipisan sumberdaya alam. Pembangunan berkelanjutan tidak dapat didasarkan pada peningkatan efisiensi sistem *cradle-to-grave*, meskipun di lain sisi eko-efisiensi dapat mencapai manfaat ekonomi dan kesehatan di beberapa lingkungan tertentu.

Oleh karena itu, muncul konsep baru yaitu *cradle-to-cradle* untuk dapat mengembangkan LCA secara global. Konsep *cradle-to-cradle* untuk melindungi lingkungan dan sumberdaya alam. Desain produk harus dipilih sesuai dengan proses pembuangan yang aman. Apabila produk dirancang sesuai dengan konsep *cradle-to-cradle*, bahan dapat digunakan kembali, sampah dapat diproduksi atau dapat didaur ulang, tidak ada dampak negatif terhadap lingkungan yang dihasilkan dalam *closed loop* dari siklus produk yang ditampilkan pada gambar 2.7.



Gambar 2.7 Sistem *cradle-to-cradle*

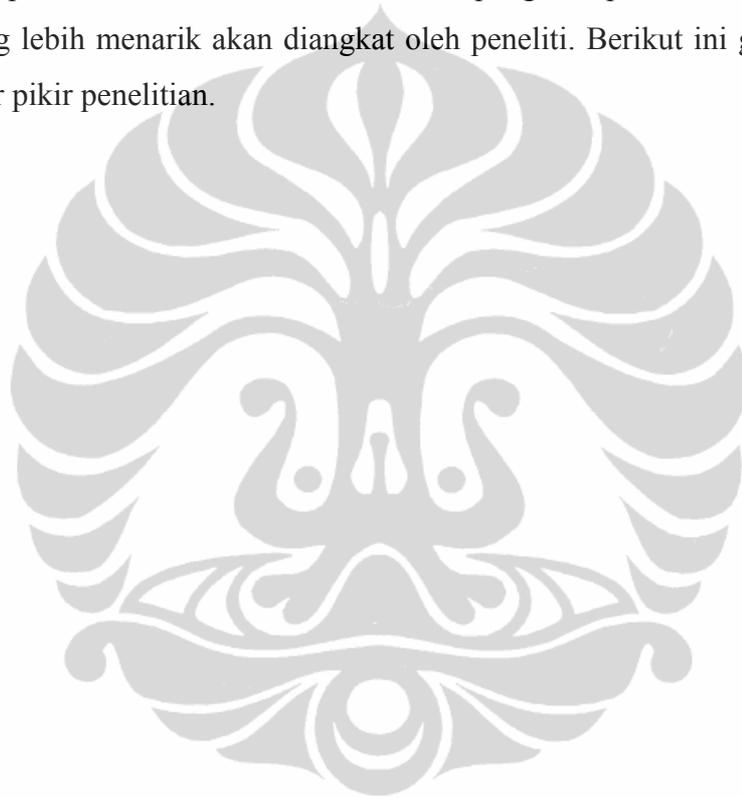
Sumber: El-Haggar, 2007

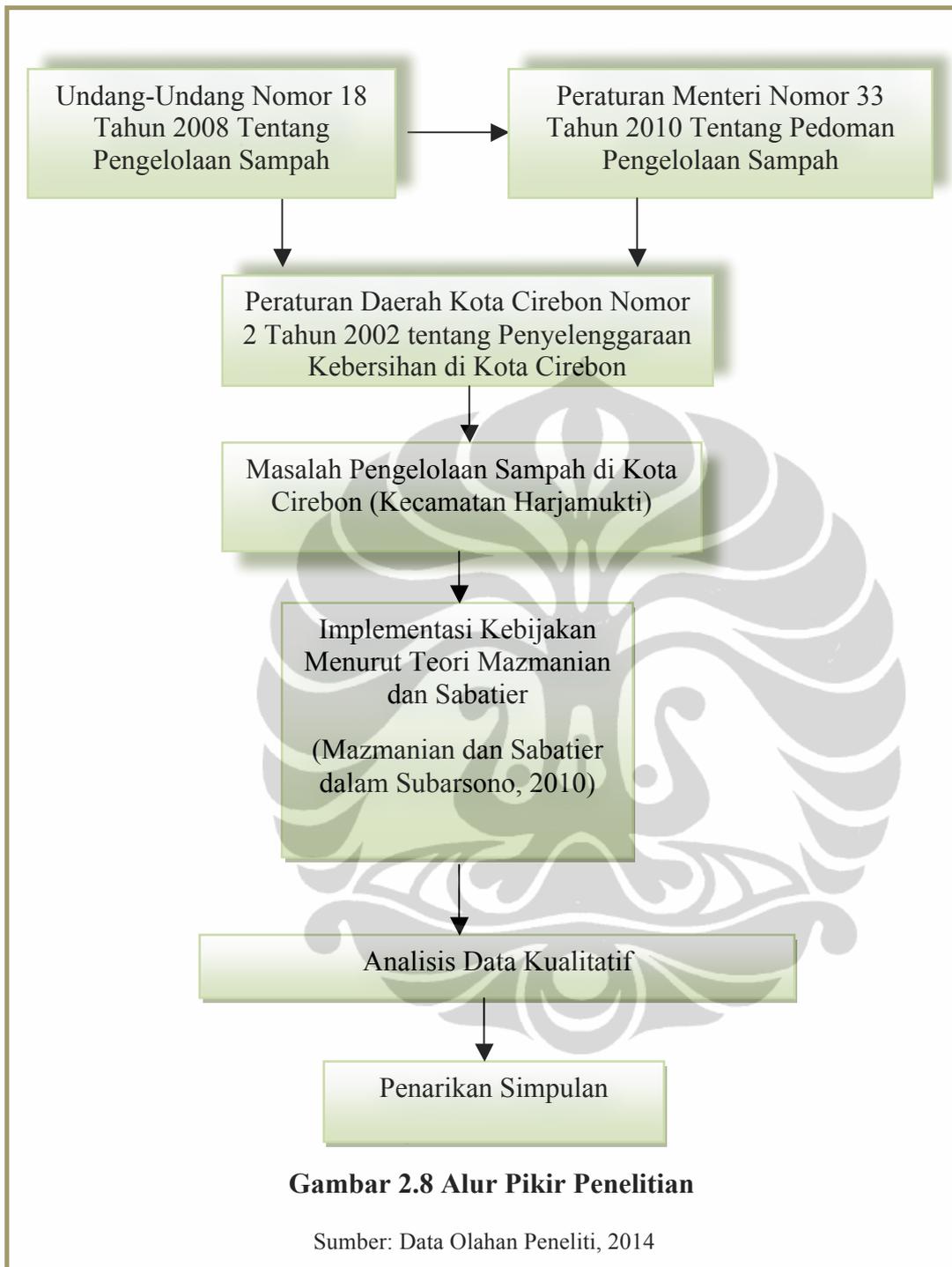
Hal di atas dapat dicapai dengan memiliki industri mengubah produk dari desain *cradle-to-grave*, konsep tersebut membuat produk dibuang ke *landfill* di akhir siklusnya. Produk yang dirancang berdasarkan desain *cradle-to-cradle*. Bahan atau material dalam *closed loop* tersebut terus mengalir tanpa kehilangan sumberdaya alam. Dampak lingkungan dan kesehatan serta berkurangnya sumberdaya alam sebagai akibat pengolahan konvensional, *incineration* dan pembuangan akhir melalui *landfill* menjadi lebih berbahaya dan bencana bagi pembangunan berkelanjutan. Hal ini menyebabkan konsep *cradle-to-cradle* merupakan konsep baru yang mendekati sempurna dalam pembangunan berkelanjutan, terutama dalam pengelolaan sampah yang menjadi masalah hingga saat ini.

2.6 Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka pikir penelitian digunakan peneliti untuk pemikiran dalam menemukan fakta dan data di lapangan. Peneliti akan melihat masalah yang sebenarnya di lapangan kemudian melihat pada peraturan daerah mengenai pengelolaan sampah. Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Cirebon diatur dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Kebersihan di Kota Cirebon. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Kebersihan di Kota

Cirebon masih belum dapat menjelaskan pengelolaan sampah secara rinci baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah menjadi pedoman juga dalam pelaksanaannya. Peneliti kemudian akan melihat masalah di lapangan merujuk pada teori implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier, pengelolaan sampah dan pembangunan berkelanjutan. Namun demikian, teori digunakan sebagai konsep untuk memahami masalah di lapangan, apabila terdapat fakta lapangan yang lebih menarik akan diangkat oleh peneliti. Berikut ini gambar 2.8 mengenai alur pikir penelitian.





BAB 3

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan serangkaian hukum, aturan, dan tatacara tertentu yang diatur dan ditentukan berdasarkan kaidah ilmiah dalam menyelenggarakan suatu penelitian dalam koridor keilmuan tertentu yang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Herdiansyah, 2011: 17). Metode yang digunakan dalam penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut.

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian berjudul "*Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Dalam Upaya Pembangunan Berkelanjutan di Kota Cirebon (Studi Kasus Kecamatan Harjamukti*" merupakan pendekatan *post positivist*. Neuman menyebut pendekatan *post positivist* dengan sebutan *interpretive approach*. Penelitian *post positivist* ini karena peneliti berangkat dari sebuah teori dengan pengamatan empiris dalam rangka melakukan penggalian kebenaran informasi mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah.

Teori implementasi kebijakan yang digunakan peneliti adalah Mazmanian dan Sabatier. Namun peneliti tidak menguji atau mengukur kebenaran indikator yang terdapat pada teori implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier. Peneliti menggunakan data kualitatif dalam pendekatan *post positivist* ini karena kebenaran informasi akan lebih terlihat dan bersifat akurat. Selain itu, dengan pendekatan *post positivist* ini peneliti akan lebih memahami atau menemukan masalah yang terjadi dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah dalam upaya pembangunan berkelanjutan di Kota Cirebon (Studi Kasus Kecamatan Harjamukti). Hal ini juga didukung pernyataan Neuman (2007) bahwa *The purpose of an interpretive explanation is to foster understanding. The interpretive theorist attempts to discover the meaning of an event or practice by placing it within a specific social context* (Neuman, 2007:40). Maksud Neuman disini yaitu tujuan penjelasan *interpretive* untuk memahami suatu masalah. Teori *interpretive* berusaha untuk menemukan maksud dari suatu kejadian atau tindakan dalam konteks sosial yang khusus.

Selain teori implementasi kebijakan, peneliti juga menggunakan teori pembangunan berkelanjutan serta teori yang berkaitan dengan pengelolaan sampah untuk menggali bagaimana implementasi pengelolaan sampah dalam upaya pembangunan berkelanjutan di Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Hal ini bertujuan untuk menemukan gejala atau suatu fenomena yang dianggap menarik bagi peneliti untuk dikemukakan dalam penelitian.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dapat dibedakan berdasarkan tujuan penelitian, manfaat penelitian, dimensi waktu penelitian, dan teknik pengumpulan data. Berdasarkan keempat klasifikasi tersebut, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

3.2.1 Berdasarkan Tujuan Penelitian

Jika dilihat dari segi tujuan, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif. Neuman (2007, 16) mengemukakan bahwa penelitian deskriptif sebagai berikut:

“Presents a picture of the specific details of a situation, social setting, or relationship; it focuses on “how?” and “who?” questions: “How did it happen?” “Who is involved?” Hal ini dapat berarti sebagai “Gambaran suatu situasi secara spesifik, *setting* sosial, atau hubungan. Penelitian deskriptif berfokus pada pertanyaan “bagaimana” dan “siapa”, yaitu “bagaimana suatu fenomena terjadi dan “siapa yang terlibat”.”

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif karena menjelaskan bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang dilihat dari Mazmanian dan Sabatier. Selanjutnya, di dalam penelitian deskriptif ini peneliti memberikan gambaran mendalam implementasi Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Kebersihan di Kota Cirebon dalam upaya pembangunan berkelanjutan yang dilihat dari perspektif ekonomi, sosial, lingkungan. Penelitian deskriptif ini juga akan berusaha menggambarkan fenomena atau gejala yang menarik bagi peneliti dilihat dari data yang telah dikumpulkan.

3.2.2 Berdasarkan Manfaat Penelitian

Jika dilihat dari segi manfaat penelitian, penelitian ini termasuk penelitian murni. Menurut Neuman (2007: 11) penelitian murni adalah:

“Basic research is the source of the most new scientific ideas and ways of thinking about the world. Basic social research advantages fundamental knowledge about the social world.” Hal ini dapat berarti “Penelitian murni adalah sumber dari sebagian besar ide-ide ilmiah baru dan cara berpikir tentang dunia. Penelitian murni meningkatkan pengetahuan pokok tentang dunia sosial.”

Berdasarkan manfaat penelitian, penelitian ini merupakan penelitian murni karena penelitian ini tidak bertujuan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan ataupun disponsori oleh suatu organisasi untuk meneliti, melainkan penelitian ini bertujuan untuk menyumbangkan ilmu pengetahuan yang dapat digunakan pada penelitian selanjutnya. Khususnya studi mengenai administrasi perkotaan, administrasi lingkungan dan pembangunan regional.

3.2.3 Berdasarkan Dimensi Waktu

Jika dilihat dari aspek dimensi waktu penelitian, penelitian ini tergolong dalam penelitian *cross sectional*. Penelitian *cross sectional* adalah penelitian yang dilakukan pada satu titik waktu dan hanya mengambil pendekatan satu kali dari fenomena sosial pada satu waktu tertentu tersebut. Hal ini didukung pendapat Neuman (2007) yang menyatakan juga bahwa penelitian *cross sectional* sebagian besar cocok dengan penelitian deskriptif. Neuman (2007: 17) mengemukakan bahwa:

“Most social research studies are cross-sectional; they examine a single point in time or take a one-time snapshot approach. Cross-sectional Research can be exploratory, descriptive, or explanatory but it is most consistent with a descriptive approach to research”.

Penelitian ini akan dilaksanakan dalam suatu periode waktu tertentu, yaitu dimulai dari bulan Februari 2014 hingga bulan Juni 2014.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data kualitatif, yaitu studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan (*library research*).

a. Studi Lapangan (*Field Research*)

Peneliti melakukan studi lapangan guna mengumpulkan data primer (utama) sebagai bahan untuk menganalisis permasalahan pada topik penelitian ini. Penelitian lapangan dilakukan dengan wawancara secara mendalam (*in depth interview*) dengan menggunakan pedoman wawancara.

Wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan *face-to-face interview* dengan partisipan yang menggunakan *audio tape*. Peneliti tidak membatasi pilihan jawaban informan, sehingga informan dalam penelitian ini dapat menjawab secara bebas dan lengkap sesuai dengan opininya. Wawancara mendalam ini dilakukan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan sampah dalam upaya pembangunan berkelanjutan di Kota Cirebon (Studi Kasus Kecamatan Harjamukti). Selain itu, juga wawancara dilakukan kepada pihak yang berkompeten di bidang pengelolaan sampah, yang memahami masalah penelitian dan kenyataan di lapangan.

Peneliti juga melakukan pengumpulan data melalui observasi, untuk menunjang data yang didapat dari wawancara mendalam. Peneliti mengamati hal-hal yang kasat mata yang terkait dengan objek penelitian. Observasi dilakukan supaya data yang terkumpul lebih akurat, sekaligus untuk memastikan data yang didapatkan dari hasil wawancara mendalam. Observasi juga dilakukan untuk mendapatkan data yang tidak didapatkan dari hasil wawancara mendalam, seperti mengenai situasi fisik, kondisi sekitar, lingkungan, dan hal lain sulit digali lewat pertanyaan. Observasi dilakukan di Kecamatan Harjamukti. Observasi selanjutnya akan dilihat pada pedoman observasi.

b. Studi Literatur (*Library Research*)

Metode pengumpulan data sekunder sebagai pendukung juga digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur. Studi literatur dilakukan terhadap berbagai jenis peraturan, buku, penelitian, artikel, jurnal dan dokumen lainnya yang dapat memberi data penunjang bagi penelitian ini. Peraturan, buku,

penelitian, artikel, jurnal dan dokumen lainnya masih berkaitan dengan implementasi kebijakan, pengelolaan sampah dan pembangunan berkelanjutan. Buku tersebut juga peneliti dapatkan dalam bentuk *e-book* yang diunduh dari perpustakaan *online* dari dalam dan luar negeri. Literatur tersebut juga peneliti dapatkan melalui perpustakaan kampus, internet, media massa, informan dan instansi-instansi yang terkait dalam penelitian ini guna mendapatkan data sekunder dan tulisan-tulisan yang relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan *coding data*. *Coding data* digunakan untuk mengkategorikan suatu data. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Neuman, 2007: 335 bahwa *a researcher codes by organizing the raw data into conceptual categories and creates themes or conceptual*. Setelah melakukan *coding data* pada data yang telah dikumpulkan, peneliti kemudian melakukan triangulasi data. Triangulasi adalah penggunaan dua atau lebih sumber untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang suatu fenomena yang akan diteliti. Intinya adalah penggunaan lebih dari satu “sumber”, dimana jika dijabarkan lebih dalam, “sumber” yang dimaksud dapat berarti banyak hal, seperti perspektif, metodologi, teknik pengumpul data, dan lain sebagainya (Herdiansyah, 2011: 201). Proses terakhir dalam pendekatan kualitatif merupakan proses pengujian kebenaran, dan kekokohan dari validitas makna-makna yang muncul. Sehingga penarikan kesimpulan bersifat akurat dan jelas.

Selain itu, penelitian ini menggunakan strategi analisis data berupa *the illustrative method*. Hal ini dikarenakan peneliti menggunakan suatu teori untuk menjelaskan suatu hal tertentu, dalam hal ini peneliti ingin menjelaskan hal yang berkaitan dengan pengelolaan sampah. Neuman menyatakan bahwa *theory can be in the form of a general model, an analogy or a sequence of steps* (2007: 338). Hal ini menyebabkan teori yang digunakan peneliti untuk menemukan data karena melihat data di lapangan dengan teori umum yang ada. Hal ini kemudian akan menggambarkan fenomena yang spesifik atau secara mendetail.

3.5 Narasumber/Informan Penelitian

Informan adalah orang yang dianggap mampu dan mempunyai kompetensi untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Pemilihan narasumber atau informan dalam suatu penelitian difokuskan pada representasi atas masalah yang diteliti. Berdasarkan hal tersebut, maka narasumber/informan yang terkait dengan permasalahan penelitian ini, antara lain:

Pemerintah	Publik
Aty Hermawaty, Kasub Bidang Perencanaan Pengembangan Kawasan Perkotaan, Lingkungan Hidup, dan Pertanahan pada Bappeda Kota Cirebon	Agus Supriyono, Ketua Komunitas KSM Secerah Pagi Rw.08 Kelurahan Larangan
Hendra Irawan, Kepala Konservasi dan Pemulihan Kantor Lingkungan Hidup Daerah Kota Cirebon	Dani Komara, Sekretaris Komunitas KSM Secerah Pagi Rw.08 Kelurahan Larangan
Sumanto, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cirebon	Nunung Nurhayati, Wakil masyarakat Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti
Agus Hasyim, Kepala Bidang Kebersihan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cirebon	
Otang Somantri, Kepala UPTD TPA Kopiluhur	
Sudiro, Staff Operasional UPTD TPA Kopiluhur	
Upri, Petugas penjaga gedung Pabrik Kompos TPA Kopiluhur	
Suwarso Budi Winarno, Camat Kecamatan Harjamukti	
Sutisna, Lurah Kelurahan Larangan	
Akademisi	
Nurudin Siraj, Akademisi Cirebon dalam bidang Kebijakan Publik	

3.6 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Cirebon, Jawa Barat dengan fokus pada lokasi di Kecamatan Harjamukti. Alasan peneliti memilih lokasi di Kota Cirebon adalah karena Kota Cirebon memiliki tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Jawa Barat pada tahun 2008 serta menghasilkan sampah paling banyak dibanding 8 kota lainnya di Jawa Barat. Sementara itu, alasan peneliti memilih Kecamatan Harjamukti adalah karena Kecamatan Harjamukti memproduksi sampah terbanyak di Kota Cirebon.

3.7 Proses Penelitian

Proses penelitian yang dilakukan peneliti adalah dengan menggunakan pendekatan *post positivist*. Pertama, peneliti menentukan fokus penelitian, yaitu pengelolaan sampah di Kota Cirebon (Studi Kasus Harjamukti). Kemudian, peneliti melakukan studi literatur terkait kebijakan, pengelolaan sampah, dan pembangunan berkelanjutan dengan tujuan memperoleh kerangka pemikiran yang mengarahkan alur penelitian. Peneliti membuat instrumen penelitian berupa pedoman wawancara dan pedoman observasi. Setelah itu peneliti mengikuti prosedur perizinan untuk melakukan wawancara mendalam dengan informan yang telah ditentukan. Selanjutnya, informan penelitian dapat berkembang berdasarkan arahan dari informan utama. Setelah data primer dan data sekunder terkumpul, peneliti kemudian melakukan pengelompokan data yang dianggap sesuai dengan bahasan yang dikaji peneliti. Pembahasan berdasarkan *illustrative method* karena melihat teori implementasi kebijakan, manajemen sampah dan pembangunan berkelanjutan saling berkaitan di lapangan untuk menemukan fakta lapangan. Kemudian dari hasil pembahasan, peneliti dapat menyimpulkan dan memberikan rekomendasi penelitian tentang implementasi kebijakan pengelolaan sampah dalam upaya pembangunan berkelanjutan di Kota Cirebon (Studi Kasus Kecamatan Harjamukti).

3.8 Batasan Penelitian

Pembatasan penelitian dilakukan guna mempersempit ruang kajian penelitian. Diharapkan dengan adanya pembatasan, penelitian akan lebih fokus dan menghindari pembahasan yang terlampaui luas, namun dangkal. Penelitian ini akan dibatasi pada implementasi kebijakan pengelolaan sampah yaitu Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2002.

3.9 Keterbatasan Penelitian

Penelitian yang dilakukan selama di Kota Cirebon terdapat beberapa keterbatasan terkait informan dan data sekunder yang dimiliki oleh Dinas. Adapun keterbatasan penelitian dapat dirinci sebagai berikut:

1. Ada beberapa informan yang seharusnya diajukan kepada pimpinan Dinas, namun karena beberapa hal akhirnya didisposisikan kepada bawahannya. Hal ini tidak mengurangi wawasan tentang pengelolaan sampah karena bidang yang diwawancarai terkait pengelolaan sampah dan lingkungan hidup.
2. Data sekunder yang dimiliki beberapa Dinas terkadang tidak *update* dan tidak dalam bentuk *softfile* karena prosedur pemerintah pusat. Peneliti menyiasati hal ini dengan mencantumkan data dari laporan Dinas yang maksimal 5 tahun terakhir.

BAB 4

GAMBARAN UMUM

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian di Kota Cirebon dan Kecamatan Harjamukti, gambaran umum pengelolaan sampah di Kota Cirebon serta regulasi tentang pengelolaan sampah. Pembahasan pada bab ini diperoleh dari hasil wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi.

4.1 Gambaran Umum Kota Cirebon

Kota Cirebon merupakan salah satu dari sembilan kota di Jawa Barat. Menurut Manuskrip Kota Cirebon pada periode tahun 1910-1937 Kota Cirebon disahkan menjadi Gemeente Cheirebon dengan luas 1.100 Hektar dan berpenduduk 20.000 jiwa (Stlb. 1906 No.122 dan Stlb. 1926 No. 370). Tahun 1942 Kota Cirebon diperluas menjadi 2.450 Hektar dan tahun 1957 status pemerintahannya menjadi Kota Praja dengan luas 3.300 Hektar, setelah ditetapkan menjadi Kotamadya tahun 1965 luas wilayahnya menjadi 3.600 Hektar. Hingga saat ini wilayah Kota Cirebon seluas 3.735,82 Hektar (Pemerintah Kota Cirebon, 2011).

4.1.1 Kondisi Geografis

Kota Cirebon terletak di daerah pantai utara Provinsi Jawa Barat bagian timur. Letak geografis tersebut sangat strategis karena merupakan jalur utama transportasi dari Jakarta menuju Jawa Barat, Jawa Tengah, yang melalui daerah utara atau pantai utara (pantura). Letak tersebut menjadikan suatu keuntungan bagi Kota Cirebon, terutama dari segi perhubungan dan komunikasi. Geografis Kota Cirebon terletak pada posisi 108,33° dan 6,41° Lintang Selatan pada pantai utara Pulau Jawa, bagian timur Jawa Barat, memanjang dari barat ke timur ± 8 kilometer, utara selatan ± 11 kilometer dengan ketinggian dari permukaan laut ± 5 meter, dengan demikian Kota Cirebon merupakan daerah dataran rendah dengan luas wilayah administrasi ± 37,35 km² atau ± 3.735,8 hektar yang mempunyai batas-batas:

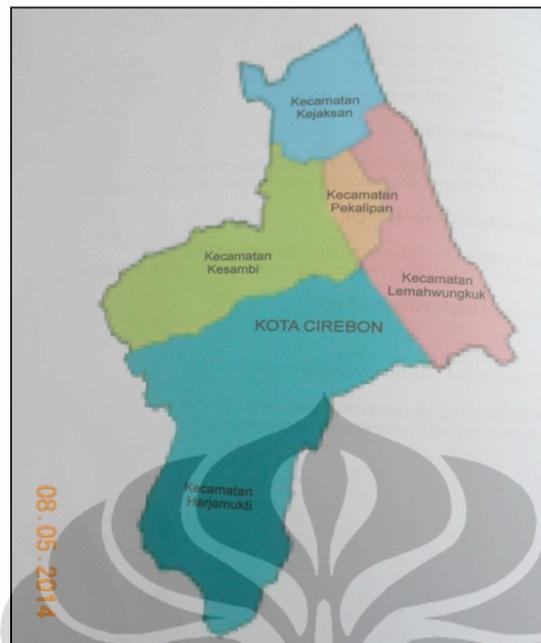
- Sebelah Utara : Sungai Kedung Pane
- Sebelah Barat : Sungai Banjir Kanal/ Kabupaten Cirebon
- Sebelah Selatan : Sungai Kalijaga
- Sebelah Timur : Laut Jawa

Kota Cirebon termasuk daerah iklim tropis dengan suhu udara minimum rata-rata 25,43°C dan maksimum rata-rata 30,48°C dan banyaknya curah hujan 1.624,2 mm per tahun dengan hari hujan 71 hari. Keadaan air tanah pada umumnya dipengaruhi oleh intrusi air laut, sehingga kebutuhan air bersih masyarakat sebagian besar bersumber dari pasokan Perusahaan Air Minum daerah (PDAM) Kota Cirebon yang sumber mata airnya bersal dari Kabupaten Kuningan. Sementara itu keadaan angin di Kota Cirebon terdapat tiga macam angin yaitu:

1. Angin Muson Barat : Desember-Maret
2. Angin Muson Timur : Mei-Oktober
3. Angin Pancaroba : April-November

4.1.2 Pemerintahan

Wilayah administrasi Pemerintah Kota Cirebon dengan luas 37,358 km², pada tahun 2012 terdiri dari 5 wilayah kecamatan, 22 kelurahan, 250 Rukun Warga (RW) dan 1.396 Rukun Tetangga (RT). Harjamukti merupakan kecamatan terluas (47%), kemudian berturut-turut kecamatan Kesambi (22%), Lemahwungkuk (17%), Kejaksan (10%) dan Pekalipan (4%). Adapun peta administratif Kota Cirebon dapat dilihat berikut pada gambar 4.1 berikut ini:



Gambar 4.1 Peta Administratif Kota Cirebon

Sumber: BPS Kota Cirebon, 2013

Menurut hasil Sensus Penduduk Tahun 2012 oleh BPS Kota Cirebon jumlah penduduk Kota Cirebon telah mencapai jumlah 301.720 ribu jiwa. Penduduk Kota Cirebon tersebar di lima kecamatan. Kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Pekalipan sebesar 18,88 ribu jiwa/km², terpadat kedua adalah Kecamatan Kejaksan 11,89 ribu jiwa/km², kemudian Kecamatan Kesambi 8,86 ribu jiwa/km², Kecamatan Lemahwungkuk 8,25 ribu jiwa/km², dan kepadatan terendah terdapat di Kecamatan Harjamukti hampir 5,9 ribu jiwa/km² (BPS Kota Cirebon, 2013). Kecamatan Harjamukti yang terdiri atas 5 Kelurahan ternyata memiliki jumlah RW dan RT terbanyak sejumlah 76 RW dan 454 RT. Pada tabel 4.1 berikut ini dijelaskan mengenai rincian luas wilayah per kelurahan dan jumlah RW dan RT yang ada di Kota Cirebon.

**Tabel 4.1 Banyaknya Kelurahan, RW, RT dan Rumahtangga
Menurut Kecamatan di Kota Cirebon**

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Kelurahan	Rukun Warga	Rukun Tetangga
1.	Harjamukti	17.615	5	76	454
2.	Lemahwungkuk	6.507	4	42	232
3.	Pekalipan	1.561	4	39	186
4.	Kesambi	8.059	5	55	307
5.	Kejaksan	3.616	4	35	183
Jumlah		37.358	22	247	1362

Sumber: Data Olahan Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kota Cirebon, BPS 2013

4.1.3 Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Kota Cirebon pada tahun 2013 mencapai 304.313 jiwa yang terdiri dari 152.573 laki-laki dan 151.740 perempuan. Rasio jenis kelamin sebesar 100,55. Rasio jenis kelamin memperlihatkan banyaknya penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin 100,55 artinya jumlah penduduk laki-laki sebanding dengan penduduk perempuan. Penduduk Kota Cirebon dilihat dari komposisi umur, yang secara umum pada tahun 2013 terdiri dari kelompok penduduk berumur muda (penduduk yang berumur dibawah 15 tahun) sebesar 27,55%, kelompok umur produktif (berumur 15-64 tahun) sebesar 68,11%, dan kelompok umur lanjut usia (berumur 65 tahun ke atas) sebesar 4,34%. Dengan demikian struktur umur penduduk Kota Cirebon merupakan struktur transisi dari penduduk muda ke penduduk lanjut usia, karena kelompok umur muda proporsinya lebih rendah dari 40% dan kelompok umur tua belum mencapai 10% (ILPPD Kota Cirebon, 2013).

Penduduk Kota Cirebon tersebar di lima kecamatan. Kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Pekalipan sebesar 18,88 ribu jiwa/km², terpadat kedua adalah Kecamatan Kejaksan 11,89

ribu jiwa/km², kemudian Kecamatan Kesambi 8,86ribu jiwa/km², Kecamatan Lemahwungkuk 8,25 ribu jiwa/km², dan kepadatan penduduk terendah terdapat di Kecamatan Harjamukti hampir 5,9 ribu jiwa/km². Tabel 4.2 berikut ini menjelaskan secara rinci mengenai penduduk, luas wilayah, dan kepadatan penduduk per kilometer persegi menurut kecamatan pada tahun 2012:

Tabel 4.2 Penduduk, Luas Wilayah, dan Kepadatan Penduduk Per Kilometer Persegi Menurut Kecamatan Tahun 2012

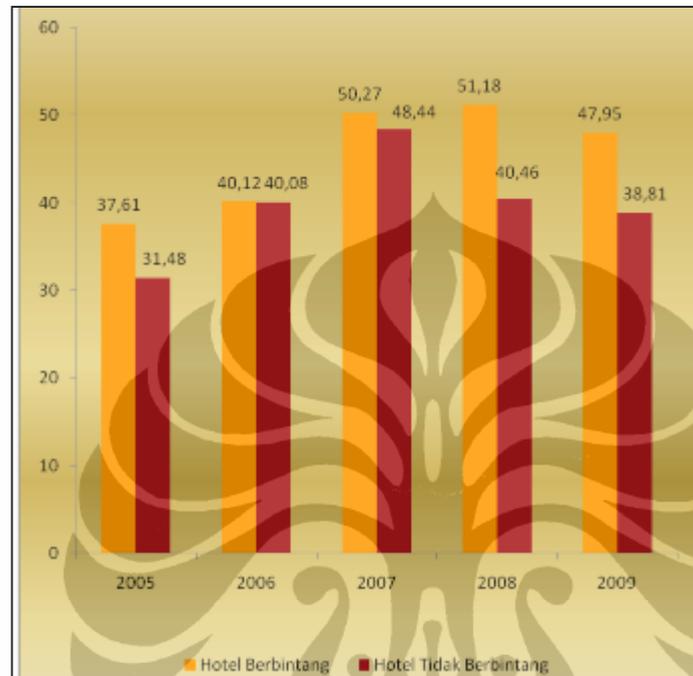
Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Penduduk	Kepadatan Penduduk per km ²
1. Harjamukti	17,62	104.001	5.904
2. Lemahwungkuk	6,51	53.759	8.258
3. Pekalipan	1,56	29.447	18.876
4. Kesambi	8,06	71.453	8.865
5.Kejaksan	3,62	43.060	11.895
Jumlah 2012	37,36	301.720	8.076
2011	37,36	300.434	8.042

Sumber: Data Olahan BPS 2013 dalam Cirebon Dalam Angka 2013

4.1.4 Kondisi Ekonomi

Kedudukan Kota Cirebon sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan kondisi geografis dan letak wilayah kota yang berada pada jalur persimpangan arus lalu lintas Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah, secara umum dapat mempengaruhi kondisi perekonomian ke arah perkembangan dan kemajuan. Beberapa sektor perekonomian yang menjadi potensi unggulan di Kota Cirebon dan memberi kontribusi penuh terhadap perekonomian secara makro terdapat pada sektor tersier, yaitu perdagangan, pengangkutan dan komunikasi, bank dan lembaga keuangan, sewa rumah, pemerintahan, serta jasa-jasa. Namun demikian, sektor perdagangan dan jasa merupakan sektor yang menjadi andalan bagi

perekonomian Kota Cirebon. Majunya kedua sektor ini dikarenakan letak geografis Kota Cirebon yang strategis. Kondisi tersebut memacu perkembangan perdagangan, jasa perhotelan dan pariwisata Kota Cirebon. Gambar 4.2 ini menjelaskan tingkat penghunian hotel di Kota Cirebon:



Gambar 4.2 Tingkat Penghunian Hotel di Kota Cirebon Tahun 2005-2009

Sumber: Data Olahan BPS Kota Cirebon 2013 dalam Cirebon Dalam Angka 2013

4.2 Gambaran Umum Pengelolaan Sampah di Kota Cirebon

Pengelolaan sampah di Kota Cirebon masih berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Kebersihan di Kota Cirebon. Namun demikian, seiring dengan dinamika waktu, Pemerintah Kota Cirebon terutama Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagai pelaksana teknis dalam pengelolaan sampah berpedoman juga pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Hal ini juga disampaikan oleh Sumanto sebagai Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan bahwa *“Kita mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.33 Tahun 2010 tentang Pedoman*

Pengelolaan Sampah terutama Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15” (wawancara mendalam dengan Sumanto, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cirebon, 21 Mei 2014, Pukul 15.00).

4.2.1 Kondisi Existing

Volume sampah di Kota Cirebon tahun 2011 menurut Badan Pusat Statistik Cirebon menyebutkan sebanyak 840 m³/hari dengan tingkat pelayanan pengangkutan sebesar \pm 80% (BPS Kota Cirebon, 2013). Sampah yang terangkut dari TPS ke TPA volume timbulannya adalah 692,76 m³. TPA Kopiluhur merupakan pemrosesan akhir sampah yang terletak di Kelurahan Argasanya Kecamatan Harjamukti. Adapun Karakteristik sampah Kota Cirebon berdasarkan data Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cirebon tahun 2013 adalah sebagai berikut :

- Organik sebanyak 455,29 Kg (43%)
- Kertas sebanyak 314,46 Kg (30%)
- Plastik sebanyak 281,59 Kg (26%)
- Kaca sebanyak 7 Kg (1%)
- Kain 0,87 Kg (0%)
- Karet sebanyak 0,56 Kg (0%)
- Logam sebanyak 2,98 Kg (0%)

4.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah di Kota Cirebon diantaranya jumlah TPS dan tersedianya alat yang digunakan. Hal tersebut mendukung pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Cirebon. Ketersediaan lahan TPS di tiap kelurahan atau kecamatan juga menjadi faktor penting dalam hal ini. Idealnya 1 TPS dialokasikan untuk 5 RW. Hal ini juga disampaikan oleh Agus Hasyim sebagai Kepala Bidang Kebersihan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cirebon bahwa “...1 TPS itu logikanya adalah 5 Rw. Kita di Kota Cirebon ada 247 Rw” (wawancara mendalam dengan Agus Hasyim, Kepala Bidang Kebersihan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cirebon, 21 Mei 2014, Pukul:

15.00). Kota Cirebon pada tahun 2012 memiliki 27 TPS yang tersebar di 5 kecamatan. TPS terbanyak terdapat di Kecamatan Kesambi yaitu 10 TPS. Sementara itu, Kecamatan Harjamukti yang menjadi lokasi penelitian peneliti hanya memiliki 4 TPS. Tabel 4.3 berikut ini menjelaskan jumlah TPS di Kota Cirebon pada periode 2009-2012.

Tabel 4.3 Jumlah Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) di Kota Cirebon Tahun 2009-2012

No.	Kecamatan	Jumlah TPS			
		2009	2010	2011	2012
1.	Harjamukti	3	4	3	4
2.	Lemahwungkuk	3	3	3	4
3.	Pekalipan	3	3	3	3
4.	Kesambi	10	10	8	10
5.	Kejaksan	6	6	4	6
Jumlah		26	26	21	27

Sumber: Data Olahan Dinas Kebersihan dan Pertamanan, BPS 2013

Kondisi TPS yang berada di Kecamatan Harjamukti juga sama seperti TPS lainnya yang berada di Kota Cirebon. Gambar 4.3 merupakan kondisi terkini dari salah satu TPS yang berada di Kecamatan Harjamukti. TPS pada gambar 4.3 merupakan TPS yang berada di Kecamatan Harjamukti yang bersebelahan dengan rumah penduduk dan pertokoan di Perumnas Kota Cirebon. TPS lain di Kota Cirebon juga kondisinya sama yaitu berdekatan dengan rumah penduduk dan ada juga yang di tepi jalan yang sering dilalui warga Kota Cirebon. Misalnya adalah TPS yang berada di Kecamatan Kesambi yang berada di tepi jalan.



Gambar 4.3 TPS di Kecamatan Harjamukti dan Kecamatan Kesambi

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2014

Sarana dan prasana selain TPS dan lahan TPS, peralatan operasional persampahan terutama untuk mengangkut sampah juga menjadi faktor yang mendukung lainnya dalam pengelolaan sampah di Kota Cirebon. Kota Cirebon memiliki peralatan berupa *arm roll* besar, *arm roll* kecil, *dump truck*, *pick up*, *container* besar, *container* kecil, kendaraan roda 3. *Container* kecil merupakan alat yang jumlahnya paling banyak disbanding lainnya yaitu 30. Tabel 4.4 merinci terkait jumlah peralatan berat operasional kebersihan di Kota Cirebon pada tahun 2009-2012.

Tabel 4.4 Jumlah Peralatan Berat Operasional Kebersihan di Kota Cirebon Tahun 2009-2012

No.	Nama Peralatan	Jumlah			
		2009	2010	2011	2012
1.	<i>Arm Roll Besar</i>	3	3	3	3
2.	<i>Arm Roll Kecil</i>	7	4	4	4
3.	<i>Dump Truck</i>	8	7	8	8
4.	<i>Pick Up</i>	5	3	4	4
5.	<i>Container Besar</i>	15	13	13	13
6.	<i>Container Kecil</i>	40	30	30	30
7.	Kendaraan Roda 3	3	6	10	10

Sumber: Data Olahan Dinas Kebersihan dan Pertamanan, BPS 2013

4.3 Regulasi Pengelolaan Sampah di Kota Cirebon

Regulasi pengelolaan sampah di Kota Cirebon mengacu pada Peraturan Daerah Nomor Kota Cirebon 2 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Kebersihan di Kota Cirebon. Namun demikian pengelolaan sampah di Kota Cirebon juga dilihat dari RTRW Kota Cirebon Tahun 2011-2031 yang disebutkan dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cirebon Tahun 2011-2031. Selain itu, Pemerintah Kota Cirebon juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah.

4.3.1 Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan di Kota Cirebon

Kebijakan pengelolaan sampah di Kota Cirebon saat ini masih menggunakan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Kebersihan di Kota Cirebon. Hal yang utama mengenai

persampahan dijelaskan dalam Bab IV tentang Pengelolaan Kebersihan pada Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6. Sistem pengelolaan sampah di Kota Cirebon menggunakan mekanisme Mikro dan Makro. Mekanisme Mikro dan makro dijelaskan dalam Pasal 5 yaitu:

- (1) Pengelolaan kebersihan dimulai dari:
 - a. Penyapuan halaman, persil, jalan, gang, saluran drainase/limbah;
 - b. Terjadinya produksi sampah oleh warga;
 - c. Pengumpulan pada tempat pembuangan sampah lokal (persil) atau dimusnahkan (dibakar);
 - d. Pengumpulan pada tempat pembuangan sementara;
 - e. Pembuangan pada tempat pembuangan akhir sampah;
 - f. Kemungkinan pemanfaatan kembali sampah (daur ulang);
- (2) Mekanisme pengelolaan kebersihan dibagi menjadi:
 - a. Di tingkat Mikro

Adalah pengelolaan kebersihan di lingkungan-lingkungan pemukiman. Di pusat-pusat kegiatan usaha, industri dilaksanakan secara swadaya oleh masyarakat (RT/RW) dan pengusaha dengan biaya, sarana, personil, dan pengorganisasian sepenuhnya dari dan untuk masyarakat sendiri melalui musyawarah. Pada tingkat mikro ini, sampah dari rumah-rumah diangkut hingga tempat pembuangan sementara yang disediakan oleh Pemerintah Kota di lokasi-lokasi tertentu, untuk pusat-pusat kegiatan usaha baik pemerintah/swasta yang memproduksi sampah dalam volume yang besar, minimal 2,5 m³ atau lebih setiap hari seperti industri, pusat pertokoan/swalayan/toserba, pasar, rumah sakit, terminal dan sejenisnya membuang sendiri sampahnya langsung di tempat pembuangan akhir atau melalui jasa pengangkutan sampah dari Dinas.
 - b. Di tingkat Makro

Adalah pengelolaan kebersihan di tingkat kota dan pengangkutan sampah dari TPS ke tempat pembuangan akhir (TPA), yang mencakup pembiayaan, personil, sarana dan prasarana dan pengorganisasian yang sepenuhnya dilaksanakan oleh Dinas.

Mekanisme Mikro dan Makro dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4.4 Pengelolaan Sampah Kota Cirebon

Sumber: KLH, 2013 *telah diolah kembali

4.3.2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah merupakan kebijakan nasional mengenai persampahan. Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah Kota mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional tersebut. Hal utama dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah adalah pengurangan sampah dan penanganan sampah dengan cara memilah, mendaur ulang, dan memanfaatkan kembali sampah yang berwawasan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan nasional telah mengupayakan pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan sampah.

Upaya pembangunan berkelanjutan juga sebenarnya sudah tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Kebersihan di Kota Cirebon. Namun hal tersebut masih belum dijelaskan secara rinci mengenai pengelolaan 3R (*reduce, reuse, recycle*) seperti

hal nya dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pada akhirnya Pemerintah Daerah Kota Cirebon tetap merujuk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah karena masih terdapat kekurangan dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Kebersihan di Kota Cirebon.

4.3.3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah merupakan kebijakan turunan dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pengelolaan sampah dijelaskan secara rinci dalam Bab II Pengelolaan Sampah yang terdiri dari Bagian Kesatu tentang Perencanaan, Bagian Kedua tentang Pelaksanaan, Bagian Ketiga tentang Lembaga Pengelola, Bagian Keempat tentang Insentif dan Disinsentif, Bagian Kelima tentang Kerjasama dan Kemitraan. Hal penting dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah adalah pengurangan dan penanganan sampah dengan cara memilah sampah, memanfaatkan hasil daur ulang dan guna ulang sampah bukan berorientasi kepada mekanisme kumpul-angkut-buang.

Mekanisme kumpul-angkut-buang juga masih terjadi di Kota Cirebon sehingga Pemerintah Daerah Kota Cirebon juga berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah untuk petunjuk teknis di lapangan. Pada akhirnya Pemerintah Daerah Kota Cirebon dalam melaksanakan pengelolaan sampah yang pembangunan berkelanjutan tetap melihat secara keseluruhan kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah. Hal ini dikarenakan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Kebersihan yang masih belum dapat mengcover hal-hal yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

BAB 5

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN DI KOTA CIREBON DALAM UPAYA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI KOTA CIREBON (STUDI KASUS KECAMATAN HARJAMUKTI)

Bab ini mendeskripsikan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Cirebon menurut teori Mazmanian dan Sabatier yang dilihat dari karakteristik masalah, karakteristik kebijakan dan lingkungan kebijakan. Bab ini juga menjelaskan tentang upaya pembangunan berkelanjutan dari pengelolaan sampah di Kota Cirebon dilihat dari perspektif ekonomi, sosial, lingkungan. Selain itu juga bab ini menjelaskan hambatan dalam pengelolaan sampah di Kota Cirebon.

5.1 Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Kebersihan di Kota Cirebon

Kebijakan pengelolaan sampah di Kota Cirebon merupakan alat untuk mencapai tujuan pengelolaan sampah yang baik. Sampah dalam hal ini merupakan suatu masalah yang harus diatasi oleh Pemerintah Kota Cirebon. Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang kompleks dalam pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan implementasi kebijakan melibatkan berbagai tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam pemerintahan. Berbagai pihak yang terkait merupakan aktor-aktor yang berperan dalam penting dalam mencapai tujuan kebijakan. Adapun implementasi kebijakan menurut teori Mazmanian dan Sabatier adalah sebagai berikut:

5.1.1 Karakteristik Masalah Dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Kebersihan di Kota Cirebon

Karakteristik masalah mendeskripsikan hal-hal yang berkaitan dengan tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan, tingkat kemajemukan

dari kelompok sasaran, proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi, cakupan perubahan perilaku yang diharapkan. Berikut ini penjelasan lebih lanjut.

5.1.1.1 Tingkat Kesulitan Teknis dari Masalah yang Bersangkutan

Pengelolaan sampah di Kota Cirebon bertujuan untuk menciptakan proses pengelolaan sampah dan kebersihan yang tepat guna, tepat sasaran dan bermanfaat dengan memberikan peluang usaha kepada masyarakat untuk mendaur ulang sampah. Namun masalah yang kemudian nampak dan berkaitan dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Kebersihan di Kota Cirebon adalah berhubungan dengan masyarakat. Masyarakat sebagai pihak yang menerima pelayanan kebersihan dari Pemerintah Kota Cirebon juga dituntut untuk berperan serta dalam pengelolaan sampah di Kota Cirebon. Adapun dalam hal ini, peneliti mengklasifikasikan masyarakat ke dalam masyarakat yang aktif dan masyarakat yang pasif.

Masyarakat aktif merupakan masyarakat yang turut serta dalam mensukseskan implementasi Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Kebersihan di Kota Cirebon. Masyarakat aktif disini merupakan pihak *pioneer* dalam upaya pengurangan sampah dengan konsep 3R (*reduce, reuse, recycle*). Konsep 3R sendiri tidak dijelaskan secara rinci dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Kebersihan di Kota Cirebon. Dalam Peraturan daerah tersebut hanya dijelaskan mengenai partisipasi masyarakat dalam hal pengadaan sarana/prasaranakebersihan yang berupa alat-alat kebersihan dan tempat-tempat sampah umum serta alat-alat pemusnah sampah.

Saat ini terdapat 2 kelurahan yang sudah melakukan pengelolaan sampah dalam bentuk bank sampah yaitu Kelurahan Kecapi dan Kelurahan Larangan yang berada di Kecamatan Harjamukti. Hal ini juga disampaikan oleh Hendra Irawan sebagai Kepala Konservasi dan Pemulihan KLH Kota Cirebon bahwa “*Nah di Rw.08 Larangan juga dari sampah bisa menghasilkan uang, Rw.17 Larangan juga menghasilkan uang. di Rw Kecapi juga ada yang menghasilkan uang*” (wawancara mendalam dengan Hendra Irawan, Kepala Konservasi dan Pemulihan KLH Kota Cirebon, 12 Mei 2014, Pukul 10.30). Kelurahan yang sudah

melaksanakan bank sampah ini merupakan bentuk manifestasi dari yang sudah disosialisasikan oleh pihak Kantor Lingkungan Hidup kepada masyarakat. Namun demikian, masyarakat yang melakukan pengurangan sampah secara signifikan dengan konsep 3R (*reduce, reuse, recycle*) adalah masyarakat Rw 08 Merbabu Asih Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti hingga mengurangi sampah $8m^3$ per minggu. Hal ini juga disampaikan oleh Agus Supriyono sebagai Ketua KSM Secerah Pagi bahwa “...Kami mereduksi ini $8m^3$ per minggu” (wawancara mendalam dengan Agus Supriyono, 19 Mei 2014, Pukul 16.35). Reduksi sampah tersebut dilakukan oleh masyarakat Rw 08 Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti dikarenakan kesadaran beberapa pihak mengenai pentingnya mengelola sampah dan kesadaran bahwa TPS dan TPA di lingkungannya tidak akan cukup menampung sampah karena semakin bertambah setiap harinya seiring bertambahnya jumlah penduduk dan perumahan di Kecamatan Harjamukti. Beberapa pihak ini mampu mendorong masyarakat lainnya agar melakukan pengurangan sampah dengan cara memilah dan memilih sampah, melakukan *composting* dan membuat kerajinan daur ulang.

Masyarakat aktif lainnya merupakan kelompok masyarakat yang mencari keuntungan dari adanya sampah. Salah satu contoh dalam hal ini adalah para pemulung di sekitar TPA Kopiluhur. Para pemulung ini mengambil keuntungan dari sampah dengan memilah beberapa sampah yaitu plastik, botol, kardus dan lain-lain serta kemudian dijual kepada pengepul sampah di sekitar TPA Kopiluhur. Hal ini disampaikan oleh Nunung Nurhayati sebagai Kader PKK Rw 08 Rt 01 Kelurahan Argasunya bahwa:

“...Anak kecil uda pada punya Hp, punya motor karena udah menghasilkan dari sampah itu. Orang yang ngambilin sampah itu pada kaya. Contohnya kan ada yang nemu emas, ada yang nemu uang, ada yang nemu Hp. Ya lumayanlah katanya gitu. Baru-baru sekarang nemu emas dapet dua juta lebih ya dari sampah itu, makanya pada kaya. Pokoknya kaya lah, ada yang nemu dolar. Gak kaya juga tapi cukup, ari kayakan tergantung ukuran orang” (wawancara mendalam Nunung Nurhayati, Kader PKK Rw.08 Rt.01 Kelurahan Argasunya, 21 Mei 2014, Pukul 11.30)

Para pemulung sampah tersebut secara tidak langsung termasuk dalam kelompok yang telah memilah sampah meskipun keuntungannya hanya untuk individu masing-masing.

Hal di atas berbeda dengan masyarakat pasif dalam pengelolaan sampah. Berdasarkan pengamatan peneliti, masyarakat pasif adalah masyarakat yang merasakan dampak pengelolaan sampah atau masyarakat yang hanya mengandalkan Pemerintah Kota baik untuk pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah. Peneliti menanyakan kepada narasumber yang berada di sekitar TPA Kopiluhur Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti bahwa sebenarnya masyarakat sekitar TPA Kopiluhur merasa terganggu dengan adanya pengelolaan dan pemrosesan akhir di sekitar tempat tinggalnya. Hal ini dikarenakan masyarakat tersebut tidak mau area tempat tinggal tercemar dengan adanya polusi udara yaitu bau yang tidak sedap.

Masyarakat pasif yang berada di Kelurahan Argasunya ini tidak mendapat pelayanan dari Pemerintah Kota berupa pengangkutan sampah. Hal ini dikarenakan wilayahnya berdekatan dengan TPA Kopiluhur sehingga diharapkan dapat membuang langsung ke TPA Kopiluhur. TPS yang terdekat dari wilayah Argasunya pun ternyata harus menempuh perjalanan jauh ke Kelurahan Larangan dan Kelurahan Harjamukti karena memang hanya terdapat 2 TPS di Kecamatan Harjamukti. Hal ini mengakibatkan masyarakat di sekitar TPA Kopiluhur Kelurahan Argasunya melakukan pengelolaan sampah dengan cara dibakar di belakang rumah atau kebun di sekitar rumahnya. Pernyataan tersebut didukung pernyataan yang disampaikan oleh Nunung Nurhayati sebagai Kader PKK Rw 08 Rt 01 Kelurahan Argasunya bahwa:

“Ada. Cuma kan bikin galian sampah kan, liat sendiri tanah disini kan cadas (menunjuk halaman rumah), jadi ya keras. Kalo perempuan kan susah lagi jadi gak mungkin harus pake alat, kalo laki-laki kan susah disuruhnya. Jadi udah aja dibakar” (wawancara mendalam dengan Nunung Nurhayati, Kader PKK Rw.08 Rt.01 Kelurahan Argasunya, Pukul 11.30)

Pengelolaan sampah dengan cara dibakar sebenarnya termasuk kedalam bentuk pelanggaran dalam mengelola sampah. Hal ini juga seperti tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan

Kebersihan di Kota Cirebon Pasal 3 Huruf (i) bahwa pengenaan sanksi atas pelanggaran yang terjadi. Namun pengenaan sanksi ini cenderung sulit untuk dilaksanakan dan terkesan tidak ada ketegasan dari pemerintah. Hal ini juga disampaikan oleh Sumanto sebagai Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan bahwa *“Masyarakat yang buang sampah sembarangan atau mengelola dengan tidak semestinya harusnya ada sanksi. Penerapan sanksi kurungan atau pidana ini masih mikir-mikir, karena sampah akhirnya mereka diberikan sanksi seperti itu”* (wawancara mendalam dengan Sumanto, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cirebon, 21 Mei 2014, Pukul 15.00). Pemberian sanksi pun belum dapat dilaksanakan karena kebijakan pengelolaan sampah belum kuat dilihat dari kesesuaian peraturan daerah dengan Undang-Undang.

Pengelolaan sampah dengan cara dibakar tersebut bukan karena masyarakat tidak mengetahui tentang konsep 3R (*reduce, reuse, recycle*). Pemerintah telah melakukan sosialisasi atau pelatihan mengenai konsep 3R sekaligus dengan praktek membuat kerajinan daur ulang. Pemerintah yang dimaksud dalam hal ini adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Kesehatan dan Kantor Lingkungan Hidup. Namun demikian, dikarenakan pelatihan yang minim selama 2 hari akhirnya masyarakat tidak dapat mengaplikasikan pelatihan yang diberikan oleh pemerintah. Selain itu, pemerintah bekerjasama dengan swasta melalui CSR memberikan bantuan berupa mesin jahit untuk membuat kerajinan daur ulang. Namun hal ini tidak efektif dilakukan karena pelatihan yang diberikan cenderung singkat dan tidak simultan. Hal ini juga disampaikan oleh Nunung Nurhayati sebagai Kader PKK Rw 08 Rt 01 Kelurahan Argasunya bahwa:

“Padahal kan itu dari pemerintahnya harus bikin tas dari plastik-plastik gitu. Ya cuman orang disini mah gak ngeh tuh. Cara bikinnya gimana-gimana tuh gatau. Sedangkan pelatihannya aja kan 2 hari. 2 hari orang masih awam kan belum bisa jadi kan belum masuk. Jadi mereka mikir buat apa nih mesin gak bisa dimanfaatin” (wawancara mendalam dengan Nunung Nurhayati, Kader PKK Rw.08 Rt.01 Kelurahan Argasunya, 21 Mei 2014, Pukul 11.30).

Pelatihan yang cenderung singkat dan tidak simultan tersebut pada akhirnya membuat masyarakat tidak mengetahui apa yang harus dilakukan dengan bantuan

mesin jahit yang telah diberikan. Hal ini mengakibatkan masyarakat menjual mesin jahit tersebut.

Adanya masyarakat yang aktif dan pasif dalam pengelolaan sampah tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi akan pentingnya pengelolaan sampah kepada masyarakat serta sosialisasi tersebut tidak menarik. Hal ini juga disampaikan oleh Aty Hermawaty sebagai Kasub Bidang Perencanaan Pengembangan Kawasan Perkotaan, Lingkungan Hidup dan Pertanahan bahwa:

“Iya kurang, atau mungkin bentuk sosialisasinya yang kurang menggugah gitu ya. Kalo hanya jangan buang sampah ya nanti menyebabkan banjir. Ya mungkin perlu dicari teknik sosialisasi yang lebih baik, menggugah hatinya warga untuk sadar bahwa sampah tidak kita minimalkan sampahnya akan membebani lingkungan, lingkungan tercemar. Nanti efeknya juga akan ke kesehatan anak dan keluarga, misalnya banyaknya penyakit akibat lingkungan yang kotor. Hal itu sudah kita sampaikan cuman bentuknya kurang menarik gitu. Mungkin harus dicari media sosialisasi yang baik” (wawancara mendalam dengan Aty Hermawaty, Kasub Bidang Perencanaan Pengembangan Kawasan Perkotaan, Lingkungan Hidup dan Pertanahan Bappeda Kota Cirebon, 14 Mei 2014, Pukul 14.00).

Sosialisasi yang kurang serta tidak menarik mengakibatkan masyarakat juga enggan untuk mengurangi sampah di tingkat sumber sampah dengan konsep 3R (*reduce, reuse, recycle*). Pelatihan dan sosialisasi ini merupakan tugas pokok dan fungsi dari Kantor Lingkungan Hidup terutama Bidang Konservasi dan Pemulihan. Kantor Lingkungan Hidup mempunyai program-program pengurangan sampah misalnya bank sampah, *composting*, sosialisasi 3R (*reduce, reuse, recycle*) dan hal lainnya yang bersifat pelatihan dan sosialisasi dalam rangka pengurangan sampah. Sementara Dinas Kebersihan dan Pertamanan berperan dalam hal teknis seperti pengangkutan sampah, sarana dan prasarana kebersihan, penyapuan jalan dan lainnya. Oleh karena itu, pihak yang berperan dalam pengurangan sampah di tingkat sumber sampah adalah Kantor Lingkungan Hidup. Kantor Lingkungan Hidup harus melakukan langkah-langkah sosialisasi yang intensif dan menarik serta dapat diterima untuk seluruh kelompok masyarakat. Hal ini bertujuan agar lebih banyak lagi masyarakat yang mengelola sampah dengan konsep 3R (*reduce, reuse, recycle*).

5.1.1.2 Tingkat Kemajemukan dari Kelompok Sasaran

Kemajemukan masyarakat juga merupakan hal yang menjadi masalah dalam pengelolaan sampah. Masyarakat Kota Cirebon baik secara keseluruhan di tingkat kota maupun di tingkat kecamatan atau kelurahan yaitu masyarakat yang bersifat heterogen. Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Kebersihan di Kota Cirebon menjadi lebih sulit dilakukan karena tingkat pemahaman setiap anggota kelompok masyarakat terhadap kebijakan relatif berbeda. Komunitas KSM Secerah Pagi merupakan kelompok masyarakat di Rw 08 Merbabu Asih Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti yang bersifat heterogen. Hal tersebut dapat dilihat pada status pendidikan, ekonomi, agama dan sosial pada masyarakat Rw 08 Merbabu Asih Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti. Perbedaan tersebut mengakibatkan pemahaman dan kesadaran untuk mengelola sampah di tingkat sumber sampah menjadi relatif berbeda. Hal ini juga didukung pernyataan Agus Supriyono sebagai Ketua KSM Secerah Pagi bahwa *“Meskipun ketika heterogen, strata ekonomi, pendidikan mempengaruhi, saya harus berada dimana. Tidak bisa saya berbicara ilmiah kepada masyarakat yang strata ekonominya di bawah”*(wawancara mendalam dengan Agus Supriyono, Ketua KSM Secerah Pagi, 19 Mei 2014, Pukul 16.35). *Pioneer* atau motivator kelompok masyarakat disini yang harus dapat menempatkan diri di tengah-tengah kelompok masyarakat yang heterogen. Hal ini dilakukan agar penyampaian dan pelatihan terkait pengelolaan sampah dengan konsep 3R dapat diterima oleh semua anggota masyarakat.

Kemajemukan masyarakat tersebut mengakibatkan masih sedikitnya masyarakat yang telah benar-benar melakukan pengelolaan sampah di tingkat sumber sampah. Komunitas KSM Secerah Pagi ini merupakan kelompok masyarakat yang dianggap berhasil dalam pengurangan sampah dengan cara memilah dan memilih sampah, *composting*, kerajinan daur ulang dan bank sampah. Hal ini dikarenakan peran *pioneer* Rw 08 Merbabu Asih Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti bersifat aktif dan efektif untuk mengajak masyarakat selama 5 tahun untuk mengelola sampah dengan konsep 3R.

5.1.1.3 Proporsi Kelompok Sasaran Terhadap Total Populasi

Keberhasilan komunitas KSM Secerah Pagi ini juga dikarenakan kelompok masyarakat yang relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Cirebon. Kelompok sasaran dan total populasi dalam hal Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Kebersihan di Kota Cirebon adalah masyarakat Kota Cirebon. Hal ini mengakibatkan proporsinya sama besar dan tidak dapat dilihat perbedaan keefektifannya. KSM Secerah Pagi Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti merupakan kelompok sasaran yang lebih kecil dan lebih efektif dan cenderung siap untuk melaksanakan tujuan kebijakan pengelolaan sampah dengan konsep 3R. Kelompok-kelompok sasaran seperti ini yang seharusnya pemerintah Kota Cirebon maksimalkan. Meskipun demikian, sebenarnya KSM Secerah Pagi turut serta melakukan upaya sosialisasi dan pelatihan *composting*, bank sampah dan kerajinan daur ulang kepada Rw lainnya, kelurahan lainnya dan kecamatan lain di luar Kecamatan Harjamukti. Namun hal tersebut tidak akan efektif jika tidak ada masyarakat sebagai *pioneer* atau *implementor* dalam pengelolaan sampah dengan konsep 3R (*reduce, reuse, recycle*). Hal ini juga didukung pernyataan Dani Komara sebagai Sekretaris KSM Secerah Pagi bahwa “*Ya ada juga seperti Rw.08 ya tapi sepertinya butuh motivator. Disini juga kalo sudah agak melempem, Pak Rw juga berperan sebagai motivator. Yah namanya orang tidak selalu semangat*” (wawancara mendalam dengan Dani Komara, Sekretaris KSM Secerah Pagi, 21 Mei 2014, Pukul 18.30). Berdasarkan pengamatan peneliti, pelaksanaan pengelolaan sampah dengan konsep 3R (*reduce, reuse, recycle*) lebih efektif jika unit pemerintah terkecil yaitu kelurahan melalui LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) mengkoordinasikan dengan pemimpin masyarakat seperti Ketua Rt atau Ketua Rw. Kelurahan dapat merencanakan dan melaksanakan sendiri pengelolaan sampah karena memiliki anggaran yang berasal dari LPM maupun bantuan keuangan pemerintah kota melalui musrenbang.

Oleh karena itu, KSM Secerah Pagi Kelurahan Larangan melaksanakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat atau *Community Based Development* (CBD) yang anggarannya dibantu dari LPM Kelurahan Larangan. Selain itu juga Kelurahan Larangan merupakan kelurahan yang dijadikan titik pantau dalam

beberapa lomba kelurahan atau lomba kebersihan lainnya di Kecamatan Harjamukti. Hal ini juga disampaikan oleh Agus Supriyono sebagai Ketua Komunitas KSM Secerah Pagi bahwa:

“...Mereka betul-betul atensi akhirnya mengantarkan Juara 1 Provinsi lomba kelurahan dengan titik pantau nya disini, PKKKBS ya disini, Posyandu terbaik ya disini. Karena ketika berbicara PKK dan Posyandu maka hubungannya dengan Lingkungan Bersih dan Sehat (LBS) dan Perilaku Hidup Sehat (PHS)” (wawancara mendalam dengan Agus Supriyono, Ketua Komunitas KSM Secerah Pagi, 19 Mei 2014, Pukul 16.35).

Keberhasilan pengelolaan sampah di Kelurahan Larangan tersebut belum komprehensif di Kecamatan Harjamukti. Namun relatif lebih baik jika dibanding kecamatan lainnya di Kota Cirebon.

5.1.1.4 Cakupan Perubahan Perilaku yang Diharapkan

Pengelolaan sampah dengan konsep 3R (*reduce, reuse, recycle*) ini merupakan suatu pemahaman dan pengetahuan yang sebenarnya sudah diketahui masyarakat secara umum. Namun hal ini terkadang masih sulit dilaksanakan oleh masyarakat karena terkait perilaku sehari-hari masyarakat dalam mengelola sampah. Hal ini juga didukung oleh Suwarso Budi Winarno sebagai Camat Kecamatan Harjamukti bahwa:

“Sebenarnya peran mereka kan di rumah, memisahkan mana sampah organik, anorganik, sampah B3. Kalo mau punya komposter sederhana di rumah kan. Jadi yang bisa dibikin kompos taruh di tempat kompos, yang B3 dipilahin baru dibuang, yang bermanfaat dipilah-pilah lalu dijual ke tukang rongsok atau dikirim ke bank sampah. Sebenarnya idealnya begitu. Tapi kan masyarakat belum ngerti. ini kan lebih penting lagi bagaimana masyarakat mengerti bukan sekedar pengetahuan” (wawancara mendalam dengan Suwarso Budi Winarno, Camat Kecamatan Harjamukti, 21 Mei 2014, Pukul 10.05).

Berdasarkan pernyataan tersebut, peran yang lebih efektif untuk masyarakat mengurangi sampah adalah ketika memilah dan memilih sampah rumah tangga, memisahkan sampah organik untuk dijadikan kompos. Alat teknologi seperti *composter* pun dapat dibuat secara sederhana. Namun demikian, hal-hal tersebut harus didukung perilaku masyarakat yang cenderung untuk mau dan siap dalam keseharian masyarakat. Hal ini dikarenakan perubahan perilaku masyarakat dalam membuang dan mengelola sampah perlu waktu yang panjang karena bukan saja

terkait pengetahuan yang diterima mengenai cara mengelola sampah namun juga kesadaran untuk melaksanakan yang sudah disosialisasikan.

5.1.2 Karakteristik Kebijakan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Kebersihan di Kota Cirebon

Karakteristik kebijakan mencakup hal-hal seperti kejelasan isi kebijakan, seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis, besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan tersebut, seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana, kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana, tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan, seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan. Berikut penjelasannya.

5.1.2.1 Kejelasan Isi Kebijakan dan Dukungan Teoritis Kebijakan

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Kebersihan di Kota Cirebon terdapat sepuluh bab yaitu Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Pengelolaan Kebersihan, Partisipasi Masyarakat, Jadwal Pengangkutan Sampah, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Pidana, Penyidikan, dan Ketentuan Penutup. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Kebersihan di Kota Cirebon tersebut jika dikaitkan dengan upaya pembangunan berkelanjutan maka kebijakan ini belum secara jelas mengatur pelaksanaan pengelolaan sampah dalam upaya pembangunan berkelanjutan. Hanya 2 pasal saja yang menyebutkan tentang pemilahan sampah dan pemanfaatan kembali sampah yaitu Pasal 5 dan Pasal 6. Masih banyak hal yang belum dijelaskan mengenai keharusan pemda dalam menyusun rencana pengurangan sampah pada sumber sampah dan dalam menangani sampah harus ada proses pemilahan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA; insentif dan disinsentif kepada lembaga yang telah melakukan inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan keharusan pemda memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat negatif yang ditimbulkan oleh penanganan sampah di TPA berupa: relokasi, pemulihan lingkungan, biaya kesehatan dan pengobatan, ganti rugi.

Kebijakan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Kebersihan di Kota Cirebon dapat dikatakan belum sesuai apabila berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah dan juga Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Hal ini dikarenakan dukungan teoritis pada tahun 2002 yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cirebon melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan serta DPRD Kota Cirebon berpedoman pada kondisi lingkungan saat itu. Pengelolaan sampah hingga saat ini yang cenderung dinamis seiring semakin meningkatnya volume sampah di kecamatan maka peraturan tersebut juga harus mengikuti kondisi lingkungan. Pada akhirnya Pemerintah Kota Cirebon melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah. Beberapa hal yang tidak disebutkan dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Kebersihan di Kota Cirebon, maka akan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah. Hal ini juga disampaikan oleh Sumanto sebagai Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan bahwa *“Pengelolaan sampah itu kita akan mengarahnya kepada pembagian tugas sesuai dengan fungsi kelembagaan. Kita mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah terutama Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15”* (wawancara mendalam dengan Sumanto, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cirebon, 21 Mei 2014, Pukul 15.00).

5.1.2.2 Alokasi Sumberdaya Finansial dan Dukungan Berbagai Institusi Pelaksana

Implementor Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Kebersihan di Kota Cirebon adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cirebon, Kantor Lingkungan Hidup Kota Cirebon, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) TPA Kopiluhur, kelurahan dan kecamatan serta masyarakat. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cirebon dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas-Dinas Daerah Pada Pemerintah Daerah Kota Cirebon. Oleh

karena itu, kewenangan Dinas Kebersihan dan Pertamanan di Kota Cirebon tidak hanya dalam bidang persampahan, namun juga dalam bidang pertamanan dan pemakaman. Namun demikian, alokasi anggaran dalam bidang persampahan tetap lebih besar dibanding alokasi anggaran untuk pertamanan dan pemakaman. Hal ini disampaikan juga oleh Sumanto sebagai Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cirebon bahwa “...sekitar 60% persampahan dan 40% pertamanan dan pemakaman” (wawancara mendalam dengan Sumanto, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cirebon, 21 Mei 2014, Pukul 15.00). Hal ini menyebabkan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cirebon merupakan unsur pelaksana otonomi daerah bidang pekerjaan umum sub bidang persampahan.

Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas-Dinas Daerah Pada Pemerintah Daerah Kota Cirebon disebutkan bahwa untuk pengelolaan sampah terdiri atas Bidang Kebersihan, Bidang Sarana dan Prasarana Persampahan dan UPTD TPA. Bidang Kebersihan meliputi kebersihan jalan dan saluran, angkutan persampahan dan retribusi persampahan. Sementara itu Bidang Sarana dan Prasarana Persampahan meliputi sarana dan prasarana angkutan dan tempat penampungan sementara. Penyapuan jalan juga termasuk tugas yang dibawah bidang kebersihan. Sumber Daya Manusia untuk penyapuan jalan ini termasuk ke dalam tenaga *outsourcing*. Tenaga *outsourcing* tersebut untuk menutupi kekurangan Sumber Daya Manusia dalam bidang kebersihan di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cirebon.

Selain Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cirebon, *implementor* lainnya dalam pengelolaan sampah adalah UPTD TPA Kopiluhur yang terletak di Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti. UPTD TPA Kopiluhur merupakan pihak yang dibawah langsung oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cirebon. UPTD Tempat Pemrosesan Akhir sebagai unsur pelaksana teknis dinas mempunyai tugas pokok memberi petunjuk membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengoreksi, mengawasi, merencanakan dan melaksanakan kegiatan teknis operasional urusan pengelolaan tempat pemrosesan akhir (Bagian Administrasi UPTD TPA Kopiluhur, 2013). UPTD TPA Kopiluhur total memiliki

13 orang pegawai dengan rincian sebagai berikut: 1 orang sebagai Kepala UPTD TPA; 1 orang sebagai TU UPTD; 7 orang sebagai pelaksana lapangan yang bertugas dalam pemeliharaan alat berat, pencatatan buangan jumlah sampah, operator alat berat dan lainnya; 4 orang sebagai petugas keamanan yang masih honorer (Bagian Administrasi UPTD TPA Kopiluhur, 2014).

Pembiayaan atas pelaksanaan pemrosesan akhir sampah di UPTD TPA Kopiluhur dan pegawai honorer serta *maintenance* alat-alat pemrosesan akhir sampah berasal dari alokasi anggaran yang sudah ditentukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cirebon. Hal ini mengakibatkan anggaran yang dikeluarkan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cirebon adalah besar untuk membayar tenaga *outsourcing*, operasional pengangkutan sampah misalnya bahan bakar dan UPTD TPA Kopiluhur. Oleh karena itu, alokasi anggaran untuk persampahan persentasenya lebih besar dibanding untuk pertamanan dan pemakaman. Namun dari alokasi anggaran yang telah disebutkan, alokasi anggaran untuk bahan bakar atau BBM lebih besar dibanding lainnya. Hal ini didukung pernyataan Sumanto sebagai Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cirebon bahwa "...Itu bukan BBM yang subsidi karena tidak ada kebijakan yang mendukung. Jadi kita itu menggunakan 30% untuk BBM saja. Misal anggaran 2 Milyar, 30% dari 2 milyar adalah 600 juta"(wawancara mendalam dengan Sumanto, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cirebon, 21 Mei 2014, Pukul 15.00). Selain untuk bahan bakar pengangkutan sampah, ternyata bahan bakar juga digunakan untuk proses *incineration* yang dilakukan di Jalan Rajawali Kota Cirebon. Setiap harinya membutuhkan bahan bakar sejumlah 30 liter untuk membakar sampah. Hal ini juga didukung pernyataan Sumanto sebagai Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cirebon bahwa "...Tapi untuk mengurangi sampah kan kita make incinerator, wah itu make BBM nya besar sekali. 1 jam pertama itu 30 liter. 1 kali pembakaran untuk tiap harinya"(wawancara mendalam dengan Sumanto, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cirebon, 21 Mei 2014, Pukul 15.00).

Implementor Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Kebersihan di Kota Cirebon selanjutnya adalah Kantor Lingkungan Hidup (KLH). Kantor Lingkungan Hidup mempunyai tugas dan

wewenang pengurangan sampah di tingkat sumber sampah. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Hendra Irawan sebagai Kepala Bidang Konservasi dan Pemulihan Kantor Lingkungan Hidup Kota Cirebon bahwa:

“Kami mempunyai tugas pokok, boleh dikatakan gini ya, boleh saya jelasin (mengambil kertas kemudian menggambar mind map). Ini masyarakat, ini pembuang sampah berarti pengumpul ya ke TPS, TPS ke TPA kan. Kami berusaha mengurangi sampah yang berada disini (sambil menunjuk kotak yang bertuliskan masyarakat) sehingga TPS yang ini akan tidak terlalu padat banget dengan syarat prinsip 3R terus bank sampah dan sudah berjalan juga sodaqoh sampah semacam sampah tertentu, seperti di Rw di belakang itu kebetulan, sodaqoh sampah plastik” (wawancara mendalam dengan Hendra Irawan, Kepala Konservasi dan Pemulihan KLH Kota Cirebon, 8 Mei 2014, Pukul 14.45)

Berdasarkan hal tersebut, maka peran Kantor Lingkungan Hidup berhubungan langsung dengan masyarakat. Kantor Lingkungan Hidup juga turut memberikan bantuan kepada masyarakat yang aktif dalam hal pengurangan sampah seperti yang dilakukan di Rw 08 Merbabu Asih Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti dengan memberikan bantuan berupa mesin pencacah sampah plastik. Peran Kantor Lingkungan Hidup lainnya adalah membantu DKP dalam penambahan fasilitas pemilahan sampah seperti tempat sampah yang terdiri dari sampah organik, sampah nonorganik dan sampah berbahaya (B3) yang bekerjasama dengan CSR di Kota Cirebon. Hal ini disampaikan juga oleh Dani Komara sebagai Sekretaris Komunitas KSM Secerah Pagi bahwa:

“...selain itu juga dapat bantuan dari KLH berupa 1 unit mesin pencacah sampah plastik bening dibuat jadi biji-biji plastik. Selain itu KLH juga memberikan 3 jenis tempat sampah untuk sampah organik, anorganik dan B3. Tapi Saya lihat KLH juga memberikan tempat sampah ke kelurahan lainnya soalnya Saya lihat di jalan-jalan juga ada” (wawancara mendalam dengan Dani Komara, Sekretaris Komunitas KSM Secerah Pagi, 21 Mei 2014, Pukul 18.30)

Namun demikian, Kantor Lingkungan Hidup dalam hal pengelolaan sampah di Kota Cirebon mempunyai hambatan seperti status Kantor Lingkungan Hidup yang masih berupa kantor bukan badan seperti daerah lainnya di Indonesia. Dampaknya adalah pada alokasi anggaran dan penggunaan anggaran yang terbatas. Hal ini juga disampaikan oleh Aty Hermawaty sebagai Kasub Bidang

Perencanaan Pengembangan Kawasan Perkotaan, Lingkungan Hidup dan Pertanahan Bappeda Kota Cirebon sebagai berikut: *“Nah salah satunya KLH ini harus menjadi Badan, karena terkendala masalah status jadi mereka tidak bisa berbuat banyak untuk mengajak masyarakat dalam pengelolaan sampah ini”* (wawancara mendalam dengan Aty Hermawaty, Kasub Bidang Perencanaan Pengembangan Kawasan Perkotaan, Lingkungan Hidup dan Pertanahan Bappeda Kota Cirebon, 14 Mei 2014, Pukul 14.00).

Selain itu juga terkait Sumber Daya Manusia yang dimiliki Kantor Lingkungan Hidup adalah berjumlah 16 orang. Bidang Konservasi dan Pemulihan yang merupakan bidang yang berperan dalam pengelolaan sampah hanya berjumlah 3 orang. Hal ini juga disampaikan oleh Hendra Irawan sebagai Kepala Bidang Konservasi dan Pemulihan KLH Kota Cirebon bahwa:

“Ya dari SDM juga sedikit, ya disini cuman berdua saja. Semuanya kan cuman ada 16 orang, belum yang di Tata Usaha berapa orang, di laboratorium dan pengawasan ke perusahaan, belum pengawasan limbah perusahaan cuman 3 orang se-Kota Cirebon, tenaga lab nya satu. Ya untuk hal ini kurang. Tadinya di bidang konservasi dan lingkungan ada 6 orang karena memang ada yang pensiun, ada yang promosi, ada yang naik. Sementara gak diisi orang, PNS barunya gak ada lagi, gak ada lagi” (wawancara mendalam dengan Hendra Irawan, Kepala Bidang Konservasi dan Pemulihan KLH Kota Cirebon, 8 Mei 2014, Pukul 14.45)

Terbatasnya jumlah SDM ini menyebabkan terbatasnya juga tugas yang dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Cirebon dalam pengurangan sampah di tingkat sumber sampah atau di tingkat masyarakat.

Implementor kebijakan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Kebersihan di Kota Cirebon selanjutnya adalah kecamatan dan kelurahan. Kecamatan dan kelurahan mempunyai peran yang sama dalam pengelolaan sampah di Kota Cirebon, yaitu sebagai fasilitator. Kecamatan akan menyampaikan program dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan kepada unit pemerintah dibawahnya yaitu kelurahan. Kelurahan juga akan menyampaikan program-program kepada masyarakat. Masyarakat yang akan disampaikan terlebih dahulu adalah Ketua Rw. Kemudian yang menjadi *implementor* selanjutnya adalah masyarakat. Masyarakat juga sudah disebutkan dalam

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Kebersihan di Kota Cirebon bahwa partisipasi masyarakat dalam hal ini berupa pengadaan sarana/prasarana kebersihan yaitu tempat-tempat sampah umum, tempat pembuangan sementara (*container* dan landasan *container*) tempat pembuangan akhir dan alat-alat pemusnah sampah, serta alat-alat kebersihan dan angkutan sampah. Pada sub bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa masyarakat dalam pandangan peneliti terbagi ke dalam masyarakat aktif dan pasif.

Implementor kebijakan pengelolaan sampah di Kota Cirebon berkoordinasi di dalam forum yang sudah ditentukan oleh Bappeda Kota Cirebon. Bappeda terutama bidang fisik merupakan instansi yang melakukan koordinasi dengan mengumpulkan SKPD terkait dengan perencanaan pengelolaan sampah misalnya adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan serta Kantor Lingkungan Hidup. Bappeda melakukan koordinasi dengan instansi terkait minimal 1 kali dalam setahun. Hal ini dilakukan untuk memberikan usulan dan saran kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan serta Kantor Lingkungan Hidup agar tujuan yang akan dicapai sesuai dengan kebutuhan SKPD lainnya. Berikut ini pernyataan yang disampaikan oleh Aty Hermawaty terkait forum koordinasi untuk mensinergikan program dengan SKPD terkait:

“Ya kalo koordinasi memang sudah tugas Bappeda ya melakukan koordinasi itu sebagai koordinator ya dengan dinas-dinas terkait. Kita memberikan semacam forum, kita mengumpulkan SKPD-SKPD terkait yang dibawah bidang fisik. Di bawah kita ada Dinas Kebersihan, Kantor Lingkungan Hidup, Dinas PU sama Dinas Perhubungan, Pemadaman. Kita lakukan semacam diskusi apa sih permasalahannya, itu ada forumnya. Akhirnya tidak menjadi suatu rujukan untuk dinasnya. Maksud kita hanya arahan atau dorongan bukan pemaksaan harus begini ya” (wawancara mendalam dengan Aty Hermawaty, Kasub Bidang Perencanaan Pengembangan Kawasan Perkotaan, Lingkungan Hidup dan Pertanahan, 14 Mei 2014, Pukul 14.00).

Koordinasi tersebut dilakukan oleh Bappeda guna merencanakan pembangunan mengenai pengelolaan sampah di Kota Cirebon. Usulan yang diberikan oleh Bappeda Kota Cirebon terkesan formalitas belaka karena pada akhirnya Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cirebon tetap melaksanakan perencanaan yang telah dibuat. Sementara itu, koordinasi pemerintah dengan masyarakat lebih efektif dan lebih banyak dilakukan antara pihak masyarakat dengan kelurahan

atau masyarakat dengan kecamatan. Koordinasi tersebut terkait dengan pemberdayaan masyarakat untuk mengelola sampahnya dengan konsep 3R (*reduce, reuse, recycle*). Adapun koordinasi juga dilakukan oleh pihak kelurahan dengan Kantor Lingkungan Hidup terkait dengan perlombaan kebersihan tingkat kelurahan atau *event* lomba lainnya yang berhubungan dengan lingkungan di tingkat kelurahan.

5.1.2.3 Konsistensi Aturan dan Komitmen Aparat Terhadap Tujuan Kebijakan

Implementor dalam kebijakan pengelolaan sampah di Kota Cirebon seperti yang telah disebutkan bahwa seperti Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Kantor Lingkungan Hidup, UPTD TPA Kopiluhur serta Kecamatan dan Kelurahan. Aturan pada badan pelaksana tersebut telah tercantum dengan jelas berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya. Konsistensi aturan pada badan pelaksana tersebut adalah cenderung dapat dilaksanakan oleh aparat yang melaksanakannya. Aparat pada badan pelaksana tersebut sudah cenderung terbiasa dengan pekerjaan yang ditekuninya sehingga komitmen untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya sudah cukup baik.

Namun demikian, apabila terkait tujuan kebijakan untuk mengelola sampah dengan konsep 3R (*reduce, reuse, recycle*) maka aparat pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan serta UPTD TPA Kopiluhur cenderung melaksanakan hal-hal teknis seperti pengangkutan sampah, penyapuan jalan dan pemrosesan akhir sampah. Hal-hal teknis tersebut berbeda tujuan dengan Kantor Lingkungan Hidup. Di lain sisi, Kantor Lingkungan Hidup berusaha untuk mengurangi sampah di tingkat sumber sampah, namun Dinas Kebersihan dan Pertamanan berusaha untuk meningkatkan volume sampah yang dapat diangkut. Hal tersebut dapat berarti sampah yang dihasilkan menjadi semakin meningkat. Perbedaan tersebut terkadang masih sulit untuk dapat dijabatani oleh kedua badan pelaksana tersebut. Hal tersebut dikarenakan badan pelaksana memikirkan hal-hal teknis di lapangan yang akan sulit diatasi ketika tujuan volume sampah adalah menurunkan tingkat volume sampah. Hal ini juga disampaikan oleh Aty Hermawaty dari Bappeda bahwa “...*Mungkin ketika tiba-tiba volume sampah*

diturunkan nanti petugasnya bagaimana, mungkin ada kebijakan lain, itu kan yang kita tidak tau”(wawancara mendalam dengan Aty Hermawaty, Kasub Bidang Perencanaan Pengembangan Kawasan Perkotaan, Lingkungan Hidup dan Pertanahan Bappeda Kota Cirebon, 14 Mei 2014, Pukul 09.50).

Konsistensi aparat badan pelaksana di sisi lain terkendala masalah promosi, mutasi, pergeseran pimpinan dan pergeseran staf. Apabila hal ini terjadi maka perencanaan yang dibuat untuk mencapai tujuan pengelolaan sampah dengan konsep 3R tidak akan terlaksana sesuai rencana jika aparat yang berada di lingkungan tersebut tidak melakukan evaluasi pada perencanaan atau pelaksanaan sebelumnya. Hal ini juga disampaikan oleh Aty Hermawaty dari Bappeda Kota Cirebon bahwa:

“Begini ya kembali dinamika pemda. Pemda kan rentan dengan promosi, mutasi, pergeseran pimpinan, pergeseran orang per orang. Jadi mungkin Saya 2002 gak disini, Saya bukan di bidang fisik mba, Saya di Lingkungan Hidup. Sama seperti Kepala DKP ini kan baru juga ya berapa bulan. Tadinya kan beliau inspektorat ya. Ketika di satu sisi, oke Saya perencanaan tapi kan Saya liat dulu kan tupoksi kelembagaan seperti apa. Terus saya melakukan evaluasi terhadap pendahulu Saya. Saya kan mempunyai kebijakan yang beda dengan pendahulu Saya”(wawancara mendalam dengan Aty Hermawaty, Kasub Bidang Perencanaan Pengembangan Kawasan Perkotaan, Lingkungan Hidup dan Pertanahan Bappeda Kota Cirebon, 14 Mei 2014, Pukul 09.50).

Sementara itu, aparat yang berada di tingkat kelurahan dan kecamatan cenderung membantu masyarakat dalam hal memfasilitasi anggaran, tempat dan lainnya untuk mencapai tujuan pengelolaan sampah dengan konsep 3R (*reduce, reuse, recycle*). Namun pemberian bantuan tersebut juga memerlukan koordinasi yang baik antara kelompok masyarakat dengan kelurahan atau kecamatan. Kelompok masyarakat Rw 08 Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti merupakan kelompok masyarakat yang difasilitasi oleh Kelurahan Larangan dan Kecamatan Harjamukti untuk memaksimalkan usaha pengelolaan sampah dengan konsep 3R.

5.1.2.4 Akses Partisipasi Kelompok-Kelompok Luar Dalam Implementasi Kebijakan

Pengelolaan sampah dalam upaya pembangunan berkelanjutan apabila masyarakat turut mendukung dan melaksanakan pengurangan sampah di tingkat sumber sampah dengan cara memilah dan memilah sampah, memanfaatkan kembali sampah dan mendaur ulang sampah maka hal tersebut lebih efektif dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Cirebon. Namun menurut pengamatan peneliti, kelompok masyarakat yang berhasil dalam mengurangi sampah di tingkat sumber sampah adalah kelompok masyarakat Rw 08 Merbabu Asih Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti. Partisipasi masyarakat telah tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Kebersihan di Kota Cirebon pada Bab V tentang Partisipasi Masyarakat. Namun bentuk partisipasi yang dimaksud disini hanya sebatas untuk membantu pengadaan sarana/prasarana kebersihan berupa tempat-tempat sampah umum di jalan-jalan kota, tempat pembuangan sementara (*container* dan landasan *container*) tempat pembuangan akhir dan alat-alat pemusnah sampah, serta alat-alat kebersihan dan angkutan sampah.

Sementara itu, masyarakat yang berpartisipasi dalam bentuk pengelolaan sampah dengan konsep 3R (*reduce, reuse, recycle*) seperti adanya kegiatan pengomposan, bank sampah dan kerajinan daur ulang serta lainnya tersirat meskipun tidak mengatur secara tegas dan jelas dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Kebersihan di Kota Cirebon. Hal ini mengakibatkan Masyarakat Kota Cirebon telah diberikan kesempatan untuk mengelola sampah dengan konsep 3R (*reduce, reuse, recycle*). Salah satu contoh yang telah disebutkan dan dianggap berhasil dalam hal ini adalah kelompok masyarakat Rw 08 Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti. Hal ini dapat berarti akses kelompok-kelompok luar yang dimaksud adalah kelompok masyarakat yang merupakan kelompok sasaran dalam kebijakan pengelolaan sampah. Akses masyarakat terhadap kebijakan ini sebenarnya sangat luas untuk masyarakat dapat berperan sebagai *pioneer* atau sebagai masyarakat yang melaksanakan secara komprehensif kebijakan pengelolaan sampah ini.

5.1.3 Lingkungan Kebijakan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Kebersihan di Kota Cirebon

Lingkungan kebijakan mencakup hal-hal seperti kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi, dukungan publik terhadap sebuah kebijakan, sikap dari kelompok pemilih (*constituency groups*), serta tingkat komitmen dan ketrampilan dari aparat dan implementor. Berikut adalah penjelasan mengenai hal-hal yang telah disebutkan.

5.1.3.1 Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat dan Tingkat Kemajuan Teknologi

Lingkungan kebijakan dalam hal ini dilihat dari kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi. Pada sub bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa masyarakat di tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan Cirebon bersifat heterogen. Kelompok masyarakat yang dianggap berhasil dalam pengelolaan sampah di Kota Cirebon adalah Rw 08 Merbabu Asih Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti atau KSM Secerah Pagi juga bersifat heterogen. Kondisi ekonomi sosial masyarakat yang berbeda-beda sehingga diperlukan cara penyampaian atau ajakan yang berbeda pula dalam pengelolaan sampah dengan konsep 3R (*reduce, reuse, recycle*). Masyarakat yang sudah terbuka dan berpendidikan cenderung mudah menerima pengelolaan sampah dengan konsep 3R (*reduce, reuse, recycle*) dibanding masyarakat yang masih tertutup dan tradisional. KSM Secerah Pagi Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti pun membutuhkan waktu 5 tahun secara simultan hingga saat ini untuk mengajak masyarakat di sekitarnya untuk mengurangi sampah di tingkat sumber sampah.

Sementara itu, tingkat kemajuan teknologi dalam pengelolaan sampah dengan konsep 3R (*reduce, reuse, recycle*) di tingkat masyarakat masih cenderung sederhana dan konvensional. Misalnya alat *composter* dibuat dari ember dengan dimodifikasi pada beberapa hal maka masyarakat tersebut dapat menggunakan *composter* tersebut di rumahnya. Pengelolaan sampah dengan cara dibakar dalam suhu yang panas serta mengubah sampah tersebut menjadi partikel lain seperti dalam bentuk debu atau gas atau disebut dengan *incineration* yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cirebon cenderung termasuk ke dalam teknologi yang sudah lebih baik. Namun kekurangannya adalah pada jumlah

banyaknya bahan bakar yang diperlukan untuk membakar sampah yang juga membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Pemrosesan akhir sampah di TPA Kopiluhur cenderung menggunakan teknologi yang semi canggih karena menggunakan sistem *controlled landfill* yang menggunakan alat berat operasional untuk memadatkan sampah dan melapisi sampah dengan tanah.

5.1.3.2 Dukungan Publik Terhadap Suatu Kebijakan

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Kebersihan di Kota Cirebon belum mengatur pemberian insentif kepada kelompok masyarakat atau lembaga pengelola sampah terbaik. Hal ini mengakibatkan masyarakat pun masih sedikit yang mendukung kebijakan pengelolaan sampah dalam upaya pembangunan berkelanjutan. Hal ini juga didukung oleh pernyataan Agus Supriyono sebagai Ketua KSM Secerah Pagi bahwa masyarakat kurang tertarik karena memang sebelumnya tidak ada penghargaan yang diterima kepada masyarakat yang mengelola sampah dengan konsep 3R (*reduce, reuse, recycle*).

Di lain sisi, pemerintah aktif mengajak masyarakat untuk mengelola sampah namun Dinas Kebersihan dan Pertamanan juga tetap melaksanakan pemberian layanan kepada masyarakat berupa pengangkutan sampah dan penyapuan jalan setiap harinya. Oleh karena itu, Masyarakat Kota Cirebon secara komprehensif maupun kelompok masyarakat yang berada di Kecamatan Harjamukti cenderung hanya sebagian kelompok masyarakat saja yang dapat melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah dengan konsep 3R (*reduce, reuse, recycle*). Kelompok masyarakat yang dimaksud disini adalah dapat berarti juga para pemilik bangunan, warung/kios, para pedagang kaki lima seperti yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Kebersihan di Kota Cirebon. Berdasarkan hal tersebut, peneliti melihat bahwa dukungan masyarakat terhadap kebijakan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Kebersihan di Kota Cirebon adalah masih minim dan cenderung masih adanya bentuk pelanggaran seperti sampah yang di bakar di trotoar atau jalan, pekarangan dan lainnya oleh kelompok masyarakat. Oleh karena itu, kelurahan dan kecamatan sebagai

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersama-sama dengan Kantor Lingkungan Hidup berperan di masyarakat untuk mengajak dan memfasilitasi dalam rangka pengelolaan sampah dengan konsep 3R (*reduce, reuse, recycle*).

5.1.3.3 Sikap dari Kelompok Pemilih

Kelompok pemilih yang ada di masyarakat Kota Cirebon adalah masyarakat yang mempunyai kepentingan maupun masyarakat yang mendapatkan efeknegatif maupun positif dalam pengelolaan sampah yang berada di lingkungannya. Kelompok pemilih tersebut yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan melalui berbagai cara yaitu: (1) kelompok pemilih dapat melakukan intervensi terhadap keputusan yang dibuat badan-badan pelaksana melalui berbagai komentar dengan maksud untuk mengubah keputusan; (2) kelompok pemilih dapat memiliki kemampuan untuk mempengaruhi badan-badan pelaksana, dan membuat pernyataan yang ditujukan kepada badan legislatif. Melihat perkembangan dukungan masyarakat Kota Cirebon secara keseluruhan dan kelompok masyarakat yang berada di Kecamatan Harjamukti yang masih minim, maka sikap dari kelompok pemilih ini pun cenderung belum dapat mempengaruhi kebijakan atau memberikan rekomendasi terhadap badan-badan pelaksana pengelola sampah. Nunung Nurhayati sebagai Kader PKK Rw 08 Rt 01 Kelurahan Argasunya pernah menyampaikan kondisi lingkungan yang tidak sehat dengan adanya polusi bau akibat kegiatan pemrosesan akhir sampah di TPA Kopiluhur namun tidak ada *feedback* dari Pemerintah Kota Cirebon. Berikut ini pernyataan yang disampaikan Nunung Nurhayati “*Saya juga udah sering ngomong ke dinas, pernah ke dinas tuh. Duh Saya tuh gimana gitu gak bisa dibedain bau sampah semua. Tapi gak ada respon dari dinas*” (wawancara mendalam dengan Nunung Nurhayati, 21 Mei 2014, Pukul 11.30).

5.1.3.4 Tingkat Komitmen dan Ketrampilan dari *Implementor*

Implementor kebijakan pengelolaan sampah di Kota Cirebon dalam mencapai tujuan pengelolaan sampah yang berkelanjutan maka kemudian tingkat komitmen harus tinggi dan memiliki ketrampilan dalam membuat prioritas tujuan. Prioritas tujuan tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

masing-masing *implementor*. Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang berperan dalam memberikan layanan pengangkutan sampah berusaha maksimal untuk melaksanakan pengangkutan sampah setiap harinya. Adapun perencanaan Dinas Kebersihan dan Pertamanan dengan adanya peningkatan pengangkutan sampah setiap harinya itu berbanding terbalik dengan upaya pembangunan berkelanjutan. Hal ini dikarenakan di lain sisi, Kantor Lingkungan Hidup berperan untuk mengurangi sampah di tingkat sumber sampah yaitu sampah rumah tangga. Hal ini juga didukung pernyataan Aty Hermawaty dari Bappeda Kota Cirebon bahwa “*Jadi targetnya itu peningkatan jumlah sampah yang dibuang ke TPA Kopiluhur. Misalnya tahun ini ya 660 m³/hari, tahun depan direncanakannya 700 m³/hari. Nah itu kan justru sesuatu yang salah kalo menurut Saya*” (wawancara mendalam dengan Aty Hermawaty, Kasub Bidang Perencanaan Pengembangan Kawasan Perkotaan, Lingkungan Hidup dan Pertanian, 14 Mei 2014, Pukul 09.50).

Selain Peran dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan serta Kantor Lingkungan Hidup, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) TPA Kopiluhur juga turut membantu dalam mencapai prioritas tujuan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. UPTD TPA Kopiluhur menggunakan sistem pemrosesan akhir sampah dengan sistem *controlled landfill*. Sistem *controlled landfill* ini lebih baik dibandingkan sistem *open dumping* yang dibiarkan menggunung. Petugas dan pelaksana operasional TPA Kopiluhur merupakan tenaga ahli yang terbiasa melakukan pemadatan sampah dan pelapisan tanah sebagai tahap dari sistem *controlled landfill*. Pelapisan tanah tersebut dilakukan setiap hari ketika pemadatan sampah sudah dilakukan. Pernyataan Sudiro sebagai Staff Operasional UPTD TPA Kopiluhur bahwa “*Ya kalau pemadatan mah terus, kalau pelapisan mah sehari*” (wawancara mendalam dengan Sudiro, Staff Operasional UPTD TPA Kopiluhur, 21 Mei 2014, Pukul 11.15).

Peran UPTD TPA Kopiluhur sebenarnya juga dalam hal *composting* sampah organik. Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cirebon Tahun 2011-2031 bahwa Tempat Pengelolaan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Kopiluhur di Kelurahan Argasanya Kecamatan Harjamukti dengan kapasitas kurang lebih 645 m³. Namun demikian, data Dinas Kebersihan dan Pertamanan pada tahun 2011 menunjukkan bahwa volume sampah di 5 Kecamatan Kota

Cirebon yaitu 840 m³ (Dinas Kebersihan dan Pertamanan, 2013 dalam Cirebon Dalam Angka 2013). Sementara itu volume sampah yang diangkut dan masuk ke TPA Kopiluhur per harinya adalah 672 m³ atau setara dengan 18.816 m³ sampah per bulan (Bagian Administrasi UPTD TPA Kopiluhur, 2013). Volume sampah yang masuk ke TPA Kopiluhur tersebut dapat dibuat kompos di Pabrik Kompos TPA Kopiluhur. Namun pabrik kompos tersebut sudah 4 tahun terakhir telah berhenti beroperasi karena kerjasama dengan PT Khatulistiwa Putera Mandiri berakhir pada tahun 2010. Hal ini mengakibatkan pemrosesan akhir sampah hingga hari ini hanya menggunakan sistem *controlled landfill* saja.

Namun demikian, nampaknya pemeliharaan gedung atau peralatan yang ada di pabrik kompos ini tidak mendapat perhatian dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Hal ini dikarenakan kondisi terakhir dari peralatan dan gedung tahun 2010 hingga tahun 2014 sejak tidak beroperasinya pabrik kompos yang bekerjasama dengan PT Khatulistiwa Putera Mandiri adalah tidak terurus dan dibiarkan begitu saja. Gambar 5.1 menunjukkan bahwa kondisi terakhir peralatan mesin pencacah yang digunakan di pabrik kompos. Mesin pencacah yang berada di gedung pabrik kompos ini terdapat 2 unit. Gedung dan mesin pencacah ini adalah kepemilikan dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan.



Gambar 5.1 Mesin Pencacah di Pabrik Kompos

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2014

Berdasarkan hal di atas, komitmen *implementor* pengelolaan sampah di Kota Cirebon ini sudah berusaha untuk melaksanakan pengelolaan sampah. Namun terkadang tujuan antar instansi berbanding terbalik dengan upaya pembangunan berkelanjutan. Hal ini mengakibatkan pengelolaan sampah dalam

Universitas Indonesia

upaya pembangunan berkelanjutan dengan konsep 3R (*reduce, reuse, recycle*) tidak komprehensif. Hal ini dapat dilihat hanya beberapa kelompok masyarakat saja yang dapat melaksanakan pengelolaan sampah dengan cara memilah dan memilih sampah, memanfaatkan kembali sampah, dan mendaur ulang sampah.

5.2 Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pengelolaan Sampah di Kota Cirebon (Studi Kasus Kecamatan Harjamukti)

Pengelolaan sampah di Kota Cirebon sebenarnya sudah berkembang dari *cradle-to-grave* ke *cradle-to-cradle*. Konsep *cradle-to-cradle* ini sudah termasuk ke dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Hal ini dikarenakan sampah yang dibuang oleh masyarakat dapat dimanfaatkan kembali atau didaur ulang atau disebut juga *reuse* dan *recycle* sehingga tidak perlu dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA). Namun pada akhirnya konsep *cradle-to-cradle* ini tidak komprehensif dalam pelaksanaan di masyarakat. *Reduce, reuse* dan *recycle* sampah ini akan dilihat juga dari perspektif ekonomi, sosial dan lingkungan.

5.2.1 Ekonomi

Pengelolaan sampah di Kota Cirebon dari perspektif ekonomi belum dapat dilihat sebagai hal yang memberikan manfaat yang signifikan bagi pengelola sampah dengan konsep 3R (*reduce, reuse, recycle*). Hal ini dikarenakan pengurangan sampah di tingkat sumbernya baru dilakukan sebagian masyarakat. Kecamatan Harjamukti merupakan kecamatan yang dianggap lebih baik dibanding kecamatan lainnya dalam pengelolaan sampah. Kecamatan Harjamukti beberapa kali menjadi perwakilan dalam perlombaan di tingkat Kota maupun Provinsi. Salah satu masyarakat di tingkat Rw yang dapat mengurangi sampah hingga 8m³ per minggu adalah Rw 08 Merbabu Asih Kelurahan Larangan. Rw 08 Merbabu Asih Kelurahan Larangan telah melaksanakan kegiatan 3R dalam pengelolaan sampahnya. Produk kerajinan daur ulang sampah misalnya adalah produk bermacam-macam tas, sandal, dan lainnya yang didaur ulang dari sampah-sampah plastik detergen atau plastik minuman kopi dan lain-lain. Hal ini juga disampaikan oleh Dani Komara sebagai Sekretaris KSM Secerah

Pagi bahwa “*kerajinan daur ulang misalnya tas pinggang, tas laptop, tas ransel, taplak meja, sandal dan lain-lain*” (wawancara mendalam dengan Dani Komara, Sekretaris KSM Secerah Pagi, 21 Mei 2014, Pukul 18.30).

Namun demikian, pemasaran produk ini masih belum maksimal. Produk kerajinan daur ulang yang dilakukan oleh masyarakat Rw 08 Merbabu Asih Kelurahan Larangan masih banyak bersifat secara langsung dengan mendatangi Rw 08 Merbabu Asih. Selain secara langsung, pemerintah dalam hal ini Kantor Lingkungan Hidup turut berperan dalam hal memberikan informasi kepada pihak yang mencari produk daur ulang sampah. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Hendra Irawan sebagai Kepala Bidang Konservasi dan Pemulihan bahwa “*Ya paling kami sih membantu kalo ada yang nanya aja. Misalnya ada yang nanya dimana kerajinan daur ulang sampah ya kita tunjukkan tempatnya, sebatas memberi info saja*” (wawancara mendalam Hendra Irawan, Ketua Bidang Konservasi dan Pemulihan, 8 Mei 2014, Pukul 14.45). Selain itu, pemasaran produk daur ulang sampah juga dilakukan dengan mengikuti pameran. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Dani Komara sebagai Sekretaris KSM Secerah Pagi bahwa:

“Produk-produk kita dipasarkan ya lewat pameran-pameran itu. Terakhir itu Cirebon Expo di alun-alun, pameran di Hotel Santika, studi banding dari sekolah-sekolah, tamu-tamu dari luar yang datang ke show room Kami. Jadi penjualan secara langsung ada dan mengikuti pameran-pameran” (wawancara mendalam dengan Dani Komara, Sekretaris Secerah Pagi, 21 Mei 2014, Pukul 18.30).

Pemasaran produk yang masih secara langsung melalui informasi *door to door*serta *event* pameran ini menjadi kendala bagi produsen kerajinan daur ulang sampah. Apalagi jika produk yang dihasilkan lebih banyak namun *event* pameran kerajinan daur ulang masih sedikit hingga hasil penjualan yang diterima pun tidak banyak. Hal ini tentunya tidak dapat diandalkan bagi produsen kerajinan daur ulang sampah. Masyarakat yang menghasilkan produk kerajinan daur ulang sampah ini adalah bukan masyarakat yang mata pencahariannya murni berasal dari hasil daur ulang sampah. Dapat dilihat bahwa kelompok masyarakat KSM Secerah Pagi Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti apabila terdapat penjualan dari produk kerajinan daur ulang maka hasilnya akan digunakan untuk

kepentingan masyarakat dalam mengelola sampah. Hal ini akan berlangsung secara terus-menerus seperti sebuah siklus.

Kerajinan daur ulang sampah masih tidak banyak membantu dalam hal kesejahteraan ekonomi masyarakat Rw 08 Merbabu Asih Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti. Namun demikian, peneliti melihat sampah yang diubah atau dijadikan bentuk lain yang lebih bermanfaat merupakan hal yang lebih baik meskipun kuantitas masyarakat yang melakukan hal tersebut masih sangat kurang baik untuk Kecamatan Harjamukti maupun Kota Cirebon.

Sampah tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat Rw 08 Merbabu Asih, namun juga bermanfaat untuk masyarakat di sekitar TPA Kopiluhur Kelurahan Argasunya. Namun bukan untuk didaur ulang, melainkan dipilih dan dipilah untuk dijual ke pengepul sampah yang berada di TPA Kopiluhur. Orang yang melakukan pemilahan sampah dalam hal ini disebut sebagai pemulung. Para pemulung biasanya mendapatkan keuntungan berupa sejumlah rupiah. Hal ini juga disampaikan oleh Nunung Nurhayati sebagai Kader PKK Rw.08 Rt.01 Kelurahan Argasunya bahwa:

“Anak kecil uda pada punya Hp, punya motor karena udah menghasilkan dari sampah itu. Orang yang ngambilin sampah itu pada kaya. Contohnya kan ada yang nemu emas, ada yang nemu uang, ada yang nemu Hp. Ya lumayanlah katanya gitu. Baru-baru sekarang nemu emas dapet dua juta lebih ya dari sampah itu, makanya pada kaya. Pokoknya kaya lah, ada yang nemu dolar. Gak kaya juga tapi cukup, ari kaya kan tergantung ukuran orang” (wawancara mendalam dengan Nunung Nurhayati, Kader PKK Rw.08 Rt.01 Kelurahan Argasunya, 21 Mei 2014, Pukul 11.30)

Para pemulung tersebut merupakan kelompok masyarakat yang merasakan dampak ekonomi secara langsung dari sampah karena mata pencaharian mereka adalah mengambil dan memungut sampah yang berada di TPA Kopiluhur. Namun para pemulung tersebut tidak termasuk ke dalam kelompok masyarakat yang mengelola sampah dengan konsep 3R (*reduce, reuse, recycle*).

5.2.2 Sosial

Pengelolaan sampah dalam upaya pembangunan berkelanjutan di Kecamatan Harjamukti dari perspektif sosial melihat partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat. KSM Secerah Pagi adalah komunitas Rw 08 Merbabu Asih

Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti yang dianggap berhasil dalam mengajak masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan konsep 3R (*reduce, reuse, recycle*). KSM Secerah Pagi merupakan akronim dari Komunitas Sosial Masyarakat Semoga Cepat Rapih Pekarangan Asri Gemerlap Indah. KSM Secerah Pagi terbentuk pada tahun 2009 setelah melakukan studi banding ke daerah *best practice* dalam pengelolaan sampah yaitu di daerah Sukunan (Yogyakarta) tentang pengelolaan sampah. Studi banding tersebut dikoordinasikan langsung oleh pihak Kecamatan Harjamukti dan Kelurahan Larangan. Hal ini juga disampaikan oleh Suwarso Budi Winarno sebagai Camat Kecamatan Harjamukti bahwa:

“Jadi ada 76 Ketua Rw. Kota Cirebon ini kan di kampung pengelolaan sampah dikoordinir oleh kebijakan Rw. Iuran sampah dan lain-lain ada di Pak Rw. Kita harapkan semua Ketua Rw berangkat, PKK, LPM unsur-unsur lembaga pemberdayaan masyarakat yang ada di kelurahan itu kita berangkatkan untuk melihat apa, bagaimana, keuntungannya dan lain sebagainya lah” (wawancara mendalam dengan Suwarso Budi Winarno, 21 Mei 2014, Pukul 10.05).

Komunitas KSM Secerah Pagi mempunyai 4 divisi yaitu edukasi, kerajinan daur ulang, bank sampah dan biopori (Bagian Administrasi KSM Secerah Pagi, 2014). KSM Secerah Pagi melakukan kegiatan pengelolaan sampah seperti bank sampah, *composting* dan kerajinan daur ulang sampah. Kerajinan daur ulang dimanfaatkan dari sampah anorganik seperti plastik-plastik detergen atau plastik minuman kopi dan lain-lain. Sementara *composting* berasal dari sampah dapur yang bersifat organik. *Composter* yang dilakukan pun masih sederhana karena berasal dari ember putih yang dimodifikasi untuk dapat menguraikan sampah organik menjadi kompos.

Bank sampah merupakan kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan setiap seminggu sekali atau dua minggu sekali yang merupakan sampah yang tidak dimanfaatkan untuk daur ulang misalnya botol atau kardus. Hal ini juga disampaikan oleh Dani Komara sebagai Sekretaris KSM Secerah Pagi bahwa *“...Sistem penjualan bank sampah itu bisa seminggu sekali atau dua minggu sekali, ada orang yang keliling ngangkutin sampah rumah tangga”* (wawancara

mendalam dengan Dani Komara, Sekretaris KSM Secerah Pagi, 21 Mei 2014, Pukul 18.30).



Gambar 5.2 Kegiatan Bank Sampah di Rw 08 Merbabu Asih

Sumber: KSM Secerah Pagi, 2014

Kegiatan-kegiatan pengelolaan sampah di Rw 08 Merbabu Asih Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti tidak terlepas dari peran semua pihak seperti Kelurahan, Kecamatan, pihak ketiga atau swasta dan masyarakat. Meskipun seperti itu, Rw 08 Merbabu Asih Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti merupakan masyarakat heterogen dari aspek agama, status pendidikan dan status ekonomi. Namun demikian, hal tersebut akhirnya membuat masyarakat Rw 08 Merbabu Asih Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti berhasil dalam pengurangan sampah di tingkat sumbernya dengan dukungan dari semua pihak. Hal ini terjadi secara bertahap atau simultan untuk mengajak masyarakat dari tahun 2009-2014 untuk bersama-sama mengurangi sampah di tingkat sumbernya. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Agus Supriyono sebagai Ketua KSM Secerah Pagi bahwa *“Memang tidak mudah dan tidak pendek karena sampai kurun waktu sekarang tuh hampir 5 tahun secara simultan berjalan mengubah mindset masyarakat dan bergerak karena disini itu heterogen”*(wawancara mendalam dengan Agus Supriyono, Ketua KSM Secerah Pagi, 19 Mei 2014, Pukul 16.35).

Dukungan dari pihak ketiga atau swasta merupakan koordinasi dengan pihak kecamatan dan kelurahan. Pihak ketiga atau swasta dalam pengelolaan sampah dalam bentuk pemberian bantuan alat adalah Kantor Lingkungan Hidup,

Dinas Kesehatan dan Bank Indonesia. Kantor Lingkungan Hidup memberikan bantuan berupa mesin pencacah dan juga tempat sampah. Sementara Dinas Kesehatan memberikan bantuan berupa *composter* dengan ukuran yang lebih besar dibanding *composter* sederhana. Bank Indonesia memberikan bantuan berupa gerobak sampah dan mesin jahit. Hal ini disampaikan oleh Dani Komara sebagai Sekretaris KSM Secerah Pagi bahwa:

“...Kemudian dapat bantuan dari BI berupa 3 unit mesin jahit modern, selain itu juga dapat bantuan dari KLH berupa 1 unit mesin pencacah sampah plastik bening dibuat jadi biji-biji plastik. Selain itu KLH juga memberikan 3 jenis tempat sampah untuk sampah organik, anorganik dan B3. Tapi Saya lihat KLH juga memberikan tempat sampah ke kelurahan lainnya soalnya Saya lihat di jalan-jalan juga ada”(wawancara mendalam dengan Dani Komara, Sekretaris KSM Secerah Pagi, 21 Mei 2014, Pukul 18.30).

Partisipasi masyarakat Rw 08 Merbabu Asih Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti dalam pengelolaan sampah dengan konsep 3R tersebut akhirnya memberikan dampak berupa insentif penghargaan dari adanya lomba kebersihan atau lomba kesehatan baik tingkat kelurahan, tingkat kecamatan maupun tingkat kota. Hal ini dikarenakan titik pantau atau *sample* wilayah yang dilombakan adalah di Rw 08 Merbabu Asih Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti. Dengan adanya dukungan pihak ketiga atau swasta akhirnya KSM Secerah Pagi pun dapat menambah alat *composting* dan mengadakan pelatihan kompos kepada masyarakat di luar kelurahan atau di luar kecamatan. Namun perkembangan pengelolaan sampah dengan konsep 3R secara baik dan kondusif adalah kelompok masyarakat Rw 08 Merbabu Asih Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti.

5.2.3 Lingkungan

Pengelolaan sampah dalam upaya pembangunan berkelanjutan dari perspektif lingkungan dilihat dari dampak yang terjadi di lingkungan. Dampak lingkungan yang terjadi di TPA Kopiluhur adalah polusi udara berupa bau tidak sedap dari sampah yang mengganggu warga sekitar TPA Kopiluhur Kelurahan Argasunya. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Nunung Nurhayati sebagai Kader PKK Rw 08 Rt 01 Kelurahan Argasunya bahwa *“Ya belum lagi kan kalo musim hujan. Kalo musim hujan kan bau nya tuh gak kuat, lalat, nanti nih*

pertengahan dzuhur tuh bau banget” (wawancara mendalam dengan Nunung Nurhayati, Kader PKK Rw 08 Rt 01 Kelurahan Argasunya, 21 Mei 2014, Pukul 11.30).

Lokasi TPA Kopiluhur berada di dataran tinggi Kota Cirebon. TPA Kopiluhur ini beroperasi sejak tahun 1999. Sebelumnya pemukiman penduduk pada tahun 1999 belum banyak. Namun saat ini pemukiman penduduk sudah banyak di sekitar TPA Kopiluhur. Oleh karena itu, polusi udara seperti bau sampah yang menyengat dirasakan oleh warga sekitar. Hal ini juga disampaikan oleh Otang Somantri sebagai Kepala UPTD TPA Kopiluhur bahwa *“Daerah lain gak punya lahan karena sudah penuh dengan penduduk. Daerah sekitar TPA Kopiluhur juga sekarang sudah padat dengan penduduk, mungkin karena adanya akses jalan, lampu dan lain sebagainya”* (wawancara mendalam dengan Otang Somantri, Kepala UPTD TPA Kopiluhur, 8 Mei 2014, Pukul 10.25).

Selain pencemaran atau polusi udara, pencemaran tanah di TPA Kopiluhur sudah tentu tanah tersebut tidak sehat lagi. Hal ini dapat dilihat dari pelapisan yang dilakukan di TPA Kopiluhur dengan sistem *controlled landfill*. Akibat sistem *controlled landfill* ini tanah akhirnya bercampur dengan sampah hingga 15 tahun.

Berdasarkan hal di atas, maka upaya pembangunan berkelanjutan dalam perspektif lingkungan sebenarnya sudah dilakukan seperti dengan adanya konsep 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang dilakukan oleh masyarakat. Namun demikian, pelaksanaannya belum dapat dilakukan secara maksimal baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Kondisi sampah yang berada di TPS yang tersedia pun seringkali ada cairan sampah yang dihasilkan. Apabila bercampur dengan tanah juga sangat mengganggu kesuburan tanah. Sementara tanah yang dijadikan TPS liar juga sangat berpengaruh terhadap keindahan tepi jalan, karena biasanya tepi jalan seringkali dijadikan TPS liar.

Selain itu, upaya pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan sampah di Kota Cirebon dilihat juga dari aspek jumlah penduduk yang berpengaruh pada tingkat konsumsi penduduk hingga menghasilkan sampah. Kecamatan Harjamukti merupakan kecamatan yang terdapat pengembang perumahan sehingga

perumahan di Kecamatan Harjamukti ini semakin bertambah. Hal ini mengakibatkan penambahan penduduk dan meningkatkan volume sampah di Kecamatan Harjamukti. Oleh karena itu, perspektif lingkungan dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan belum dapat dikendalikan karena volume sampah semakin meningkat.

5.3 Hambatan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Cirebon Dalam Upaya Pembangunan Berkelanjutan

5.3.1 Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah dalam upaya pembangunan berkelanjutan di Kota Cirebon seringkali menemui beberapa hambatan. Hambatan terbesar dari masyarakat adalah kurangnya kesadaran masyarakat bahwa sampah merupakan tugasnya dengan tujuan mengurangi sampah di tingkat sumber sampah maupun mengurangi sampah di tempat penampungan sampah sementara (TPS). Komunitas KSM Secerah Pagi Rw 08 Kelurahan Argasunya membutuhkan waktu selama 5 tahun secara simultan dalam mengubah *mindset* masyarakat bahwa sampah bukan hanya memberikan dampak negatif namun juga dapat memberikan dampak positif. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Agus Supriyono bahwa *“Jadi yang dirubah adalah mindset masyarakat. Memang tidak mudah dan tidak pendek karena sampai kurun waktu sekarang tuh hampir 5 tahun secara simultan berjalan mengubah mindset masyarakat dan bergerak karena disini itu heterogen”* (wawancara mendalam dengan Agus Supriyono, Ketua KSM Secerah Pagi, 19 Mei 2014, Pukul 16.35).

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah di tingkat sumber sampah dengan melakukan konsep 3R (*reduce, reuse, recycle*) juga terjadi di masyarakat sekitar TPA Kopiluhur Kelurahan Argasunya. Masyarakat di sekitar TPA Kopiluhur masih membuang sampah dengan cara dibakar. Meskipun hal ini dilarang menurut Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Kebersihan di Kota Cirebon, masyarakat di sekitar TPA Kopiluhur tetap melakukan pembakaran sampah di halaman/pekarangan. Hal ini dikarenakan karena masyarakat tidak mengetahui kebijakan pengelolaan sampah.

Nunung Nurhayati sebagai Kader PKK Rw 08 Rt 01 Kelurahan Argasunya menyampaikan bahwa *“Ya kalo disini mah orang-orangnya belum sadar, masih buang sembarangan, paling ke kebun yang kosong. Biasanya kebun ada di belakang rumah”* (wawancara mendalam dengan Nunung Nurhayati, Kader PKK Rw 08 Rt 01 Kelurahan Argasunya, 21 Mei 2014, Pukul 11.30).

Mindset masyarakat yang terkadang tidak peduli dengan masalah sampah terutama dikarenakan faktor status ekonomi, pendidikan dan sosial. Apabila masyarakat homogen dengan status ekonomi, pendidikan dan sosial yang baik maka pengelolaan sampah di tingkat sumber sampah yang berbasis *community based development* akan baik pula. Hal ini berbeda ketika masyarakat di suatu daerah yang bersifat heterogen dengan status ekonomi, pendidikan dan sosial yang beragam pula maka *mindset* mengelola sampah di tingkat sumber sampah akan tidak maksimal bahkan justru mengandalkan petugas kebersihan untuk mengelola sampah. Hal tersebut juga yang terjadi di Kecamatan Harjamukti yang terletak di sebelah selatan Kota Cirebon yang masih banyak terdapat lahan kosong. Kecamatan Harjamukti bersifat heterogen karena memang menjadi kawasan perumahan.

5.3.2 Kurangnya SDM Pelaksana Kebijakan

Pihak yang berperan dalam pengelolaan sampah yaitu Dinas Kebersihan dan Pertamanan, UPTD TPA Kopiluhur, Kantor Lingkungan Hidup, Kelurahan dan Kecamatan, serta Masyarakat. Hambatan yang menjadi masalah dalam pelaksanaan pengelolaan sampah adalah karena kurangnya sumber daya manusia (SDM) pelaksana. Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang memiliki beberapa tugas pokok pun akhirnya terbatas dalam melaksanakan pengelolaan sampah. Kekurangan SDM pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan misalnya tenaga kebersihan untuk melakukan penyapuan jalan. Hal ini juga sesuai dengan yang disampaikan oleh Sumanto sebagai Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cirebon bahwa *“Oh ada. Kita pake tenaga outsourcing untuk menyapu jalan di jalan kartini, siliwangi, jalan cipto, sampah-sampah di pinggir jalan. Kita tidak mampu kalo dari pegawai Kita”* (wawancara mendalam dengan Sumanto, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cirebon, 21 Mei 2014, Pukul 15.00).

Selain Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota Cirebon yang mengalami kekurangan SDM, UPTD TPA Kopiluhur pun mengalami hal yang sama yaitu kekurangan SDM. SDM di UPTD TPA Kopiluhur 9 orang yang sudah PNS dan 4 orang tenaga honorer untuk melaksanakan pemrosesan akhir sampah di TPA Kopiluhur dengan luas lahan TPA saat ini 14,2 Ha (Bagian Administrasi TPA Kopiluhur, 2013). Hal ini juga disampaikan oleh Otang Somantri sebagai Kepala UPTD TPA Kopiluhur bahwa *“Kalo jumlah pegawai jelas kurang ya, untuk pengalaman kerja yang ada bisa juga diadakan pelatihan-pelatihan untuk mereka lebih baik lagi. Kan karena yang kerja udah rutin ya uda terbiasalah”* (wawancara mendalam dengan Otang Somantri, Kepala UPTD TPA Kopiluhur, 8 Mei 2014, Pukul 10.25). Selain kekurangan SDM untuk melaksanakan tugas di lapangan, SDM di TPA Kopiluhur pun kurang dalam hal pembekalan/pelatihan pengelolaan sampah. Selama ini SDM di TPA Kopiluhur merupakan tenaga ahli yang memang sudah terbiasa dalam melakukan operasional sampah di TPA Kopiluhur. Meskipun ada pelatihan, maka yang ditunjuk adalah bidang lain di Dinas Kebersihan dan Pertamanan dikarenakan kurangnya SDM. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Otang Somantri bahwa *“Sangat kurang, ya jika ada tugas pelatihan juga belum tentu mereka bisa berangkat karena kan pekerja lapangan semua. Akhirnya yang berangkat ya bukan orang TPA nya, dari program atau apa”*(wawancara mendalam dengan Otang Somantri, Kepala UPTD TPA Kopiluhur, 8 Mei 2014, Pukul 10.25).

Kantor Lingkungan Hidup sebagai pihak yang bertugas mengajak masyarakat atau mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah pun menemui hambatan seperti kurangnya SDM. Total SDM yang dimiliki Kantor Lingkungan Hidup yaitu 16 orang. Bidang Konservasi dan Pemulihan yang menjadi bidang khusus yang menangani sampah pun hanya berjumlah 3 orang untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah di Kota Cirebon. Hal ini sangat sulit ketika tujuan yang diharapkan adalah tercapainya pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Kecamatan dan Kelurahan merupakan pihak yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat. Salah satu kelurahan di Kecamatan Harjamukti adalah Kelurahan Larangan. Kelurahan Larangan sebagai kelurahan yang

dianggap lebih baik dibanding kelurahan lainnya dalam pengelolaan sampah juga mengalami kekurangan tenaga kebersihan. Tenaga kebersihan ini yang mengangkut sampah dengan gerobak sampah. Kelurahan Larangan saat ini memiliki 1 orang tenaga kebersihan untuk mengangkut sampah 1 kelurahan. Hal ini tentunya sangat kurang. Sutisna sebagai Lurah Kelurahan Larangan menyampaikan hal tersebut bahwa *“Tapi Kita juga baru punya 1 orang tenaga kebersihan. 1 orang tenaga kebersihan ini ya belum cukup lah untuk 1 Kelurahan”*(wawancara mendalam dengan Sutisna, Lurah Kelurahan Larangan, 21 Mei 2014, Pukul 12.10).

5.3.3 Kurangnya Lahan

Pengelolaan sampah menurut Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Kebersihan di Kota Cirebon yang terdiri atas mekanisme Mikro dan Makro, pada faktanya adalah masih banyak masyarakat yang membuang sampah di tempat yang tidak ditentukan oleh Pemerintah Kota Cirebon. Kurangnya TPS di Kota Cirebon mengakibatkan lahan kosong di tepi jalan sering menjadi TPS liar untuk penampungan sampah. Hal ini terlihat di tepi jalan by pass Kota Cirebon dan tepi jalan menuju arah TPA Kopiluhur yang terdapat gunung sampah maupun sampah yang dibiarkan.



Gambar 5.3 TPS Liar di Jalan By Pass Kota Cirebon

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2014

Saat ini Kota Cirebon memiliki 22 TPS untuk 247 Rw di seluruh Kota Cirebon. Idealnya 1 TPS adalah untuk 5 Rw. Hal ini mengakibatkan Kota Cirebon masih kekurangan 27 TPS. Kekurangan TPS ini berhubungan dengan kurangnya

Universitas Indonesia

lahan yang tersedia di Kota Cirebon. Pemerintah Kota Cirebon melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan harus berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan kelurahan untuk menentukan lokasi TPS. Selama ini lokasi TPS yang sering dijumpai di Kota Cirebon berada di tepi jalan raya.

Kecamatan Harjamukti memiliki 2 TPS yang berada di Kelurahan Harjamukti dan Kelurahan Larangan yang masing-masing dengan kapasitas kurang lebih 56 m³ dan 80 m³. Sementara itu, Kecamatan Harjamukti yang terdiri atas 5 kelurahan, pada akhirnya kelurahan lainnya seperti Kelurahan Argasunya, Kelurahan Kecapi dan Kelurahan Kalijaga membuang sampah di 2 TPS tersebut. Kurangnya lahan untuk pembukaan TPS menyebabkan masyarakat membakar sampah di halaman rumah. Pengelolaan sampah dengan cara dibakar ini merupakan bentuk pelanggaran. Hal ini juga sudah dibahas pada sub bab sebelumnya. Pernyataan yang disampaikan oleh Agus Hasyim sebagai Kepala Bidang Kebersihan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cirebon bahwa pelanggaran lainnya dalam pengelolaan sampah adalah membuang sampah ke sungai. Berikut ini pernyataannya *“Kadang bakar sampah di trotoar, di halaman, di pekarangan, bahkan membuangnya ke sungai yang dekat dengan dia. Rumah yang sudah tidak ditinggali ya jadi tempat buang sampah disitu”* (wawancara mendalam dengan Agus Hasyim, Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan Kota Cirebon, 9 Mei 2014, Pukul 13.15).

Di sisi lain, pemerintah masih kekurangan TPS akan tetapi masyarakat tidak menginginkan pembukaan TPS baru dekat dengan tempat tinggalnya karena akan mengakibatkan pencemaran udara dan lainnya. Pembukaan TPS merupakan hasil koordinasi Kecamatan dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Lokasi tempat penampungan sampah sementara ini merupakan usulan dari tingkat Rt, Rw, atau kelurahan bersama-sama dengan kecamatan. Kecamatan selanjutnya akan menentukan lokasi yang dipilih dan disampaikan kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Hal ini juga sesuai dengan yang disampaikan oleh Sumanto sebagai Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cirebon bahwa:

“Iya untuk pembukaan lahan TPS, terutama di Kecamatan Harjamukti itu kan banyak perumahan ya. Kembali lagi tingkat Rt, Rw dan kelurahan atau kecamatan yang mengajukan usulan kepada Kami kalo ada lahan yang kosong. Tapi ya itu kalopun ada lahan yang kosong pasti mereka

tidak mau karena TPS terbuka, malem apalagi gelap gulita”(wawancara mendalam dengan Sumanto, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cirebon, 21 Mei 2014, Pukul 15.00).

Oleh karena itu, untuk mengatasi penolakan warga mengenai pembukaan TPS, maka Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cirebon merencanakan untuk membuat TPS tertutup. Salah satu contoh TPS tertutup adalah TPS Sukalila. TPS tertutup ini bertujuan untuk mengurangi dampak polusi udara dan pencemaran lainnya.



Gambar 5.4 TPS Tertutup di Sukalila

Sumber: Data Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cirebon, 2012

Pembukaan lahan untuk TPS tertutup ini tentunya tidak mudah. Hal ini dikarenakan perencanaan anggaran yang cukup besar. Selain perencanaan pembangunan TPS Tertutup, Dinas Kebersihan dan Pertamanan juga merencanakan pembangunan TPA Regional yang akan berlokasi di Kabupaten Cirebon. Perencanaan TPA Regional ini dikarenakan TPA Kopiluhur yang tidak dapat menampung sampah selama beberapa tahun ke depan. Namun hambatan yang ditemui untuk perencanaan TPA Regional ini adalah lahan TPA Regional. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Otang Somantri bahwa *“Baru wacana, tapi terakhir tahun kemarin sih sudah rapat dengan Sekda SKPD mengenai lokasinya dimana, namun masalahnya adalah kendala lahannya”* (wawancara mendalam dengan Otang Somantri, 8 Mei 2014, Pukul 10.25). Namun demikian, peneliti melihat bahwa hal tersebut tidak lebih efektif dibandingkan apabila masyarakat

melakukan pengurangan sampah di tingkat sumber sampah dengan konsep 3R (*reduce, reuse, recycle*).

5.3.4 Kurangnya Peran Swasta

Pengelolaan sampah dalam upaya pembangunan berkelanjutan juga menemui hambatan karena peran swasta yang masih kurang. Peran swasta yang bekerjasama dalam hal pengelolaan sampah untuk menjadi kompos adalah PT Khatulistiwa Putera Mandiri. Namun demikian, pengelolaan pabrik kompos ini tidak berlangsung lama dalam kurun waktu 5 tahun yaitu pada tahun 2005-2010. PT Khatulistiwa Putera Mandiri juga menyediakan alat untuk memproduksi sampah organik menjadi kompos. Sementara itu, Dinas Kebersihan dan Pertamanan menyediakan gedung pabrik kompos dan 2 unit mesin pencacah sampah. Kerjasama PT Khatulistiwa Putera Mandiri tidak dilanjutkan kembali dikarenakan beberapa hal yang disebutkan Sumanto sebagai Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cirebon. Pertama, kompos yang dihasilkan Pabrik Kompos di TPA Kopiluhur kurang baik. Kedua, kompos yang dihasilkan tidak mendapat hasil yang baik dalam pasar. Berikut ini yang disampaikan oleh Sumanto bahwa:

“Sekarang gini, kalo sampah dari TPA kan pasti sampahnya kecampur antara sampah organik, anorganik dan B3. Kalo uda kecampur hasil komposnya itu jelek kemudian tidak laku. Kecuali untuk taman atau kebun. Tapi kalo kebun nya itu menghasilkan buah itu tidak boleh karena akan mengandung B3. Kecuali sampah-sampah baru. Mereka datang langsung dipilah. Sampah baru datang di Kopiluhur baru dipilah-pilah” (wawancara mendalam dengan Sumanto, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cirebon, 21 Mei 2014, Pukul 15.00).

Selain PT Khatulistiwa Putera mandiri yang 4 tahun terakhir ini tidak lagi bekerjasama dengan Pemerintah Kota Cirebon, pihak swasta lainnya yang membantu dalam penyediaan sarana dan prasarana sampah adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia telah memberikan bantuan baik untuk komunitas KSM Secerah Pagi dan kelurahan lainnya seperti tempat sampah, gerobak sampah, mesin jahit untuk daur ulang.



Gambar 5.5 Gerobak Sampah Bantuan Bank Indonesia

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2014

Berdasarkan hal tersebut maka pihak swasta yang baru berperan dalam pengelolaan sampah di Kota Cirebon yaitu PT Khatulistiwa Putera Mandiri dan Bank Indonesia. Pemerintah Kota Cirebon melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan harus melakukan beberapa inovasi untuk menarik swasta dalam pengelolaan sampah di Kota Cirebon. Hal ini juga disampaikan oleh Nurudin Siraj sebagai Akademisi Kebijakan Publik bahwa “*Disini pemerintah harus melakukan inovasi baru untuk menggaet swasta ke dalam proses daur ulang tadi*” (wawancara mendalam dengan Nurudin Siraj, Akademisi Kebijakan Publik, 20 Mei 2014, Pukul 12.00).

5.4.5 Terbatasnya Anggaran

Kota Cirebon berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cirebon Tahun 2011-2031 bahwa rencana pengembangan sistem pengelolaan persampahan di TPPAS Kopiluhur menggunakan sistem *sanitary landfill* dengan integrasi 3R. TPA Kopiluhur yang terletak di Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti sudah berusia 15 tahun dalam menampung sampah Kota Cirebon. Hal ini dilihat dari sejak dipindahkannya lokasi TPA dari TPA Grenjeng ke TPA Kopiluhur pada tahun 1999.

Pada faktanya adalah sistem pemrosesan akhir di TPA Kopiluhur adalah menggunakan *controlled landfill*. Hal ini dikarenakan *sanitary landfill* mengalami sejumlah hambatan seperti anggaran biaya yang tinggi, dibutuhkan lokasi atau lahan yang baru agar efektif pelaksanaannya, petugas pelaksana yang memadai, konsisten dalam melakukan pelapisan tanah. Hal ini juga disampaikan oleh Sumanto sebagai Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cirebon bahwa:

“Gini kan, kalo sanitary landfill ini harus dimulai dari dasar. Kita harus menentukan lagi lokasi yang baru. Kalo yang sudah ada dibentuk jadi sanitary landfill kan susah. Karena sebelum orang membuang sampah, di dasar itu dikasih membran. Membran itu adalah penyerap antara tanah dasar dengan tumpukan sampah yang kedap air. Jadi air itu gak akan tembus melalui membran tadi. Kemudian harus ada pemasangan pipa gas. TPA Kopiluhur juga pernah terjadi kebakaran. Sanitary landfill kan ya harus cari lokasi baru kemudian digali baru dipasang membran. Tapi ya itu mahal sekali, bisa sampe milyaran, membran nya kan mahal” (wawancara mendalam dengan Sumanto, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cirebon, 21 Mei 2014, Pukul 15.00)

Anggaran biaya yang tinggi ini dikarenakan untuk melapisi sampah dibutuhkan beberapa komponen seperti tanah liat, pasir dan membran. Komponen tersebut dilakukan secara bertahap dalam lapisan. Ketiga komponen pelapisan tersebut memerlukan anggaran yang besar. Komponen tersebut berguna untuk menghindari tercampurnya kandungan air hujan atau air tanah dengan sampah.

Sementara itu, lokasi atau lahan yang baru juga diperlukan beberapa pertimbangan seperti letak TPA yang harus jauh dari lingkungan pemukiman penduduk, jauh dari aliran air dan dibangun di atas tanah dengan permeabilitas relatif rendah yaitu tanah liat (McDouglas, 2001:27). Lokasi TPA yang baru juga diperlukan agar pelaksanaan *sanitary landfill* benar-benar efektif. Hal ini dikarenakan pelapisan tanah, sampah dan komponen lainnya masih awal sehingga dapat efektif. Konsistensi dari petugas pelaksana juga diperlukan dalam *sanitary landfill* karena pelapisan tanah, sampah dan komponen lainnya dilakukan setiap hari. Apabila tidak dilaksanakan sesuai dengan jadwal maka *sanitary landfill* tidak akan maksimal. Keefektifan *sanitary landfill* ini akan terjadi apabila pihak pemerintah dan swasta saling bekerjasama.

Berdasarkan hal tersebut, maka TPA Kopiluhur sulit untuk mengubah sistem pemrosesan akhir sampah dari *controlled landfill* ke *sanitary landfill*.

Pelaksanaan *controlled landfill* ini merupakan sebuah kemajuan. Hal dikarenakan sebelumnya sistem yang digunakan di TPA Kopiluhur adalah *open dumping*. Sistem *sanitary landfill* yang belum bisa dilaksanakan sehingga menggunakan sistem *controlled landfill* yang merupakan sistem pertengahan antara *open dumping* dan *sanitary landfill*. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Sudiro sebagai Staff Operasional UPTD TPA Kopiluhur.

“...Kalo kita kan disana *open dumping* karena berhubung kita-kita uda pengalaman jadi kaya semi gitu. Udah pada pengalaman semua sih, dulu kan di Grenjeng itu *sanitary landfill* dari 1991-1999. Terus dari 1999 sampai sekarang di TPA Kopiluhur. Dulu sih ada bantuan dari Bank Swiss. Kalo sekarang mah segimana kita aja lah, kan udah pengalaman ya, gak *open dumping* pisan tapi ada pelapisan” (wawancara mendalam dengan Sudiro, Staff Operasional UPTD TPA Kopiluhur, 21 Mei 2014, Pukul 11.15).



Gambar 5.6 Kondisi *Controlled Landfill* di TPA Kopiluhur

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2014

Pelaksanaan *controlled landfill* adalah dengan melakukan pemadatan dan pelapisan tanah setiap hari pada tumpukan sampah. Proses yang dilakukan setelah *dump truck* mengangkut sampah tiba di TPA Kopiluhur adalah langsung dilakukan pemadatan sampah dengan alat buldozer kemudian dilakukan pelapisan tanah dengan alat eksavator. Tanah untuk melapisi sampah berasal dari area sekitar TPA Kopiluhur. Hasil dari pelapisan tanah ini dapat dilihat pada gambar 5.6. Kondisi sampah yang bercampur dengan tanah ini sudah bertahun-tahun. Pelapisan tanah juga dilakukan dengan berpindah-pindah ke lokasi kosong di area

TPA. Hal ini juga disampaikan oleh Sudiro sebagai Staff Operasional UPTD TPA Kopiluhur bahwa:

“Ya mau dilapis juga campur dengan tanah, kecuali ininya ditinggal baru dilapis total. Ya pokoknya selagi masih buang disini, dilapis tanah ya. Dulu juga sama kalo uda dilapis, kemudian tinggal. Tuh yang disana tuh sampah dilapis tanah (menunjuk area berteduh para pemulung)” (wawancara mendalam dengan Sudiro, Staff Operasional UPTD TPA Kopiluhur, 21 Mei 2014, Pukul 11.15).

Perbandingan Sistem *open dumping*, *controlled landfill* dan *sanitary landfill* dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5.1 Perbandingan Sistem *Open Dumping*, *Controlled Landfill* dan *Sanitary Landfill*

	<i>Open Dumping</i>	<i>Controlled Landfill</i>	<i>Sanitary Landfill</i>
Pelaksanaan	Pembuangan terbuka tanpa ada perlakuan khusus pada TPA tersebut, baik dalam pengurangannya maupun penanganannya	Pembuangan terbuka dengan ada perlakuan khusus pada TPA tersebut, baik dalam pengurangan maupun penanganannya	Pengembalian sampah atau residu sampah ke dalam area TPA, dengan perlakuan khusus yang memperhatikan kesehatan lingkungan
Perlakuan Khusus Dalam Pengurangan Sampah	Tidak Ada	Ada, namun masih terbatas	Maksimal, sehingga sampah yang dibuang merupakan sisa-sisa yang tidak dapat diolah
Perlakuan Khusus Dalam Penanganan Sampah	Tidak Ada	1. Adanya kolam khusus sampah 2. Adanya sarana lingkungan 3. Adanya perlakuan khusus seperti <i>cover soil</i> walaupun <i>periodic</i>	1. Adanya kolam khusus sampah 2. Sarana penunjang lingkungan lengkap 3. Adanya perlakuan khusus seperti <i>cover soil</i> secara rutin setiap hari

Sumber: Data Olahan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cirebon, 2010

Selain sistem *Sanitary landfill* yang membutuhkan anggaran yang besar adalah perencanaan pembangunan TPS Tertutup untuk mengurangi dampak pencemaran udara ataupun pencemaran tanah. Hal ini dikarenakan anggaran operasional yang besar adalah terutama bahan bakar kendaraan untuk mengangkut sampah dari TPS ke TPA. Alokasi untuk bahan bakar saja dapat mencapai 1/3 alokasi persampahan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Perencanaan pembangunan berkelanjutan lainnya adalah dengan pembangunan TPA Regional yang akan berlokasi di Kabupaten Cirebon. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Sumanto sebagai Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cirebon bahwa “...Jadi akan dibuat TPA regional di Kabupaten Cirebon yang menyangkut wilayah 3 Cirebon”(wawancara mendalam dengan Sumanto, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cirebon, 21 Mei 2014, Pukul 15.00). Pembangunan TPA Regional ini juga perlu perencanaan anggaran yang matang dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cirebon.

Dinas Kebersihan dan Pertamanan perlu adanya prioritas anggaran dalam hal ini. Hal ini dikarenakan penetapan alokasi anggaran dari Pemerintah Kota Cirebon kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan tidak seperti alokasi anggaran untuk pendidikan atau kesehatan yang sudah tentu besarnya persentasenya. Dalam tahun anggaran 2013, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cirebon untuk urusan lingkungan hidup mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 6.738.423.000,00 realisasi sebesar Rp. 5.909.171.410,00 atau 87,69% untuk melaksanakan program dan kegiatan (ILPPD Kota Cirebon, 2013). Namun, dalam laporan tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai program dan kegiatan apa saja. Oleh karena itu, prioritas anggaran untuk program dalam rangka upaya pembangunan berkelanjutan perlu dilakukan.

5.4.6 Kebijakan

Hambatan lainnya dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah dalam upaya pembangunan berkelanjutan di Kota Cirebon adalah dilihat dari kebijakan yang digunakan saat ini oleh Pemerintah Kota Cirebon. Pemerintah Kota Cirebon masih menggunakan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Kebersihan di Kota Cirebon. Masalah

sampah merupakan hal yang dinamis sehingga Pemerintah Pusat pun membuat kebijakan yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah. Ada beberapa hal yang masih kurang sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat.

KSM Secerah Pagi Rw 08 Merbabu Asih Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti merupakan masyarakat yang mampu melaksanakan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Kebersihan di Kota Cirebon yaitu dengan adanya pemilahan sampah dan pemanfaatan kembali sampah dan pelaksanaan daur ulang. Konsep 3R ini juga didukung oleh akademisi yang menyebutkan bahwa alternatif kebijakan pengelolaan sampah adalah dengan mengupayakan 3R. Nurudin Siraj sebagai akademisi kebijakan publik menyampaikan bahwa *“Daur ulang itu kan memanfaatkan sampah ke dalam fungsi publik. Dari daur ulang maka sampah ilang dari situ to. Misalnya dibuat kompos”* (wawancara mendalam dengan Nurudin Siraj, akademisi kebijakan publik, 20 Mei 2014, Pukul 12.00).

Namun demikian, Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Kebersihan di Kota Cirebon tidak jelas mengatur pihak-pihak seperti masyarakat, swasta dan lainnya dalam rangka pengurangan sampah di tingkat sumber sampah. DPRD sebagai pihak yang melakukan pengawasan dalam pengelolaan sampah juga seharusnya berperan dalam merevisi kebijakan hal ini. Namun, DPRD sebagai pihak legislatif daerah masih belum dapat berperan banyak dalam pengelolaan sampah di Kota Cirebon. Pengelolaan sampah di Kota Cirebon masih dianggap sebagai hal yang masih belum dapat menguntungkan secara signifikan dibanding permasalahan lainnya. Hal ini juga disampaikan Aty Hermawaty sebagai Kasub Bidang Perencanaan Pengembangan Kawasan Perkotaan, Lingkungan Hidup dan Pertanahan Bappeda Kota Cirebon bahwa:

“Nah itu kan seharusnya inisiatif dari dewan, maksudnya memanggil SKPD terkait, meminta rapat dengan kita. Ataupun bisa dari dinas. Tapi kalo legislatif memanggil eksekutif itu lebih ampuh soalnya mesti datangnya. Tapi beda ketika inisiatif memanggil dari eksekutif mengundang dewan jarang hadir. Kita tuh tim yang harusnya bekerjasama tapi seringkali bertentangan. Masalah sampah ini seringkali

kalah misalnya dengan pembangunan mall, masalah sampah ini tidak ada nilai ekonomisnya” (wawancara mendalam dengan Aty Hermawaty, Kasub Bidang Perencanaan Pengembangan Kawasan Perkotaan, Lingkungan Hidup dan Pertanahan Bappeda Kota Cirebon, 14 Mei 2014, Pukul 14.00).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah menyebutkan bahwa terdapat beberapa pihak yang dapat mengelola sendiri sampahnya yaitu kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial. Namun demikian, Pemerintah Kota Cirebon melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan tetap menyediakan TPS yang sudah ditentukan. Kawasan komersial misalnya adalah pasar modern atau mall dapat mengelola sampah sendiri, hal ini juga seperti yang disampaikan oleh Hendra Irawan sebagai Kepala Bidang Konservasi dan Pemulihan KLH Kota Cirebon bahwa *“Nah swasta sendiri kemarin KLH merapatkan kepada para swalayan atau mall-mall. Kepala KLH mengatakan kepada mereka kalau bisa sampah yang dihasilkan mereka kelola sendiri atau kompos sendiri”* (wawancara mendalam dengan Hendra Irawan, Kepala Bidang Konservasi dan Pemulihan KLH Kota Cirebon, 12 Mei 2014, Pukul 10.30).

Pengurangan sampah di tingkat sumber sampah dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat Kecamatan Harjamukti seperti di Kelurahan Larangan dan Kelurahan Kecapi sudah melakukan bank sampah. Pengurangan sampah di tingkat sumber sampah dilakukan dengan melakukan bank sampah, kerajinan daur ulang, *composting*. Namun pengurangan sampah di tingkat sumber sampah seperti bank sampah itu hanya dilakukan dalam masyarakat saja. Kantor Lingkungan Hidup sebagai pihak yang bertugas untuk mensosialisasikan pengurangan sampah di tingkat sumber sampah juga mensosialisasikan kepada remaja sekolah. Hal ini juga sesuai dengan yang disampaikan oleh Hendra Irawan sebagai Kepala Bidang Konservasi dan Pemulihan KLH Kota Cirebon bahwa:

“Nah kita masuk ke dunia pendidikan supaya bisa mengurangi sampah di sekolah. Sekarang banyak sekolah-sekolah yang sudah menerapkan bank sampah di sekolahnya seperti SMAN 2 Cirebon, SMAN 3 Cirebon, SMPN 8 Cirebon, SMPN 11 Cirebon” (wawancara mendalam dengan Hendra Irawan, Kepala Bidang Konservasi dan Pemulihan KLH Kota Cirebon, 12 Mei 2014, Pukul 10.30).

Berdasarkan hal di atas, maka kebijakan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Kebersihan di Kota Cirebon masih terdapat kekurangan untuk memaksimalkan pengelolaan sampah dalam upaya pembangunan berkelanjutan.



BAB 6

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1 SIMPULAN

Implementasi kebijakan pengelolaan sampah dalam upaya pembangunan berkelanjutan di Kota Cirebon (Studi Kasus Kecamatan Harjamukti) masih belum terlaksana secara komprehensif karena hanya sebagian kecil kelompok masyarakat yang melakukan pengurangan sampah di tingkat sumber sampah dengan konsep 3R (*reduce, reuse, recycle*). Salah satu contoh kelompok masyarakat yang berhasil mengelola sampah dengan konsep 3R (*reduce, reuse, recycle*) adalah KSM Secerah Pagi Rw 08 Merbabu Asih Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti. Kurang berhasilnya implementasi kebijakan pengelolaan sampah dalam upaya pembangunan berkelanjutan di Kota Cirebon (Studi Kasus Kecamatan Harjamukti) mencakup kurangnya sosialisasi, kurangnya peran swasta dan kebijakan masih lemah.

6.2 REKOMENDASI

Pengelolaan sampah dalam upaya pembangunan berkelanjutan di Kota Cirebon terutama di Kecamatan Harjamukti menemui beberapa masalah dan hambatan. Oleh karena itu, peneliti memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Cirebon melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cirebon bekerjasama dengan Kantor Lingkungan Hidup untuk mensosialisasikan dan memberikan pelatihan secara massif kepada masyarakat tentang pengurangan sampah di tingkat sumbernya dengan konsep 3R. Sosialisasi ini digunakan agar masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan sampah dengan konsep 3R lebih banyak lagi.
2. Pemerintah Kota Cirebon melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan bekerjasama dengan Kantor Lingkungan Hidup untuk menarik pihak swasta atau investor lebih banyak lagi dalam pengelolaan sampah dengan menawarkan sejumlah hal yang memberikan profit bagi swasta namun tidak merugikan Pemerintah Kota Cirebon.

3. Pemerintah Kota Cirebon melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan bersama-sama dengan Kantor Lingkungan Hidup, Bappeda dan DPRD untuk membuat kebijakan tentang pengangkutan sampah yang harus dipilah dari tingkat sumbernya agar selaras dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah. Misalnya salah satu contoh usulan kebijakan mengenai pengangkutan sampah organik dilakukan pada Hari Senin, Rabu dan Jumat; pengangkutan sampah nonorganik dilakukan pada Hari Selasa dan Kamis.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anderson, James E. 2006. *Public Policy Making, Sixth Edition*. New York: Houghton Mifflin Company.
- Azis, Iwan J, Lydia M. Napitupulu, Arianto A. Patunru, Budy P. Resosudarmo. ed. 2010. *Pembangunan Berkelanjutan: Peran dan Kontribusi Emil Salim*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Baker, Susan, Maria Kousis, Dick Richardson, and Stephen Young. ed. 2005. *The Politics of Sustainable Development: Theory, Policy and Practice Within The European Union*. New York: Routledge.
- Budihardjo, Eko dan Djoko Sujarto. 2005. *Kota Berkelanjutan*. Bandung: PT Alumni.
- Chandrappa, Ramesha dan Diganta Bhusan Das. 2012. *Solid Waste Management: Principles and Practice*. Berlin, Heidelberg: Springer.
- Cochran, Clarke E et al. 2010. *American Public Policy: An Introduction 10th Edition*. USA, Boston: Wadsworth.
- Creswell, John W. 2009. *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. California: Sage Publications, Inc.
- Damanhuri, Enri dan Tri Padmi. 2010. *The Role of Informal Collectors of Recyclable Waste and Used Goods in Indonesia*. Bandung: ITB.
- Djamin, Djanius. 2007. *Pengawasan dan Pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup: Suatu Analisis Sosial*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- El-Haggar, Salah M. 2007. *Sustainable Industrial Design and Waste Management Cradle to Cradle For Sustainable Development*. USA: Elsevier Academic Press.
- Herdiansyah, Haris. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Hill, Michael dan Peter Hupe. 2002. *Implementing Public Policy: Governance in Theory and in Practice*. California, Thousand Oaks: Sage Publications Inc.
- Knoepfel, Peter, Corrine Larrue, Frédéric Varone dan Michael Hill. 2007. *Public Policy Analysis*. Great Britain: The Policy Press.
- Maddison, Sarah dan Richard Dennis. 2009. *An Introduction to Australian Public Policy Theory and Practice*. New York: Cambridge University Press.
- Malik, Abdul, Elisabeth Grohmann (eds). 2012. *Environmental Protection Strategies for Sustainable Development*. New York: Springer.
- Mazmanian, Daniel H., dan Paul A. Sabatier. 1983. *Implementation and Public Policy*. New York: HarperCollins.
- McDougall, Forbes R, Peter R White, Marina Franke dan Peter Hindle. 2001. *Integrated Solid Waste Management: a Life Cycle Inventory second edition*. Blackwell Science.

- Mitchell, Bruce, B.Setiawan dan Dwita Hadi Rahmi. 2000. *Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy: Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: PMN.
- Neuman, W. Lawrence. 2007. *Basics of Social Research: Qualitative and Quantitative Approaches, Second Edition*. USA: Pearson Education Inc.
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD). 2006. *Subsidy Reform and Sustainable Development: Economic, Environmental and Social Aspects*. OECD: Secretary-General of The OECD.
- Pariatamby, A dan Masaru Tanaka (eds.). 2014. *Municipal Solid Waste Management In Asia And Pacific Islands*. Singapore: Environmental Science and Engineering.
- Soemarwoto, Otto. 2004. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan.
- Subarsono, AG. 2010. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tammemagi, Hans. 1999. *The Waste Crisis: Landfill, Incinerators, The Search for Sustainable Future*. Oxford: Oxford University Press.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus, Edisi & Revisi Terbaru*. Yogyakarta: CAPS.
- World Bank. 1999. *What A Waste: Solid Waste Management*. Washington: World Bank.
- _____. 2000. *Integrated Planning for Sustainable Environment*. London: Earthscan Publication.
- _____. 2012. *What A Waste: A Global Review Of Solid Waste Management*. Washington: World Bank.

Jurnal Ilmiah dan Penelitian

- BPS Kota Cirebon. 2013. *Kota Cirebon Dalam Angka 2013*. Cirebon: BPS Kota Cirebon.
- Budiarti, Erna. 2012. *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Tangerang Selatan*. Depok: Program Sarjana Reguler FISIP UI.
- Chaerul, Muhammad, Masaru Tanaka dan Ashok V Shekdar. 2006. *Municipal Solid Waste Management In Indonesia: Status and Strategic Actions*. Faculty of Environmental Science and Technology, Okayama University. Vol.12 No.1, pp.41-49 march 2007. [Online] available: file:///C:/Users/Windows%207/Downloads/012_041_049.pdf. 2014, 25 Februari.
- Drexhage, John and Deborah Murphy. 2010. *Sustainable Development: From Brundtland to Rio 2012, Paper For The High Level Panel on Global*

Sustainability. New York: United Nation Headquarter. [Online] available: http://www.un.org/wcm/webdav/site/climatechange/shared/gsp/docs/GSP1-6_Background%20on%20Sustainable%20Devt.pdf. 2014, 24 Februari.

Engineering Consulting Firms Association Japan. 2009. *Integrated Environmental Improvement of Leuwigajah Disposal Site In West Java, Republic of Indonesia*. [Online] available: http://www.ecfa.or.jp/japanese/act-pf_jka/H21/yachiyo.pdf. 2014, 25 Februari.

Harris, Jonathan M. 2003. *Sustainability and Sustainable Development*. USA: Tufts University. [Online] available: <http://isecoeco.org/pdf/susdev.pdf>. 2014, 1 Maret.

Rachmawati, Randi. 2006. *Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No.5 Tahun 1988 Mengenai Pengelolaan Sampah Padat di DKI Jakarta*. Depok: Program Sarjana Ekstensi FISIP UI.

Sugandhy, Aca. 2006. *Pengelolaan taman Nasional Dalam Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus: Kawasan Taman Nasional Way Kambas, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung*. Jakarta: Jenjang Pendidikan Doktor, Program Studi Ilmu Lingkungan, Program Pasca Sarjana UI.

Susanti, Susi. 2009. *Implementasi “Kebijakan Pariwisata Internasional” di Provinsi Bengkulu Ditinjau dari Pembangunan Berkelanjutan*. Depok: Program Sarjana Reguler FISIP UI.

United Nation Development Programme. 2013. *Human Development Report 2013: The Rise of the South, Human Progress in Diverse World*. New York: United Nation.

UPTD TPA Kopiluhur. 2014. *Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Kopiluhur*. Cirebon: Bagian Administrasi UPTD TPA Kopiluhur.

Peraturan

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Lembaran Negara Nomor 69 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851.

_____. 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Lembaran Negara Nomor 48 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833.

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. 2010. Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah.

Pemerintah Daerah Kota Cirebon. 2002. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan di Kota Cirebon. Lembaran Daerah Nomor 7 Tahun 2002.

_____. 2012. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cirebon Tahun 2011-2031. Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2012 Seri E.

_____. 2013. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 45 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cirebon.

Sumber Elektronik

- BPS Kota Cirebon. 2012. *Kota Cirebon Dalam Angka 2012*. [Online] available: <http://www.bpskotacirebon.org/index.php/publikasi/openpub/514be2822ef63/514be2883d68f/KOTA+CIREBON+DALAM+ANGKA+2012+-+Page+140>. 2014, 30 Januari.
- Harris, Jonathan M. Et al.,. 2008. *Environmental Dimension of Macroeconomic Measurement*. [Online] available <http://www.eoearth.org/view/article/152614/>. 2014, 2 Maret.
- Kementerian Lingkungan Hidup. 2013. *Profil Bank Sampah 2013*. [Online] available : <http://www.menlh.go.id/profil-bank-sampah-indonesia-2013/>. 2014, 15 Februari.
- _____. 2014. *Hari Peduli Sampah 2014: Indonesia Bersih Sampah 2010*. [Online] available: <http://www.menlh.go.id/hari-peduli-sampah-2014-indonesia-bersih-sampah-2020/>. 2014, 18 Maret.
- Ladzi, M. *Isu-isu Seputar Indeks Pembangunan Manusia Indonesia dengan Paradigma Humanizing Development*. [Online] available: <http://bdksurabaya.kemenag.go.id/file/dokumen/ISUISUPMBANGUNAN.pdf>. 2014, 1 Februari.
- Redaksi Bisnis Indonesia. 2013. *Jaga Kebersihan Pemkot Cirebon Hilangkan Tempat Sampah*. [Online] available: <http://bandung.bisnis.com/read/20130515/61825/361333/jaga-kebersihan-pemkot-cirebon-hilangkan-tempat-sampah>. 2014. 25 April.
- Redaksi Geoforce Indonesia. 2013. *Klasifikasi geosintetik*. [Online] available: <http://www.geoforce-indonesia.com/index.php/template/klasifikasi-geosintetik>. 2014, 2 Maret.
- Redaksi Kompas. 2010. *Warga Kota Cirebon Hadang Truk Sampah*. [Online] available: <http://regional.kompas.com/read/2010/03/22/16154659/Warga.Kota.Cirebon.Hadang.Truk.Sampah>. 2014, 25 April.
- Redaksi Koran Sindo. 2013. *Sampah Banyak, TPS Minim*. [Online] available : <http://koran-sindo.com/node/306053>. 2014, 7 Februari.
- Redaksi Pikiran Rakyat. 2013. *TPA Kopiluhur Sudah Maksimal*. [Online] available: <http://www.pikiran-rakyat.com/node/257249>. 2014, 11 Februari.
- Redaksi National Geographic Indonesia. 2011. *90 Persen Sampah di Indonesia Belum di Daur Ulang*. [Online] available : <http://nationalgeographic.co.id/berita/2011/11/90-persen-sampah-di-indonesia-belum-didaur-ulang>. 2014, 15 Februari.
- Sistem Informasi dan Manajemen Data Dasar Regional Bappenas. 2012. *Profil Pembangunan Provinsi Jawa Barat*. [Online] available: <http://www.simregbappenas.net/Profil/Profil%20Pembangunan%20Provinsi%203200JaBar%202013.Pdf>. 2014, 25 Februari.



LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM

1. Subjek Wawancara

- a. Aty Hermawaty, Kasub Bidang Perencanaan Pengembangan Kawasan Perkotaan, Lingkungan Hidup, dan Pertanahan Bappeda Kota Cirebon
- b. Hendra Irawan, Kepala Konservasi dan Pemulihan Kantor Lingkungan Hidup Daerah Kota Cirebon
- c. Sumanto, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cirebon
- d. Agus Hasyim, Kepala Bidang Kebersihan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cirebon
- e. Otang Somantri, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di TPA Kopiluhur
- f. Sudiro, Staff Operasional UPTD TPA Kopiluhur
- g. Upri, Petugas penjaga gedung Pabrik Kompos TPA Kopiluhur
- h. Suwarso Budi Winarno, Camat di Kecamatan Harjamukti
- i. Sutisna, Lurah di Kelurahan Larangan
- j. Agus Supriyono, Ketua Komunitas KSM Secerah Pagi Rw.08 Kelurahan Larangan
- k. Dani Komara, Sekretaris Komunitas KSM Secerah Pagi Rw.08 Kelurahan Larangan
- l. Nunung Nurhayati, Wakil masyarakat Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti
- m. Nurudin Siraj, Akademisi Cirebon yang *concern* dalam bidang implementasi kebijakan di Kota Cirebon

2. Konten Wawancara

Adalah semua informasi yang berkaitan dengan hal ihwal yang berkaitan dengan pertanyaan pokok penelitian, yakni bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan sampah dalam upaya pembangunan berkelanjutan di Kota Cirebon (Studi Kasus Kecamatan Harjamukti)?

3. Kedudukan Wawancara

- a. Pewawancara menempatkan diri sebagai peneliti
- b. Narasumber merupakan orang sesungguhnya yang paling tahu tentang konten. Oleh karena itu, informasi dari salah satu narasumber dieksplor sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh informasi selengkap mungkin
- c. Antara narasumber satu dengan lain dilakukan triangulasi data sedemikian rupa sehingga validitas informasi terjamin.

4. Proses Wawancara

- a. Wawancara dilaksanakan antara tanggal 5 Mei 2014 sampai dengan tanggal 31 Mei 2014

- b. Wawancara dilakukan di kantor narasumber atau tempat yang disetujui
- c. Dilakukan perekaman dengan *audio tape* atau *tape recorder* dan alat tulis (buku dan pulpen)
- d. Dimulai dengan salam
- e. Wawancara dilaksanakan dengan etika sopan santun
- f. Wawancara dilakukan dengan proses pembicaraan dan diskusi yang baik
- g. Jika materi wawancara belum selesai, namun narasumber ingin mengakhiri wawancara. Maka diajukan permohonan untuk melanjutkan wawancara pada waktu berikutnya
- h. Wawancara diakhiri dengan salam
- i. Selesai wawancara, hasil perekaman pembicaraan dilakukan pentranskripan, dan dikonfirmasi ulang kepada narasumber untuk mendapatkan keabsahan, jika disepakati maka diharapkan memberikan tandatangan atau diaparaf (validitas isi terjamin)
- j. Hasil wawancara ini dijadikan lampiran skripsi



MATERI PEDOMAN WAWANCARA

1. **Kasub Bidang Perencanaan Pengembangan Kawasan Perkotaan, Lingkungan Hidup dan Pertanahan Bappeda Kota Cirebon**
 - a. Implementasi Pengelolaan sampah di Kota Cirebon
 - b. Perencanaan dan pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cirebon
 - c. Koordinasi antara Bappeda Kota Cirebon dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam pengelolaan sampah di Kota Cirebon
 - d. Kendala/hambatan dalam proses koordinasi dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan terkait pengelolaan sampah
 - e. Koordinasi dengan Kecamatan Harjamukti terkait pengelolaan sampah
 - f. Upaya Bappeda dalam menindaklanjuti pengelolaan sampah oleh pelaksana teknis Dinas Kebersihan dan Pertamanan

2. **Kepala Konservasi dan Pemulihan KLH Kota Cirebon**
 - a. Implementasi Kebijakan Pengelolaan sampah di Kota Cirebon
 - b. Peran KLH Kota Cirebon dalam Pengelolaan Sampah di Kota Cirebon
 - c. Ketersediaan Program khusus untuk menangani pengelolaan sampah di Kota Cirebon
 - d. Dukungan dari pihak lainnya dalam pengelolaan sampah di Kota Cirebon
 - e. Sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah di Kota Cirebon
 - f. Pengelolaan sampah di Kecamatan Harjamukti
 - g. Respon masyarakat pada umumnya dan khususnya di Kecamatan Harjamukti dengan adanya kebijakan pengelolaan sampah
 - h. Upaya masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Harjamukti

3. **Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cirebon**
 - a. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Cirebon
 - b. Kendala/hambatan dalam pengelolaan sampah di Kota Cirebon
 - c. Pengelolaan sampah di Kecamatan Harjamukti
 - d. Kewenangan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cirebon dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Harjamukti
 - e. Upaya pembangunan berkelanjutan di Kecamatan Harjamukti
 - f. Sarana dan prasarana di Kecamatan Harjamukti dalam pengelolaan sampah
 - g. Peran serta masyarakat di Kota maupun di Kecamatan Harjamukti dalam pengelolaan sampah
 - h. Sistem pengelolaan sampah di Kecamatan Harjamukti

4. **Kepala Bidang Kebersihan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cirebon**
 - a. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Cirebon

- b. Implementasi Pengelolaan Sampah di Kecamatan Harjamukti
 - c. Upaya pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan sampah di Kota Cirebon, khususnya di Kecamatan Harjamukti
 - d. Sarana dan prasarana pengelolaan sampah di Kecamatan Harjamukti
 - e. Dukungan institusi lain dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Harjamukti
- 5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) TPA Kopiluhur**
- a. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Cirebon
 - b. Dukungan dari Kecamatan Harjamukti atau Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam pengelolaan sampah di TPA Kopiluhur
 - c. Peran serta masyarakat sekitar dalam pengelolaan sampah di TPA Kopiluhur
 - d. Kendala/hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan sampah di TPA Kopiluhur
 - e. Pelaksanaan sistem *sanitary landfill* dalam pengelolaan sampah di TPA Kopiluhur
- 6. Staff Operasional UPTD TPA Kopiluhur**
- a. Pelaksanaan sistem *sanitary landfill* dalam pengelolaan sampah di TPA Kopiluhur
 - b. Kendala/hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan sampah di TPA Kopiluhur
 - c. Peran serta masyarakat sekitar TPA Kopiluhur
- 7. Camat di Kecamatan Harjamukti**
- a. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Harjamukti
 - b. Peran Kecamatan Harjamukti dalam mendukung pengelolaan sampah
 - c. Pengelolaan sampah di TPA Kopiluhur yang berada di wilayah Kecamatan Harjamukti
 - d. Dukungan dari instansi lain dalam pengelolaan sampah
 - e. Peran masyarakat Kecamatan Harjamukti dalam pengelolaan sampah
 - f. Upaya pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Harjamukti
- 8. Lurah di Kelurahan Larangan**
- a. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kelurahan Larangan
 - b. Peran Kelurahan Larangan dalam mendukung pengelolaan sampah
 - c. Peran masyarakat Kelurahan Larangan dalam pengelolaan sampah
 - d. Kendala/hambatan Kelurahan dalam implementasi pengelolaan sampah
 - e. Upaya pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Larangan

9. **Wakil masyarakat di Kecamatan Harjamukti yang *concern* terhadap pengelolaan sampah maupun yang merasakan dampak dari pelaksanaan pengelolaan sampah**
 - a. Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Harjamukti
 - b. Peran serta masyarakat dalam upaya pengelolaan sampah terutama dalam usaha pembangunan berkelanjutan
 - c. Peran Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cirebon melakukan mekanisme pengelolaan sampah
 - d. Peran Kecamatan dalam pengelolaan sampah di Kelurahan
 - e. Peran TPA Kopiluhur sebagai pembuangan akhir dalam pengelolaan sampah

10. **Akademisi yang *concern* dalam implementasi kebijakan di Kota Cirebon**
 - a. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Cirebon
 - b. Peran pemerintah dalam pengelolaan sampah
 - c. Keefektifan sistem *sanitary landfill* dalam pengelolaan sampah di Kota Cirebon
 - d. Sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah di Kota Cirebon
 - e. Peran masyarakat Kecamatan Harjamukti dalam pengelolaan sampah
 - f. Dukungan institusi lain yang turut membantu dalam pengelolaan sampah
 - g. Kendala/hambatan yang dihadapi pemerintah atau masyarakat dalam pengelolaan sampah

PEDOMAN OBSERVASI

1. Observasi dalam hal ini didefinisikan sebagai:
 - a. Perekaman semua informasi yang berkaitan dengan konten dalam bentuk gambar, tulis dan pengungkapan pendapat masyarakat di Kecamatan Harjamukti.
 - b. Seluruh informasi yang berkaitan dengan hal ikhwal yang berkaitan dengan pertanyaan pokok penelitian: Bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan sampah dalam upaya pembangunan berkelanjutan di Kota Cirebon (Studi Kasus Kecamatan Harjamukti).
2. Instrumen pengumpulan data berupa rekaman gambar (foto), rekaman suara, video dan lain sebagainya.
3. Lokasi observasi dapat dilakukan di tempat seperti di kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cirebon, Kecamatan Harjamukti, TPS-TPS di Kota Cirebon, TPA Kopiluhur, Kelurahan.
4. Waktu observasi ke tempat observasi dilakukan pada pagi hari hingga sore hari, pada saat jam kerja.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Siti Hardiyanti
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 13 Januari 1992
Alamat : Ds.Panembahan No.251 Blok.Tanah Baru
Rt.06/Rw.02 Plered-Cirebon 45158
Nomor Telepon, Email : 085295567071, sitihardiyanti446@gmail.com
Nama Orangtua: Ayah : Kamar Adi Muljanto (Alm)
Ibu : Rochana

Riwayat Pendidikan Formal

SD : SD Negeri 2 Panembahan Tahun 1998-2004
SMP : SMP Negeri 1 Weru Tahun 2004-2007
SMA : SMA Negeri 2 Kota Cirebon Tahun 2007-2010
S1 : Universitas Indonesia, 2010-Juni 2014